ISLAM DAN MILITER: DINAMIKA HUBUNGAN GERAKAN ISLAM POLITIK DAN MILITER DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUMANIORA

Disusun Oleh:

SYUKRAN MA'MUN HIDAYAT
01120629

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2006

Drs. Musa, M.Si.
Dosen Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Syukran Ma'mun Hidayat
Lamp. : 1Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas ADAB
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Syukran Ma'mun Hidayat
NIM : 01120629
Judul Skripsi : *Islam dan Militer: Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998 M.)*

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam pada Fakultas ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara Syukran Ma'mun Hidayat dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2006 M

Pembimbing

Drs. Musa, M,si.
NIP. 150254036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ISLAM DAN MILITER: DINAMIKA HUBUNGAN GERAKAN ISLAM POLITIK DAN MILITER DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

Diajukan oleh :

1. Nama : **SYUKRAN MA'MUN HIDAYAT**
2. NIM : 01120629
3. Program : Sarjana Strata 1
4. Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam

Telah dimunaqasyahkan pada hari: **Rabu** tanggal **12 April 2006** dengan nilai **A+** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Maman Abdul Malik Sy, M.S.
NIP. 1501197350

Sekretaris Sidang

Syamsul Arifin, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150312445

Pembimbing /merangkap penguji,

Drs. Musa, M.Si.
NIP. 150254036

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Penguji II,

Drs. Badrun Alaena, M.Si.
NIP. 150253332

Yogyakarta, 12 April 2006
Dekan,

Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150173235

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KUAKUI KEPADAMU BAHWA PIKIRAN TAK SADARKU
LEBIH KUAT DARIPADA PIKIRAN SADARKU,
DAN ACAPKALI AKU MEMATUHINYA

(NAWAL EL SADAWI)

PERSEMBAHAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku;
Muhammad Musyayyidi-Siti A'isyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi *"Islam dan Militer: Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia pada Masa Orde Baru, 1966-1998 M."* ini dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi setidaknya, skripsi ini sedikit mencoba mengartikulasikan atas segala hal selama studi di Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Segala kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini.

Kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini.. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si. selaku ketua jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Musa M.si., sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan serta meluangkan waktunya untuk membaca dan mengoreksi segala bentuk kekurangan dalam skripsi ini, sekali lagi terima kasih.
4. Drs. Badrun Alaena, Msi., sebagai Penasehat Akademik.
5. Segenap dosen Fakultas Adab yang telah mencurahkan segala ilmunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Dr. Anhar Gonggong atas kontribusinya memberikan pendapat dan pemikirannya atas skripsi ini.
7. Dr. Salim Said, terimakasih dengan arahan dan saran-sarannya. Adalah suatu penghargaan luarbiasa di tengah kesibukannya penulis berkesempatan untuk wawancara.
8. Dr. Abdoel Fattah, yang telah banyak mencurahkan pendapat dan gagasannya. Pengalamannya sebagai staf pengajar marinir dan bergelut di bidang kemiliteran membuat penulis lebih tertarik dan dekat dengan studi ini.
9. Bapak Drs. Andi Mappetahang Fatwa (A.M. Fatwa) yang telah menerima penulis dengan baik hati. Meskipun tidak sempat berbicara banyak tentang studi ini. tapi telah memberi pengetahuan tentang hakikat sebuah perjuangan. Segenap para staf ahli A.M. Fatwa; A. Bakir Ihsan M.Si., Drs. H. Barun, Drs. H. Suwago, M.Si., Saripudin, HA., Sa'dono, yang telah memberikan beberapa buku tentang AM. Fatwa dan pengalamannya di penjara sebagai tahanan politik/Tapol Orde Baru (1985-1993) dan kiprahnya sebagai staf ahli Wakil Ketua MPR/RI dan Komisi I DPR-RI bidang pertahanan dan keamanan (2004-2009). Hal ini, telah banyak memberikan wacana baru bagi penulis dalam studi ini.
10. Segenap staf TU Fakultas ADAB UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan.
11. Pegawai Perpustakaan Pusat Studi Sejarah TNI "Museum Setiamadya" Jakarta, Perpustakaan LIPI Jakarta, Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR-RI Jakarta, Perpustakaan Ignatius Kollege

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Perpustakaan Fak. ADAB, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, atas segala kemudahan dan partisipasinya.

12. Ahmad Maulani, Kholilirrohman, Haryono, Roni Patinasari, Faqih, dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas kesediaannya meminjamkan beberapa buku dan fasilitas lainnya dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Muhammad Musyayyidi dan Ibu Siti A'isyah (terimakasih atas segala doa dan kesabarannya dalam membesarkan penulis). Untuk Kakakku; Abdullah Azwar Anas (atas kesabarannya tak kenal lelah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis ditengah kesibukannya, engkau adalah teladan dan inspirasi jiwa penulis). Murtasimatus Zahro', Tartimatus Sholihah (do'a dan ketulusanmu selalu menyertai setiap langkah penulis). Kakak Iparku; Ipuk Fiestiandani Anas, Masykur Ali, Abd Syakur (atas kesetiaan dan keikhlasannya membuatku selalu kagum). Buat Adik-adikku; Dewi Karimah (maafkan jika selama kakak di Jogja tidak selalu menyertaimu, tapi nafasku adalah doa untukmu, kehadiranmu disisiki dalam mengerjakan tulisan ini membuatku untuk terus bersemangat dan berkarya). Robiatul Munawaroh, Mufti A'immah Nurul Anam, Nihayatul Wafiroh, Liza Azizah, Laili Maqomatul Mahmudah (engkau adalah adik-adikku yang manis teruslah bersemanagt, terima kasih atas kesayangan dan doanya).
14. Teman-teman pengurus BEM-SPI 2003-2004; Imam Ihya'uddin, Yuliana, Gamma Trihapsari, Puspitasari, M. Syahfrudin, Alif ja'far, Hatmini, Nurul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mughniyah Romah Fitri, Syaiful Haq, Fathul Majid, Fathurrohman, Puput Kurniawan, Ulumuddin, Abdul Aziz, Mas'ud Rofiqi, Iis Isti'anah, Nur Faridhoh, Abdurrahim Abdullah, Nurul Huda, Adiguna, Namli Wahid. Saat-saat bersama mereka telah banyak melahirkan gagasan dan pengalaman berlian. Terimakasih atas segala dukungannya.

15. Mutiaraku yang telah memperkenalkan pada "kesetiaan" dan "menjadikanku" laki-laki.
16. Buat semua yang turut membantu pengerjaan penulisan skripsi ini, Thank You!

Demikian, semoga skripsi menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi masa depan agama, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, 13 April 2006 M.

Penulis

Syukran Ma'mun Hidayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16
D. Tinjauan Pustaka 17
E. Pendekatan dan Landasan Teori 20
F. Metode Penelitian 30
G. Sistematika Pembahasan 32

BAB II TINJAUAN HISTORIS PERGUMULAN ISLAM DAN NEGARA PADA MASA AWAL ORDE BARU (1966-1975) 34
A. Awal Kebangkitan Orde Baru 35
B. Islam dan Politik Awal Orde Baru 46
C. Ambivalensi Islam dan Militer 57
D. Benih Dominasi Militer 65

BAB III DARI KEKERASAN DAN PEMINGGIRAN MENUJU SEMANGAT KEBANGKITAN ISLAM POLITIK (1976-1988) 71
A. Jurus Politik Orde 72
1. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dwifungsi dan Hegemoni Militer 76
3. Peminggiran Gerakan Islam Politik 83
4. Depolitisasi Islam Politik 94
B. Formula Baru Gagasan Islam Politik 99
1. Merumuskan Kembali Landasan Islam Politik 100
2. Islam Alternatif 104
3. Gerakan Pembaruan "Pemikiran" Islam Politik 106
4. Kebangkitan Islam Politik 111

BAB IV HARMONISASI ISLAM DAN MILITER: TANGGAPAN AKOMODATIF NEGARA ATAS GERAKAN ISLAM POLITIK (1989-1998) 115
A. Kearah Kemajuan Hubungan Islam-Militer dan Negara 116
B. Harmonisasi Islam dan Militer 120
C. Pergeseran Militer: Dari Abangan dan non-Muslim ke Muslim Santri 126
D. Akomodasi Islam Politik 133

BAB V PENUTUP 139
A. Kesimpulan 139
B. Saran-Saran 145

DAFTAR PUSTAKA 148
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HDIUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

> Hubungan ABRI dan "umat Islam" sejak awal masa revolusi kemerdekaan mengalami dinamika dan romantika yang sangat menarik perhatian banyak kalangan. Dua kelompok masyarakat tersebut di Indonesia memang memiliki kekhasan (keunikan), tradisi dan kultur sendiri-sendiri. Keduanya tetap memiliki orientasi dan prinsip yang sama dan tunggal dalam kehidupan bernegara, yaitu kebangsaan. ...pada masa-masa berikutnya hingga dua dasawarsa pemerintahan Orde Baru, posisi [umat Islam] benar-benar tersudutkan. Barangkali sebab pokonya adalah "kecelakaan sejarah" yang merupakan konsekuensi dari perbedaan strategi dalam melawan kekuatan penjajah, yang kemudian menjurus kearah konflik terbuka antara ABRI (pemerintah) dengan beberapa tokoh perjuangan dari umat Islam yang kemudian berakibat pemberian cap [stigma] "anti kebangsaan."
>
> —Yahya A. Muhaimin[1]

> Satu hal yang perlu ditekankan ialah bahwa antara Islam cita-cita (*ideal Islam*) dan Islam sejarah (*historic Islam*) harus ada suatu mata rantai positif dan jelas untuk memungkinkan Islam sejarah bergerak maju mendekati Islam cita-cita. Dalam sejarah Islam [hubungan Islam dan politik] mata rantai ini tidak selalu jelas hingga kriterium untuk melihat Islam sejarah tidak mudah. Perlunya untuk senantiasa menempatkan Islam cita-cita lebih tinggi dari kenyataan yang ada agar gerak menaik [vertikal] itu menjadi mungkin. Islam cita-cita, sebagaimana yang dengan nyata telah diterjemahkan ke dalam realitas sejarah pada masa Nabi dan beberapa tahun sesudah wafatnya, tetap menjadi inspirasi yang tak habis-habisnya bagi umat Islam dari waktu ke waktu.
>
> —Ahmad Syafii Maarif[2]

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia Islam dan militer merupakan dua kekuatan strategis yang memiliki hubungan pasang surut. Posisi strategis Islam terletak pada kuantitas mereka sebagai kelompok mayoritas di negeri ini, sementara militer merupakan kelompok bersenjata (pertahanan keamanan)

---

[1]Yahya A. Muhaimin, *Islam di Mata Para Jenderal* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27-31.

[2]Ahmad Syafii Maarif, "Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia," dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (ed.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: LAPPENAS, 1983), hlm. 41.

yang sangat kental dengan peran politiknya. Secara historis keduanya pernah bekerjasama, tetapi tidak jarang juga berhadapan secara konfrontatif.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, di bawah kendali A.H. Nasution militer dikenal dekat dengan kelompok Islam. Disamping didorong oleh latar belakang keagamaan Nasution, kerjasama itu juga didorong oleh kesamaan kepentingan. Militer dan Islam bekerjasama menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kedekatan Islam dan militer tidak hanya terwujud dalam bentuk aliansi strategis-politis (kesamaan kepentingan), tetapi juga dalam bentuk praktik kelembagaan. Nasution yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata meletakkan ajaran Islam sebagai landasan moral dan etika bagi para anggota militer.[3] Untuk mengembangkan hal tersebut, Nasution membentuk imam militer (*the chaplain service*) yang bertugas mengembangkan ajaran agama di kalangan militer.[4]

Secara personal, kedekatan Islam dan militer bukanlah hal yang baru. Beberapa perwira militer lahir dari kalangan Muslim taat, termasuk Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan sosok yang lahir dan dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Kegigihan perjuangannya juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3]B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970,* dari judul aslinya, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Jakarta: Grafitipress, 1985), hlm. 90.

[4]Howard M. Federspiel, "The Military and Islam in Sukarno's Indonesia". *Pacific Affairs,* Vol. 46, No. 3, 1973, hlm. 411.

dimulai dari aktivitasnya di organisasi kepanduan Muhammadiyah, yaitu *Hisbul Wathan.*[5]

Selama tahun 1965-1966 militer dan umat Islam bersama kekuatan Islam yang lain bergandeng tangan dalam penumpasan G 30 S/PKI yang diikuti dengan tampilnya kekuatan politik Orde Baru menggantikan rezim politik Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin militer dengan penuh nafsu memobilisasi kekuatan umat Islam untuk menumpas PKI, bukan rahasia lagi beberapa perwira militer sebenarnya masih khawatir kalau kerja sama tersebut akan membuahkan hasil yang kurang mengenakkan pada masa mendatang. Dalam perkembangannya, bentuk kolaborasi kekuatan terutama yang ditunjukkan Nahdatul Ulama (NU) mencapai hasil yang cukup fantastis khususnya di daerah Jawa Timur.[6] Dukungan NU terhadap militer dalam hal ini Angkatan Darat, merupakan langkah yang luar biasa dalam kampanye anti-komunisme.

Dengan mulai berkuasanya pemerintah Orde Baru menyusul gagalnya kudeta PKI pada tahun 1965, banyak umat Islam yang menaruh harapan besar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5]Salim Said, *Genesisi of Power, General Sudirman and the Indonesia Military in Politics* 1945-1949 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 55.

[6]Andree Feillard, *Nu vis-a-vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm 72-73, A. Hasjmy, *Semangat Merdeka* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm, 107. Baca juga, Muhammad Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 102-103. Pemberantasan komunisme sejak saat itu telah menjadi target utama Angkatan Bersenjata, dan NU menyerukan kepada anggotanya untuk "membantu Angkatan Bersenjata Republik Indnesia (ABRI) memulihkan ketentraman". Muhammadiyah juga mendukung pengganyangan komunis melalui pernyataan sebuah fatwa pada tanggal 11 November 1965; yang mengumandangkan perang jihad melawan kaum komunis adalah wajib, tetapi dengan tambahan harus dilakukan tanpa "kekerasan yang mengerikan, fitnah, dan rasa dendam". Baca juga, A. Hasjmy, *Semangat Merdeka* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm, 107. Bahwa, ulama-ulama Aceh dengan tegas menyatakan bahwa ajaran komunisme adalah "kufur" hukumnya dan haram dianut oleh umat Islam. Barang siapa mati dalam perjuangan menentang PKI atas nama Allah adalah mati "syahid". Yang paling banyak bersuara adalah "eksponen" dari HMI, PII, NU, dan Muhammadiyah.

untuk tampil dalam percaturan politik nasional. Harapan itu terutama tampak jelas dikalangan bekas pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya yang selama Demokrasi Terpimpin merasa benar-benar disudutkan.[7]

Keharmonisan militer dengan kelompok Islam ternyata tidak berlangsung lama. Kerjasama yang berlangsung pada awal Orde Baru, dalam perkembangannya mulai mengalami keretakan dan kerenggangan. Bahkan, Islam menjadi kekuatan yang dipinggirkan dan selalu dicurigai oleh militer sebagai ancaman bagi stabilitas Negara. Ancaman ini menjadi keyakinan di kalangan militer sejak golongan umat Islam meminta status hukum bagi Piagam Jakarta dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1968.[8] Gagalnya pengajuan status hukum Piagam Jakarta ini nampaknya telah menghancurkan mitos mayoritas angka-angka umat Islam dalam masyarakat Indoensia.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, tak terbantahkan bahwa dalam sejarah Indonesia terdapat marginalisasi umat Islam. Apa saja yang dikerjakan kekuatan *islamofobia* untuk memojokkan ummat. Melalui politik resmi dalam sidang-sidang DPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (RUU Perkawinan 1973, masalah perjudian, masuknya aliran kepercayaan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 111. Menurutnya, karena Masyumi berjasa dalam membangun koalisi dengan militer dalam penumpasan PKI dan menjatuhkan pemerintahan Soekarno, mereka membayangkan kembalinya politik Islam dalam panggung diskursus politik nasional, mereka mengharap Orde Baru segera merehabilitasi Masyumi, dengan alasan untuk memperkuat peranannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945, pada desember 1966 pemerintah Orde Baru yang dimotori oleh kelompok militer menyatakan menolak permintaan tersebut. Lihat juga, Allan Samson, "Islam in Indonesia Politics" (*Asian Survey,* No. 12 Vol. VII, Desember 1968), hlm. 1005

[8]Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 118.

GBHN 1978), melalui rekayasa politik (umat diberi PR dengan masuknya tarekat tertentu dan keberadaannya menjadi ganjalan ummat, seperti Darul Hadis/LDII dalam Golongan karya (Golkar), Peraturan Pemerintah pada tahun 1982 tentang larangan Jilbab di sekolah, pembatasan dakwah, dan melalui politik keamanan (Komando Jihad/Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII)/Negara Islam Indonesia (NII), peristiwa Tanjung Priok 1984).[9]

Saat itu militer tidak menjadi abdi negara tetapi bertindak menjadi abdi kekuasaan Orde Baru. Militer tidak melindungi rakyat tetapi telah menjadikan dirinya sebagai *hulubalang* kekuasaan. Siapa yang melawan Soeharto dianggap merongrong negara dan resikonya harus berhadapan dengan militer. Restriksi militer yang begitu besar menjadi efektif bagi kekuasaan Orde Baru untuk mempertahankan hegemoninya. Militer dengan demikian menjadi tulang punggung kekuasaan Orde Baru yang sangat ampuh.

Ada beberapa sebab yang mengharuskan militer berhadapan secara diametral dengan Islam. *Pertama,* militer memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam atau kekuatan-kekuatan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. *Kedua,* perlawanan DI/TII antara tahun 1948-1963 telah memunculkan kesan negatif di mata militer.

Di samping itu juga terdapat beberapa faktor penyebab yang lebih dominan memicu gelombang kekerasan antara Islam dan militer. *Pertama,* ada perbedaan pandangan antara kelompok Islam dengan militer. Sebagian

---

[9]Kuntowijoyo,"Strategi Baru Politik Umat Uslam, dalam Tim KAHMI Jaya (ed.), *Indonesia di Simpang Jalan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 187-191.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kelompok Islam berusaha memunculkan kembali kegairahan politik Islam secara formal, legal, dan eksklusif, sementara militer berusaha menciptakan stabilitas politik nasional dengan cara menekan kegairahan politik masyarakat dan menghilangkan hasrat-hasrat yang bersifat primordial dan sektarian. *Kedua,* keberpihakan militer terhadap kebatinan (kejawen) yang justru ditentang oleh kalangan umat Islam.[10] *Ketiga,* tampilnya militer *abangan* dan non-Muslim di jajaran elit militer dan aliansi mereka dengan kelompok nasionalis.[11] Dua yang terakhir adalah konflik ideologis yang sudah berusia lama antara Islam terorganisir dan rezim Soeharto. Soeharto dan para jenderal yang ada di sekitarnya berasal dari lingkungan Hindu Jawa yang membuatnya lebih sebagai Muslim Nominal (*abangan*) dan bukan sebagai Muslim yang taat (*santri*).[12] Asumsi yang berkembang akhirnya adalah Soeharto dengan Orde Barunya telah mengikuti tesis-tesis Snouck Hurgronje dalam melayani kepentingan umat Islam, di mana Islam sebagai sistem ritual dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10]Ada kesengajaan dari kalangan militer untuk menumbuh suburkan paham kebatinan ini sebagai landasan moral mereka. Banyak kalangan militer, khususnya berasal dari Jawa, yang aktif dalam aliran kebatinan. Sikap ini dengan sendirinya memancing reaksi keras umat Islam. Walaupun dalam sejarahnya, ajaran Islam pernah menjadi pandangan bagi kebanyakan perwira, seperti yang di prakarsai oleh A.H. Nasution, tetapi gagasan-gagasan etika Islam yang universal itu belum berhasil dijadikan landasan bagi pengembangan etika secara institusional di kalangan mereka. Lihat Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 160-162.

[11]Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 95. Dalam buku ini dijelaskan, jajaran elit militer saat itu sangat dipengaruhi oleh budaya kejawen (Hindhu-Budha) dan menganggap jenderal-jenderal Muslim dari luar jawa sebagai kelompok pemecah belah persatuan yang tingkat bahayanya sama dengan PKI.

[12]Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI dan *The Asia Foundation*, 2001), hlm. 153. Lihat juga R. William Liddle, *Islam, Politik, dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 66-67.

kemasyarakatan, bukan sebagai entitas Islam politik.[13] Artinya, lebih memajukan ketaatan beragama personal dan menentang politisasi agama.[14]

Di sinilah mulai terlihat adanya jarak hubungan antara kelompok Islam dengan militer. Walaupun pada saat tertentu kelompok Islam mendapat perhatian dari kalangan militer, tetapi itu lebih pada pertimbangan keamanan dan adanya tuntutan yang sangat kuat dari kalangan umat Islam.

Kecurigaan militer terhadap Islam terlihat pada peristiwa Malari.[15] Militer waktu itu menuduh Islam (mantan aktivis Masyumi) sebagai kelompok yang berada di balik gerakan tersebut. Beberapa tokoh Masyumi dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), juga mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut ditahan.

Kalau dilihat secara global, sejak awal Orde Baru, terjadi pertarungan yang kuat antara militer dan Islam. Tampilnya kelompok *abangan* dan Kristen di jajaran elit militer telah ikut mempersempit gerak kelompok Islam.[16] Kelompok Islam yang bersama-sama mendorong tampilnya militer ke pentas politik Orde Baru menjadi tersingkirkan dan selalu dicurigai.[17] Salah satu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13]Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah*, hlm. 121.

[14]R. William Liddle, *Islam, Politik, dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 68.

[15]Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 355. Baca juga Heru Cahyono, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980, dari Pemilu Sampai Malari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 194.

[16]R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation" (*The Journal of Asian Studies,* Vol. 55, No 3, 1996). Dalam tulisan ini disebutkan bahwa rivalitas antara Islam dengan militer merupakan warisan sejarah sejak penjajahan Belanda.

[17]Seperti yang menimpa AM. Fatwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 1984, ketika berkhotbah dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj di mushalla Al-Chair, Pesing, Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat, Fatwa dituduh menyampaikan ucapan-ucapan yang bersifat merongrong kewibawaan pemerintah. Komando Rayon Militer di salah satu bagian kota Jakarta akhirnya menyeret dan memukuli Fatwa ketika ia sedang berkhotbah. Menurut pengamat militer Salim Said, bahwa yang diadili oleh rezim Orde Baru bukanlah tindakan Fatwa, yang diadili adalah pendiriannya, betapapun lembut pendirian itu disampaikan. Fatwa dituduh melakukan

ekspresi dari luka ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian umat Islam. Berbagai peristiwa awal 1980-an seperti komando Jihad (1979), pembajakan pesawat Woyla (1981), Tanjung Priok (1984), pengeboman Candi Borobudur, dan pengeboman Bank Central Asia (BCA) (1985), merupakan salah satu ekspresi dari kekecewaan kelompok Islam terhadap represifitas kelompok Militer.

Ketegangan antara kelompok Islam dan militer ini mulai mencair sejak awal tahun 1990-an. Kecurigaan militer terhadap kelompok Islam sebagai kelompok instabilitas mulai berkurang. Paling tidak mulai terlihat adanya dialog antara kelompok Islam dengan militer. Hal ini terlihat dari beberapa hal. *Pertama,* terselenggaranya Simposium Cendikiawan Muslim di Malang pada tanggal 7 Desenber 1990, sebuah acara yang diprakarsai oleh sekelompok mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Simposium tersebut akhirnya melahirkan sebuah organisasi bernama Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Presiden Soeharto memukul bedug sebagai tanda dibukanya Kongres Nasional I ICMI, sebuah tindakan yang menghancurkan stereotip paling lama politik Orde Baru, sebagai pembela setia *kejawen* dan pluralisme pancasila-nya.[18]

Kedua, meningkatnya pengaruh Islam di kalangan kelas menengah Islam (kelompok pembaru/aktivis Islam politik kedua). Hal ini telah mendorong beberapa pihak dalam pemerintah termasuk militer untuk melihat

---

tindakan subversif dan diajukan ke pengadilan melalui proses yang tidak adil. Lihat, AM. Fatwa, *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm, 12-13.

[18]Robert W. Hefner, *Islam,* hlm. 225.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan memahami gerakan Islam politik dalam kacamata baru.[19] Berbeda dengan aktivis politik Islam awal yang dicirikan oleh politik Islam yang bersifat formalistik-legalistik dan eksklusif, Islam yang ditampilkan oleh generasi pembaru pemikiran Islam politik ini adalah Islam dengan pendekatan politik yang lebih subtantif-integratif dan inklusif.[20] Inilah bentuk dari salah satu munculnya transformasi intelektual, yaitu gagasan dan praktik politik Islam yang dilandasi oleh ruh idealisme dan aktivisme para aktivis politik Islam sebelumnya.

Ketiga, menguatnya sikap keberagamaan di kalangan militer. Semarak ke-Islaman yang pada tahun 1960-an dan 1970-an masih terasa asing di kalangan militer, semarak keagamaan di kalangan militer ini mulai muncul sejak 1990-an.[21] Hal ini menjadi salah satu perekat hubungan antara Islam dan militer. Adanya kedekatan antara beberapa elit militer dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Kedekatan ini bisa dilihat, di antaranya adanya dukungan dan silaturrahmi beberapa elit dan petinggi militer yang semakin intens. Militer tidak segan menghadiri berbagai acara yang diselenggarakan oleh kelompok Islam, bahkan di antara mereka ada yang mengunjungi sejumlah pesantren yang selama ini mereka musuhi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perubahan ini—yang utama—tidak terlepas dari beberapa faktor, di antaranya adalah munculnya gagasan dan pemikiran baru tentang strategi dalam mengekspresikan Islam politik di kalangan kelas menengah Islam

---

[19]Robert W. Hefner, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 28.

[20]Bahtiar Effendy, *Islam*, hlm. 270-271.

[21]Salim Said, "Tanjung & Hartono", *Gatra*, 18 Februari 1995, hlm. 30.

(aktivis Islam politik) yang relatif moderat, sembari memanfaatkan fungsi-fungsi politik dalam birokrasi pemerintahan. Pemahaman yang integratif dan *akomodasionis* ini pada perkembanganya mampu—paling tidak—melemahkan intensitas kekerasan dan kecurigaan pemerintah atas gerakan Islam politik.

Pada tingkat negara, adanya perbaikan hubungan Islam dan militer adalah bagian dari upaya *political will* yang ditunjukkan pemerintah. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah menunjukkan sikap akomodatif dalam merespon kepentingan umat Islam, sehingga kebijakan ini merupakan langkah positif dalam perbaikannya antara Islam dan militer dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah dan memfokuskan penyelidikan atas fakta-fakta sejarah dalam penelitian maka perlu dirumuskan terlebih dahulu beberapa konsep yang berkaitan dengan topik kajian dalam skripsi ini. *Pertama,* Islam. Konsep Islam lebih ditekankan pada kelompok Islam yang berorientasi pada tegaknya ajaran Islam secara formal dan legal (formalistik-legalistik-eksklusif)[22] Mereka memandang bahwa Islam sebagai ajaran yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22]Ada dua istilah untuk menyebut kelompok Islam politik di Indonesia pada tahun-tahun ini. *Pertama*, istilah legalistik-formalistik-ekslusif. *Kedua,* subtantif-integratif-inklusif. Yang *pertama*, mengacu pada pandangan sebagian umat Islam yang menginginkan Islam sebagai ajaran Islam yang harus ditegakkan secara formal dan legal—sebagai institusi—negara. Dari segi perjuangannya kelompok ini memakai pendekatan *top down,* yaitu penegakan ajaran Islam secara konstitusional yang disahkan oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh masyarakat. Kelompok ini menganut paham revivalisme, yaitu paham yang menginginkan Islam kembali persis pada zaman Rosulullah, SAW. Sementara istilah yang *kedua,* mengacu pada mereka yang memandang Islam sebagai sekumpulan nilai-nilai universal (*rahmatan lilalamin*) yang harus disosialisasikan melalui

memenuhi segala aspek kebutuhan manusia (*kaffah*) yang mengatur seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam hal bernegara. Bagi mereka, Islam dan Negara, satu kesatuan seperti dua mata uang yang sulit dan tak dapat dipisahkan. Kelompok ini oleh militer dianggap telah mengancam stabilitas dan ideologi negara.

Kedua, militer. Militer[23] dalam bahasa Inggris "military" yakni "the solidiers; the army, the armed forces"[24] yang dalam bahasa Indonesia dapat

---

perilaku (budaya), seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah. Kelompok yang kedua berpandangan sebaliknya dari yang pertama, kelompok ini memakai pendekatan *buttom up* dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu mensosialisasikan ajaran Islam melalui pendekatan budaya (penguatan *civil society*). Kelompok ini juga berusaha mereformasi ajaran Islam secara kontekstual, sesuai dengan zaman dimana umat Islam hidup dan tinggal (pribumisasi Islam), termasuk dalam hal politik. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 271. Baca juga John L. Esposito, *Islam and Politics* (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1984).

[23]Di Indonesia batasan militer dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Militer dalam masa Orde Lama adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri dari Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Melalui UU No. 13/1961 Pasa 13, Keppres No. 225/1962, Keppres No. 290/1964 menetapkan Kepolisian Negara RI adalah ABRI. Dengan demikian, ABRI meliputi Angkatan darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepolisisan Negara RI. Lihat *Buku Peraturan Perundang-Undangan Pertahanan dan Keamanan RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dephankam, 1996), hlm. 88. Pada masa Orde Baru militer Indonesia masih menggunakan sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI terhitung sejak diberlakukannya Keppres No. 290 tahun 1964 dimana Angkatan Kepolisian RI ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata yang kedudukannya sama dan sederajat dengan ketiga angkatan lainnya dengan garis-garis komando dan hirarki yang utuh dan bulat. Lihat *Himpunan Penjelasan dan Perundang-Undangan Bidang Hankamneg dari Tahun 1961-1971,* Buku III, (Jakarta: Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Dephankam, 1989), hal. 142-144. Namun pada tanggal 27 Juni 1969 melalui Keppres No. 52 Tahun 1969 terjadi perubahan nama Angkatan Kepolisian RI (AKRI) menjadi Kepolisian RI (POLRI) namun tetap berada di bawah ABRI dan kedudukannya secara organisatoris tetap di bawah Dephankam/Pangab. Kemudian melalui Keppres No. 137/1967, Keppres No 80 Tahun 1969, Keppres No. 7/1974 ditetapkan bahwa ABRI terdiri dari 3 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan 1 (satu) POLRI, yang selanjutnya dikukuhkan melalui UU No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hankamneg RI yang salah satunya menyebutkan bahwa ABRI adalah TNI yang dipimpin oleh Panglima ABRI yang kedudukannya di bawah presiden selaku kepala negara. Lihat *Himpunan Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI* (Jakarta: Biro Sekretariat Jenderal Dephankam, 1996). Pada masa Pasca-Orde Baru (era reformasi), terhitung sejak 1 April 1999, yang disebut militer adalah bukan lagi ABRI melainkan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. POLRI secara organisatori terpisah dari TNI dan berdiri sendiri dengan kedudukan langsung dibawah presiden. Sedangkan TNI berada di bawah komandi Panglima TNI yang kedudukannya di bawah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Arief Yulianto, *Hubungan,* hlm. 27-28. ABRI adalah istilah generik yang digunakan militer Orde Baru. Seperti telah disebutkan,

diartikan prajurit atau tentara; Angkatan Darat; Angkatan Bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut dan atau marinir serta udara).[25]

Dalam studi hubungan sipil-militer, para peneliti dan pengamat militer sering berbeda pendapat mengenai siapa pihak militer itu. Amos Perlmutter membatasi konsep militer hanya ditekankan kepada semua perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, aspirasi dan orientasinya yang bersifat politik, tidak memandang kepangkatan apakah perwira tinggi, menengah atau pertama.[26] Sedangkan Cohan menyebutkan bahwa pihak militer berupa personel militer, lembaga militer atau hanya para perwira senior.[27]

Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprojo mendefinisikan militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara,[28] sedangkan bagus A. Hardito, membatasi pihak militer ditekankan pada para perwira profesional.[29]

---

dalam perkembangannya istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selanjutnya dalam penelitian ini, istilah ABRI, TNI, militer, dan tentara kadang-kadang digunakan sebagai istilah yang dianggap sama pengertiannya. lihat Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Tentara Mendamba Militer: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia* (Bandung: Mizan dan PPW-LIPI, 1999), hlm.9.

[24]Lihat AS Hornoby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford University Press, 1974), hlm. 536.

[25]Arif Yulianto, *Hubungan Sipil-militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

[26]Amos Perlmutter, *Militer dan Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

[27]Lihat, Elliot A. Cohen, "Civil-Millitary Relation the Contemporary World", sebagaimana dikutip oleh Arif Yulianto dari makalah Susilo Bambang Yudhoyono, *Pengaruh Internationa' dalam Hubungan Sipil-Militer,* makalah yang disajikan dalam seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Jurusan Ilmu Politik, Fisip Universitas Indonesia, Jakarta, 24-25 Mei 1999, Kampus UI Depok. Lihat Arief Yulianto, *Hubungan,* hlm. 29.

[28]*Ibid.*, hlm. 29.

[29]Bagus A. Hardito, "Faktor Militer dalam Transisi Demokrasi di Indonesia", dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (ed.), *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: CSIS, 1999), hlm. 144.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dari beberapa pengertian di atas—setelah mengamati sepak terjang militer dengan dwifungsinya selama Orde Baru, sama dengan mengamati pergulatan Angkatan Darat—bahwa kajian hubungan Islam dan militer dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan hanya pada AD. Karena AD merupakan kesatuan yang paling banyak memerankan dirinya dalam kehidupan negara. Konsep "Jalan Tengah" atau lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI sebagai dalih, pijakan, dan dasar atas *kesahihan* peran AD dalam konstelasi politik nasional. Tidak berlebihan apabila militer identik dengan AD, karena peran besar militer dimainkan oleh AD,[30] maka wilayah penelitian ini memfokuskan diri pada sepak terjang Angkatan Darat. Lebih sempit lagi, penelitian ini lebih ditekankan pada perilaku para elit militer.

Ketiga, "Hubungan" dalam bahasa Inggris "relation" yakni *the act of relating; what there is between on thing, person, idea, act and another or others.*[31] Dengan demikian "Hubungan" adalah aksi berhubungan apakah antara benda, gagasan, orang, lembaga dengan yang lainnya. Mengkaji hubungan antara Islam dan Militer sama halnya dengan mengkaji hubungan sipil dan militer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30]AD Indonesia berbeda dengan AD pada umunya yang telah merebut kekuasaan politik. AD benar-benar berkuasa pada masa Orde Baru. Pertumbuhan AD tersebut disertai dengan pembenaran secara ideologis atas kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan. Sesudah diberlakukannya keadaan darurat perang atas konsep "Jalan Tengah" yang dirumuskan oleh Jenderal Nasution pada pidato Dies Natalis Akademi Militer nasional pada bulan November 1958 di Magelang, yang menjelaskan para perwira Angkatan Darat aktif berperan serta dalam urusan pemerintah. Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 389-399. Lebih jauh lihat Salim Said, "Kepemimpinan Politik TNI/ABRI dalam Perspektif Sejarah", dalam Djoko Subroto (ed.), *Visi ABRI Menatap Masa Depan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Akademi Militer Magelang, 1997), hlm 163-175. Bandingkan dengan M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 583-584.

[31]Lihat AS Hornoby, *Oxford Advanced,* hlm. 712.

Dalam hubungan sipil-militer ada beberapa pola yang dapat diamati dari sistem pemerintahan suatu negara. *Pertama,* negara-negara demokratis biasanya menganut pola supermasi sipil. *Kedua,* negara-negara rezim pemerintahan otoriter, biasanya cenderung menggunakan pola supermasi militer.[32] Pola yang *Ketiga,* gabungan dari kedua pola di atas, yakni tidak ada supermasi sipil dan atau supermasi militer (pola campuran) dimana kedua belah pihak sepakat dalam kesetaraan dan kesejajaran untuk menjalankan pemerintahan.[33]

Hubungan sipil-militer di tiap-tiap negara berbeda-beda tergantung dari jenis pemerintahannya, demokratis atau otoritarian. Pada umumnya di negara demokratis, hubungan sipil-militer ditunjukkan melalui dua cara yang oleh Samuel P. Huntington disebutnya sebagai: 1) *subjective civilian control* (pengendalian sipil subyektif); 2) *objective civilian control* (pengendalian sipil obyektif).[34] Pengendalian sipil subyektif dilakukan dengan cara memperbesar kekuasaan sipil (*maximing civilian power*) dibandingkan dengan kekuasaan militer. Sedangkan pengendalian sipil obyektif dilakukan dengan cara sebaliknya yaitu cara *militarizing the military.* Untuk mencapai pengendalian sipil obyektif yaitu dengan cara memperbesar profesionalisme militer, kekuasaannya akan diminimalkan, namun tidak sama sekali melenyapkan kekuasaan kaum militer; namun tetap menyediakan kekuasaan dalam batas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32]Samuel P. Huntington, "Mereformasi Hubungan Sipil-Militer", dalam Larry Diamond dan Mare F. Platner (ed.), "*Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4-5.

[33]Arif Yulianto, *Hubungan Sipil,* hlm. 31-35.

[34]Samuel P. Huntington membagi rezim otoritarian dalam bentuk yang berfariasi yaitu; 1) rezim militer; 2) rezim satu partai; 3) diktator personal; 4) oligarki rasial. Lihat Samuael P. Huntington , *Mereformasi*, hlm. 12.

tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya.[35] Cara inilah yang paling mungkin menghasilkan hubungan sipil-militer yang sehat. Nampaknya, konsep yang terakhir ini lah (*objective civilian control*) yang menjadi kunci dan dasar fokus penelitian ini, yakni berusaha mencari titik temu hubungan secara sehat antara Islam politik dan militer.

Oleh karena itu, penelitian ini melihat dinamika (pasang-surut) hubungan antara Islam dan militer pada masa Orde Baru pada tahun 1966-1998. Untuk memperoleh diskripsi yang jelas serta pelacakan atas peristiwa dan penjabaran permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana corak hubungan gerakan Islam politik dan militer pada masa awal kebangkitan Orde Baru?
2. Bagaimana peran militer dalam sejarah politik Orde Baru dan faktor apa yang menimbulkan sikap antagonis secara massif antara gerakan Islam politik dan militer, serta munculnya kelompok pembaru di kalangan aktivis Islam politik sebagai sintesis atas kebijakan pemerintah?
3. Mengapa pada masa 10 tahun terakhir kekuasaan Orde Baru muncul akomodasi terhadap Islam politik, terjadi perubahan terhadap hubungan Islam dan militer (negara), ke arah hubungan yang harmonis dan faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35]*Ibid.*, hlm. 14-15. Lihat juga Nugroho Notosusanto, "Angkatan Besenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia", dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 3-33.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari kegelisahan bahwa terjadinya disharmonisasi antara Islam dan militer pada awal Orde Baru hingga penghujung akhir tahun 1980-an, selama kurun waktu 22 tahun kekuasaan Orde Baru itu depolitisasi dan tidak terakomodasinya kepentingan Islam politik dalam negara adalah satu sebab yang tidak terbantahkan. Hingga pada tahun 1990-an atmosfir baru politik di Indonesia mulai memberikan ruang dan tempat untuk menghirup sedikit ekspresi kebebasan berpolitik yang bermuara pada membaiknya hubungan antara Islam dan militer. Oleh karena itu, kajian ini berusaha menjelaskan akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya marjinalisasi terhadap gerakan dan peran politik umat Islam pada masa awal Orde Baru hingga masa pencerahan Islam politik pada awal tahun 1990-an. Tulisan ini juga mengkaji beberapa faktor yang mendasari adanya perubahan sikap politik pemerintah terutama sikap yang ditunjukkan oleh militer dan aktivis Islam politik. Secara singkat kajian ini difokuskan terhadap permasalah hubungan Islam dan militer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam konteks yang lebih ideal, tulisan ini diharapkan mampu menghadirkan wacana baru bagi umat Islam dalam kancah perpolitikan di Indonesia dalam perspektif sejarah baik dalam konteks relasi antara Islam dan militer maupun yang lain, tetapi secara luas kajian ini sebagai titik tolak bagi penciptaan sinergisitas dan harmonisasi hubungan Islam dan militer di Indonesia di masa mendatang.

Selain itu karya ini diharapkan bisa memberikan referensi baru tidak hanya dalam kelengkapan koleksi kepustakaan tetapi mampu secara utuh *menyuguhkan* kepastian dan kejernihan dalam setiap kebijakan yang meliputi; pikiran, ucapan, dan tindakan bagi generasi-generasi penerus di masa mendatang, bahwa semua itu memerlukan sikap *reformis* dan *akomodasionis* untuk bisa diterima oleh lingkungan di luar kelompok Islam politik.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan sejarah tentang hubungan Islam dan militer dalam sejarah politik Orde Baru di indonesia 1966-1998, ini menarik untuk dikaji. Begitu maraknya tulisan-tulisan, skripsi, tesis, maupun desertasi yang mengkaji tentang militer karya dari beberapa peneliti lokal maupun asing. Beberapa karya penelitian dalam bahasa asing pun sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun yang perlu dicatat bahwa, dari sekian banyak karya tentang militer di Indonesia masih sangat terbatas (untuk mengatakan tidak ada sama sekali) ketika dihadapkan dengan tulisan-tulisan yang secara khusus membicarakan relasi antara Islam dan militer. Namun demikian, beberapa buku kajian tentang militer yang berkaitan dalam masa studi ini adalah sangat penting untuk menjadi pertimbangan dan sekaligus rujukan

Beberapa buku yang patut menjadi tinjauan dalam penulisan ini diantaranya adalah; Buku karya M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Buku karya monumental Ricklefs ini telah mengalami beberapa revisi dan penambahan sejak edisi pertamanya tahun 1981, yakni 1993 dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terakhir 2001. Secara rinci dan jelas Ricklefs menguraikan perjalanan sejarah Republik Indonesia. Periodisasi yang digunakan dalam menggambarkan sejarah Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai sejarawan, Ricklefs menguraikan gelanggang militer pada masa Orde Baru dan bagaimana relasi Islam dan militer tidak luput dari perhatiannya. Perlu menjadi catatan, bahwa perjalanan politik Islam dan keterlibatan militer dan hubungan antara keduanya dalam studi skripsi ini juga menjadi isu menarik dalam kajian Ricklefs.

Selanjutnya, buku karya Abdoel Fattah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,* secara rinci buku ini mengulas sejarah keterlibatan militer dalam politik dan menjelaskan tentang perkembangan militer di Indonesia sejak masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga pasca Orde Baru (reformasi). Pengalamannya di bidang kemiliteran dan sebagai guru militer di Pusdiklat KKO sangat memungkinkan buku ini sebagai data penunjang untuk analisis dalam tulisan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Abdoel Fattah, keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan bersamaan dengan kemerosotan politik, karena harus dibayar dengan daya usaha rakyat dan partisipasi masyarakat. Kebijakan otoriter negara dan campur tangan militer yang begitu kuat dalam bidang politik mengakibatkan lemahnya partisipasi rakyat dalam politik. Kebijakan ini telah mendorong rakyat bangkit menuntut perubahan. Dalam buku ini, Abdoel Fattah belum begitu mendalam berbicara mengenai

bagaimana Islam sebagai kekuatan masyoritas dalam politik nasional berperan dalam proses-proses politik Orde Baru dan hubungannya antara Islam dan militer.

Buku berikutnya patut menjadi bahan pertimbangan dalam kajian ini yaitu, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia.* Buku karya Robert W. Hefner ini adalah hasil penelitiannya mengenai isu demokratisasi di Indonesi khusunya mengenai Islam politik. Buku mutakhir Hefner—mengenai gerakan-gerakan prodemokrasi termasuk di dalamnya gerakan-gerakan Islam politik—ini lebih memperhatikan aspek-aspek antropologis. Tidak biasanya seorang antropolog—seperti Hefner—mampu melakukan penelitian tentang isu yang begitu luas seperti Islam dan demokratisasi. Ambivalensi antara Islam dan militer mendapat perhatian khusus dalam kajian buku ini sejak masa kebangkitan Orde Baru sampai pada masa kejatuhannya.

Buku yang terdiri dari delapan bab ini menjelaskan tentang demokratisasi dan gerakan Islam politik sejak masa bangkitnya kekuasaan Orde Baru hingga pada masa kejatuhanya. Hefner melihat, kekuasaan Soeharto sangat didukung oleh kekuatan militer. Baginya, militer adalah alat yang mampu sewaktu-waktu dipergunakan untuk melawan musuh-musuhnya yang selalu memprotes kebijakan negara. Kekuatan Islam politik adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan Soeharto. Hefner berkesimpulan, bahwa kebijakan Soeharto merangkul Islam disebabkan melemahnya dukungan dalam tubuh militer—yang selama ini menjadi pendukung utamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya buku *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an.* Di dalam buku ini penulis secara nyata mengurai secara kronologis dan mengkaji tentang Islam dan militer. M. Rusli Karim, penulis buku ini mengkaji bagimana kebijakan politik penyingkiran Orde Baru mewarnai gerakan Islam politik dan militer. Menurutnya, kebijakan pembangunan Orde Baru telah berimplikasi terhadap kebijakan resmi peminggiran Islam politik sebagai target utama.

E. Pendekatan dan Landasan Teori

1. Skismatis (Perpecahan) dan Aliran

Sepanjang sejarah Orde Baru gerakan Islam politk terus mengalami konfrontasi dan sikap antagonis dari kekuatan-kekuatan Orde Baru terutama militer. Puncaknya pada tahun 1970-an sampai 1980-an, tekanan demi tekanan semakin mempersempit ruang gerak dari kekuatan Islam politik. Militer merasa perlu membersihkan—kalau tidak harus semuanya—kekuatan "ekstrim kanan" kelompok politik Islam. Pengalaman masa lalu pada masa perjuangan kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru telah menjadikan dua kekuatan ini dihadapkan pada kecurigaan yang tak tertandingi.

Untuk menjelaskan dan memecah persoalan itu, maka teori skismatik dan aliran—meski tidak langsung—dapat dipandang sebagai jawaban atas pertanyaan: mengapa konfrontasi politik dalam perebutan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kekuasaan seperti itu harus terjadi?. Tidak diragukan lagi, teori ini merupakan instrumen paling berpengaruh untuk menjelaskan politik Indonesia pada periode pasca kemerdekaan. Teori itu muncul dari tim peneliti *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) yang melaksanakan studi etnografis pada awal hingga pertengahan 1950-an di sebuah desa kecil di Jawa Timur, yang diberi nama samaran Mojokuto.[36] Meskipun demikian, lebih khusus lagi, teori ini telah diidentifikasikan dengan tulisan-tulisan Robert R. Jay dan Clifford Geertz.[37] Pertama, menekankan corak skismatik hubungan Islam dan Jawa-isme, yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki bidang politik, kebudayaan dan kehidupan sosial. Yang belakangan, Clifford Geertz, mengembangkan skisma sosial-keagamaan ke dalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik. Meskipun demikian, penting untuk dicatat, bahwa keduanya mencoba untuk melihat Indonesia dari mikrokosmos Mojokuto dalam sebuah periode dimana konflik-konflik antara partai amat menonjol.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Polarisasi kekuatan antara ortodoksi dan sinkretisme yang terus berlanjut inilah, yang mengakibatkan terus bertahannya corak pengelompokan sosio-kultural dan sikap politik masyarakat Jawa, yang

---

[36]Nama-nama lain dalam tim tersebut adalah: Alice Dewey, Donald Fagge, Rufus Hendon, Jane Hendon, Hildred Geertz, Edward Ryan, Anola Ryan, dan Anne Jay. Dihimpun dari Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* diterjemahkan dari judul aslinya, *Religion of Java* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989). Lihat Juga Karya Robert Jay, *Religion and Politics in Rural Center Java* (New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1963). Bandingkan dengan tulisan pengantar Hebert Fetih dalam, Herbert Feith dan Lance Castels (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988).

[37]Mengenai teori skismatik dan aliran ini Kuntowijoyo menyebutnya dengan :teori kebudayaan politik" atau "kelompok solidaritas budaya. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 143.

juga menginspirasikan Clifford Geertz untuk mengembangkan konsep aliran. Dalam tulisannya "The Javanese Village", di mana dia pertama kali memperkenalkan konsep aliran, Geertz memaparkan aliran:

> "Sebagai suatu partai politik yang dikelilingi oleh satuan organisasi-organisasi sosial sukarela yang formal maupun tidak formal berkaitan dengannya. ...[aliran] adalah pengelompokan organisasi secara nasional yang menganut arah dan posisi ideologis yang sama."[38]

Terlepas dari penekanannya pada partai politik sebagai unsur pokok dalam konsep ini, penting dicatat bahwa "suatu aliran lebih dari sekedar partai politik, jelas juga lebih dari sekedar ideologi. Ia adalah suatu pola integrasi sosial yang komprehensif," dan diintensifikasi kurang-lebih oleh posisi suatu kelompok kepada yang lain.

Selanjutnya Geertz menjelaskan, "Proses manuver politik yang digerakkan oleh sistem aliran ini segera membuat persekutuan orientasi abangan dan priyayi dalam satu kesatuan yang berhadapan dengan orientasi Santri". Proses persekutuan politik antara kedua varian ini, untuk satu hal, didorong oleh terlembagakannya politik massa dan hak politik universal yang mendekatkan kelompok priyayi dengan abangan.[39]

Dalam dunia mikrokosmis Mojokuto, seperti dipaparkan Geertz, menurut konsep aliran, kelompok santri cenderung mengarahkan orientasi politik mereka ke partai-partai politik Islam, misalnya Masyumi atau NU, dua partai Islam terbesar pada 1950-an. Pada sisi lainnya, kelompok

---

[38]Lihat Clifford Geertz, *Abangan,* hlm. 165. Tentang pengertian aliran ini Kuntowijoyo menyebutkan bahwa tiap partai politik senantiasa terkait dengan para pengikut dari suatu kebudayaan di tingkat bawah. Ia mencontohkan, elit birokrasi priyayi bergabung dalam PNI, kaum *abangan* dalam PKI dan kaum santri dalam Masyumi. Lihat *Ibid.,* hlm. 144.

[39]Clifford Geertz, *The Sosial History of an Indonesia Town* (Cambridge: MIT, 1956), hlm. 128. Lihat juga, Clifford Geertz, *Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: Grafitipers, 1986), hlm. 99-129.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

abangan dan priyayi lebih suka mengekspresikan kedekatan politisi mereka dengan partai "nasionalis" Partai Nasional Indonesia (PNI) atau komunis PKI. Terlepas dari klaim bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, empat partai politik Islam hanya memperoleh 43,5%.[40]

Berikutnya, perhatian utama studi Robert Jay adalah masalah skisme keagamaan yang menyebabkan skisme politik yang berkembang antara santri (Muslim yang taat atau Islamis) dan abangan (Muslim yang kurang taat atau Jawa-is) di pedesaaan Jawa Tengah. Upayanya menjelaskan asal-usul skisme keagamaan seperti itu, yang perluasannya kemudian merembet ke wilayah non-agama, dan sejauh mana sekisme keagamaan tersebut menyebabkan konfrontasi politik dalam masyarakat Jawa, Jay memulai dengan memaparkan corak proses Islamisasi di Indonesia secara umum, dan khususnya di Jawa. Menurutnya ada dua proses yang menyertai proses Islamisasi di Jawa. *Pertama,* proselitisasi di wilayah di mana pengaruh nilai-nilai keagamaan Hindu-Budha minimal—untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali—mempunyai kecenderungan untuk mengkonversi masyarakat Jawa menjadi kaum Muslim yang "ortodok" (santri).[41] Di wilayah-wilayah ini, sebagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40]Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 57. Herbert Feith, *The Indonesia Elections of 1955* (Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1951). R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992). Ikrar Nusa Bhakti, (ed.), *Tentara Mendamba Militer: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia* (Bandung: Mizan dan PPW-LIPI, 1999), hlm. 106.

[41]Termasuk wilayah-wilayah perkotaan di pesisir utara pulau Jawa: Ngampel (Surabaya), Bonang, Geresik, Tuban, Jepara, dan Cirebon.

pengamat lain juga menyebutkan, proses Islamisasi mengambil bentuk penetrasi secara damai.

Kedua, corak Islamisasi dalam bentuk yang agak berbeda. Di wilayah yang pengaruh peradaban Hindu-Budha kuat,[42] Proses perpindahan agama sebagian besar dicirikan oleh perebutan pengikut di antara kedua tradisi keagamaan besar itu. Dalam hal ini, Islam—yang dilengkapi dengan filsafat monoteistik yang eksklusif, yakni konsep *al-Tauhid* (keesaan Allah)—berhadapan dengan kepercayaan masyarakat Jawa yang kompleks, yang tidak mudah didamaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Akibatnya, yang berkembang dalam kenyataannya adalah semacam upaya-upaya keagamaan untuk saling menundukkan dan menetralisir satu sama lain. Dalam proses proselitsasi ini, watak penetrasi Islam mungkin memang telah menghapuskan unsur-unsur keagamaan yang lebih formal dari posisi tradisional, termasuk bentuk-bentuk peribadatan ritual yang pokok kepada Tuhan-Tuhan Hindu Jawa kuna. Meskipun demikian, keutuhan ideologis cara hidup Jawa tradisonal tetap berhasil dipertahankan. Yang terjadi kemudian adalah transformasi masyarakat ke dalam bungkus abangan atau Muslim "sinkretis".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Melalui bacaan skismatis itu, Jay mencoba menjelaskan perjalanan politik Islam dalam konteks sejarah politik Indonesia modern. Ia menyatakan, bahwa perkembangan gerakan-gerakan politik moderen ditandai oleh dua pengelompokan yang sudah umum dikenal. Baik secara

[42]Termasuk ke dalam wilayah-wilayah ini adalah kerajaan-kerajaan lokal sekeliling kerajaan Majapahit (misalnya Kediri, Malang) dan Mataram (Yogyakarta).

organisasional maupun ideologis, gerakan-gerakan tersebut sangat berpusat di sekitar masalah "ortodoksi" versus "sinkretisme." Pola konfrontasional berkembang pada puncak gerakan nasional di kepulauan nusantara ini. Seperti perpecahan di antara para pemimpin ortodok dan sinkretis dalam SI, organisasi nasional pertama yang berbasis massa, pada 1920-an dan 1930-an.[43]

Kategorisasi Jay mengenai masyarakat Jawa sedikit berbeda dengan kategorisasi Geertz. Jay hanya melihatnya dari perspektif dikotomi antara santri dan abangan. Namun demikian, Banyak peneliti Indonesia modern yang tidak setuju dengan cara ketiga varian yang dibuat Geertz. Varian abangan-santri secara luas dipandang sebagai "dikotomi yang sah yang didasarkan kepada perbedaan keagamaan". Tidak demikian halnya dengan varian priyayi. Varian ini banyak dipandang sebagai suatu status ketimbang sebuah kategori keagamaan. Karena itu, dalam kategori keagamaannya seorang priyayi dapat masuk ke dalam varian abangan atau santri.[44]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Trikotomis (Fundamentalis, Reformis dan Akomodasionis)

Jika beberapa paradigma teori di atas dirumuskan berdasarkan realitas-realitas politik di negeri ini, maka "pendekatan trikotomi" terutama dirumuskan berdasarkan pertanyaan: bagaimanakah para aktivis politik Islam memberi respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok penguasa?

---

[43]Lihat Kuntowijoryo, *Paradigma,* hlm. 151.

[44]Sepintas mengenai hal ini lihat M. Syafii'i Anwar, "Islam, Negara dan Formasi Sosial dalam Orde Baru," Ulumul Qur'an, Vol. III, No. 3, 1992.

Para pendukung pendekatan ini mengakui obsesi masyarakat politik Islam dengan gagasan negara Islam. Mereka juga menyadari antagonisme politik antara kelompok santri dan abangan. Terlepas dari itu, mereka tidak otomatis mengasumsikan bahwa semua aktivis politik Islam memperlihatkan intensitas yang sama sehubungan agenda negara Islam. Demikian juga, mereka tidak menerima pandangan bahwa varian politik santri dan abangan tidak punya ruang sama sekali untuk berkompromi. Dengan memusatkan perhatian kepada keragaman dan kompleksitas politik Islam, mereka menemukan tiga pendekatan politik—fundamentalis, reformis, dan akomodasionis—di dalam masyarakat politik Islam.

Posisi teoritis ini tampak menonjol dalam karya-karya Allan Samson[45] dan lainnya[46] yang melihat bahwa kekalahan partai-partai Islam disebabkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan ideologis internal. Dengan menganalisa perjalanan dua partai politik Islam "modern" terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni Masyumi dan Parmusi, dan—yang secara luas diklaim penerusnya—NU yang "tradisionalis," terutama cara mereka berreaksi terhadap watak hegemoni negara di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Samson berpendapat bahwa pandangan mereka mengenai politik, kekuasaan, dan ideologi tidaklah tunggal. Lebih dari itu, mereka juga tidak punya sudut pandang yang sama mengenai tindakan dan strategi politik yang secara umum diterima untuk merealisasikan cita-cita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[45]Lihat Allan Samson, "Islam and Politics in Indonesia." Disertasi doktor, University of California. Lihat juga tulisannya, "Religion Belief and Political Action in Indonesia Islamic Modernism," R. William Liddle (ed.), *Politica Participation in Modern Indonesia* (New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1973).

[46]B.J. Bolland, *Pergemulan.*

politik umat Islam. Ciri-ciri pokok para pendukung ketiga orientasi yang berbeda tersebut dipaparkan sebagai berikut:

> Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan *murni*, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Secara teoritis, kelompok reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik; tetapi dibanding kelompok fundamentalis, mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekularitas landasan yang sama-sama disepakati. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era modern. Kelompok akomodasionis memberi penghargaan yang tinggi terhadap kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang pada pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-kelompok sekular dan bekerja sama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati.[47]

Partai "tradisionalis" NU, sekalipun di antara para pemimpinnya terjadi perbedaan-perbedaan kepribadian yang tajam, secara umum di arahkan untuk mengembangkan diri dalam arus utama politik akomodasi.

Banyak pemimpin politiknya dipandang "seringkali dengan mudah bersikap akomodatif terhadap penguasa sekular untuk memperoleh posisi-posisi politik yang tidak terlalu menentukan dan kontrol atas birokrasi di Departemen Agama. Karena alasan ini, NU seringkali dituduh menjalankan politik oportunisme, terutama karena keinginannya yang besar untuk ikut dalam kabinet mana saja.[48]

Dengan mempertimbangkan paparan seperti itu, cukup aman untuk menyatakan bahwa perspektif Samson tampak menawarkan suatu penafsiran kuat landasan empiriknya mengenai wajah Islam politik di

---

[47]Allan Samson, "Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam," K. D. Jackson and Lucian W. Pye (ed.), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978), hlm. 197-226.

[48]Komentar-komentar mengenai NU kaitannya dengan oportunisme ini lihat Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 102-103. Ilustrasi selengkapnya lihat Andree Feillard, *Nu,* hlm. 71-111. Bandingkan dengan BJ. Boland, *Pergumulan,* hlm. 89-129.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia. Penggambaran yang luas diterima (masyarakat) mengenai politik Islam sebagai sebuah politik yang benar-benar memusuhi politik yang "netral agama" agak dikesampingkan dalam penelitian ini.

Sejalan dengan konsep tentang kekuasaan seperti disebutkan di atas, maka tujuan akhir konsep politik perjuangan umat Islam kelompok fundamentalis—tidak asing lagi—adalah pembentukan negara Islam. Bagi kelompok reformis, tujuan akhir adalah kemenangan partai-partai Islam secara formal dalam pemilihan umum. Dengan itu, kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat Islam—tidak serta-merta negara Islam—menjadi lebih terbuka. Kelompok akomodasionis dalam perjuangannya berbeda dengan kedua kelompok di atas, mereka lebih bersedia menurunkan tuntutan ideologis dan politisnya dan sejauh tidak memusuhi Islam kekuasaan seperti itu dapat dianggap sah. Sebagai jaminan atas konsep ini, kelompok akomodasionis lebih mengutamakan "mendapat" jaminan administratif dan politik.

Dari perspektif beberapa teori di atas, sesuai dengan studi dalam skripsi ini coba melihat pasang-surut/atau dinamika hubungan Islam dan militer; 1) sejauhmana "kecanggihan" tiga kekuatan Islam di atas (fundamentalis, reformis dan akomodasionis)—yang pernaha bekerjasama dengan militer pada awal kebangkitan Orde Baru—melakukan langkah-langkah perjuangan konsep politiknya melawan kekuatan besar kelompok abangan-nasionalis dalam militer yang berpusat dalam jaring-jaring kekuasaan Orde Baru? Mengingat, 2) aksi kekerasan militer dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PETA KEKUATAN MILITER DAN POLITIK ORDE BARU 1966-1998

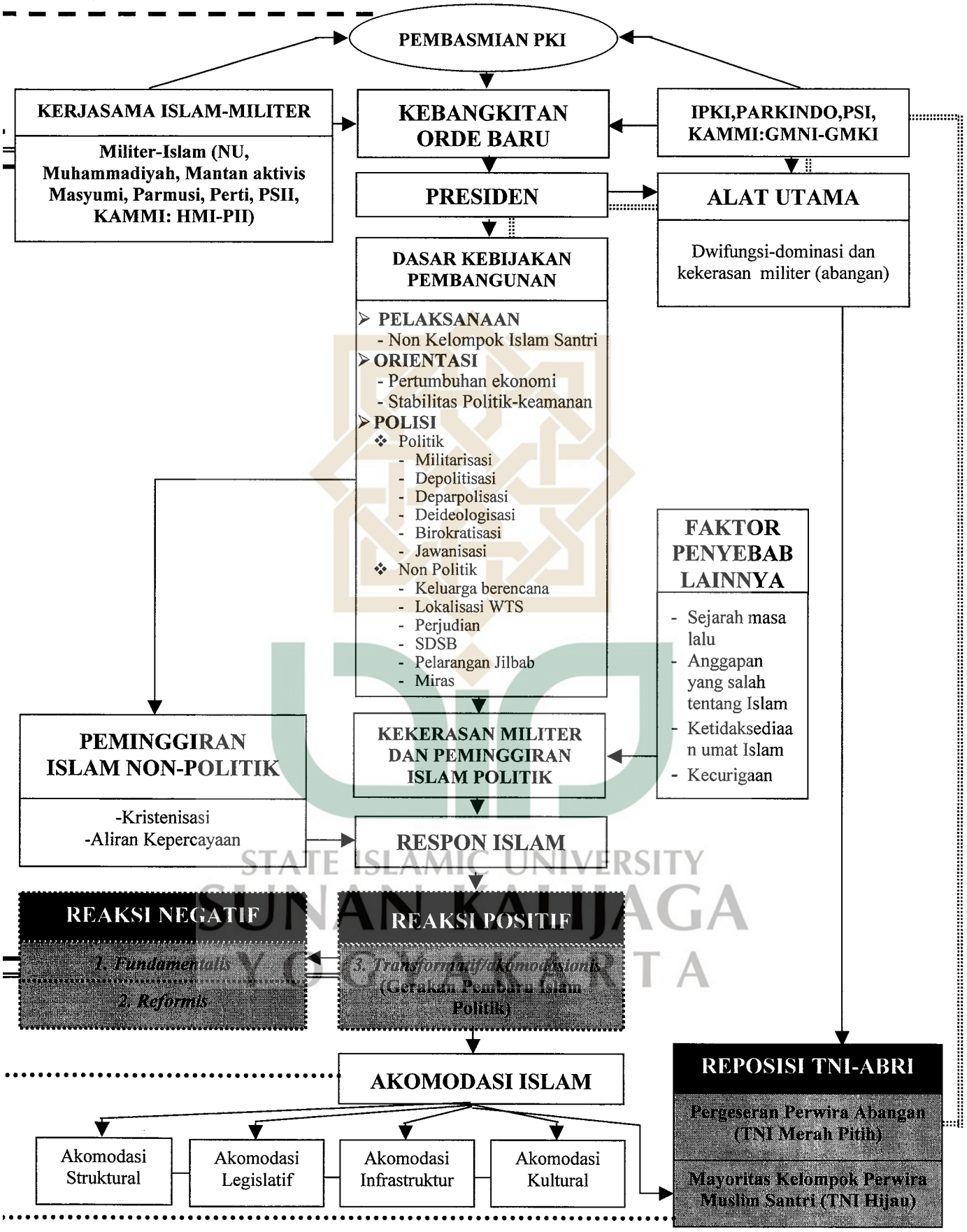

terangan:

- : Orde Baru Periode 1966-1975.
- : Orde Baru Periode 1976-1988.
- : Orde Baru Periode 1989-1998.
- : Arus politik berdasarkan aliran (Skismastis-Aliran): Abangan
- : Arus politik berdasarkan aliran (Skismastis-Aliran): Santri
- 6. ..... : Kelompok Islam politik berdasarkan konsep perjuangan (Trikotomis: Fundamentalis, Reformis, Akomodasionis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peminggiran Islam politik masa 22 tahun pertama kekuasaan Orde Baru 3) telah mendorong sekelompok aktivis yang tergabung dalam gerakan pembaru Islam politik mencari alternatif-alternatif baru dalam hal mengapresiasikan kepentingan politik Islam, hingga menjelang 10 tahun kekuasaan Orde Baru terjadi harmonisasi hubungan Islam dan militer?

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis mengenai rekaman dan peninggalan masa lampau.[49] Secara lebih singkat metode tersebut memiliki tahap *heuristik*, kritik, *interpretasi*, dan *historiografi*.

Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap berbagai bahan pustaka (*Library research*) dengan proses pengumpulan data (*heuristik*), baik berupa buku, makalah ilmiah, atau naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang membahas tentang peran militer dan Islam dalam kontelasi politik nasional, baik secara konseptual (*universal*) maupun dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49]Gilbert J Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1984), hlm, 33. Lihat, Louis Gottschalk, *Understanding History,* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32. Lihat juga, Makalah, T. Ibrahim Alfian, *Metode Penelitian Sejarah,* (Makalah pada seminar Kesejarahan, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Yogyakarta, 22 April 1994.), Hugiono dan P.K. Perwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 95.

kerangka empirik yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama maupun pada saat Orde Baru.

Di samping itu digunakan pula bahan-bahan lain, sebagai bahan sekunder, yang diperoleh melalui data lapangan (*field research*) dan wawancara (*interview*) dengan beberapa tokoh yang dianggap representatif dan berkompeten dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, seperti Salim Said dan Abdoel Fatah. Wawancara juga dilakukan dengan sejarawan Anhar Gonggong.

Di samping wawancara langsung, penjelasan mendalam dari narasumber (khususnya kalangan tokoh militer) yang dianggap memiliki peran penting dalam proses perubahan hubungan tersebut baik dari kalangan militer maupun tokoh Islam diperolah melalui wawancara yang dimuat dibeberapa media massa. Data ini sangat membantu, khususnya untuk memperdalam analisa penelitian.

Bahan-bahan tersebut diolah dan diuji keaslian (ontentitasnya) dan kesahihan (kredibelitasnya) melalui kritik eksteren dan interen sumber, dengan menguraikan dan mengecek silang data-data yang ada dari berbagai sumber tersebut dan akan diambil data-data yang paling bisa dipercaya. Setelah data dianalisis, maka disintesiskan menjadi fakta-fakta sejarah melalui pendekatan dan kerangka teori di atas.[50] Melalui jalan ini, diharapkan mampu menjelaskan asumsi yang menjadi landasan penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[50]Kuntowijoyo, *Pengantar,* hlm.98-105. Lihat juga, R. Wiliam Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafitipers, 1992), hlm. 82-95.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang berusaha disusun menjadi eksplanasi sejarah yang kronologis dan utuh dalam tiga bagian besar, semuanya adalah rangkaian yang tak terpisahkan dalam menelaah persoalan dalam skripsi ini. Bab pertama berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, pendekatan dan landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bagian kedua, terdiri dari tiga bab yaitu bab II, III, dan IV sebagai bagian dari isi penelitian. Bab II adalah tinjauan histori kondisi sosial politik antara Islam dan militer pada masa awal kebangkitan Orde Baru dan berbagai kebijakan politik yang besar pengaruhnya terhadap kondisi umat Islam di masa berikutnya. Hal ini membantu melihat perkembangan politik secara kronologis yang terjadi pada Orde Baru dalam periode berikutnya, yakni Bab III.

Di dalam Bab III berusaha menjelaskan langkah, strategi, jurus dan kebijakan politik pada Orde Baru, serta munculnya respon sejumlah kelompok pembaru Islam politik dari generasi baru/kelas menengah Islam yang besar pengaruhnya terhadap para perancang strategi politik Orde Baru untuk tidak memusuhi Islam dan mendorong terhadap kebangkitan Islam politik.

Berikutnya dalam Bab IV, adalah menyangkut pola hubungan dan strategi politik antara Islam dan militer. Harmonisasi antara keduanya yang menyangkut akomodasi dan pergeseran ke arah meningkatnya partisipasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam politik di lingkungan militer (dari militer abangan-nasionalis ke militer santri).

Penyajian hasil penelitian pada bagian ketiga yang merupakan kesimpulan atas seluruh pembahasan dalam skripsi ini dan diharapkan dapat dimunculkan suatu—tidak hanya wacana baru. Namun, benang merah dalam uraian pada bab-bab sebelumnya dari interaksi antara Islam dan militer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

TINJAUAN HISTORIS PERGUMULAN ISLAM DAN NEGARA PADA MASA AWAL ORDE BARU (1966-1975)

> Salah satu ciri utama dari pemerintahan yang didominasi oleh militer adalah keinginan untuk mendapatkan kestabilan politik. Tidak satupun dari mereka yang tidak meletakkan kestabilan politik sebagai program pokok. Bahkan, munculnya dominasi militer adalah justru untuk menciptakan situasi stabil itu. Namun ternyata bahwa penekanan yang berlebihan kepada stabilitas ini tampak tidak mengurangi situasi yang tak stabil. Sekurang-kurangnya begitulah hal itu tampak jika angka-angka kup dihitung di Dunia Ketiga [seperti di Indonesia].
>
> —Taufik Abdullah[1]

> Sampai kini kita banyak "terpaku" pada *state building,* yang berarti khas pembinaan kekuasaan dan kepemimpinan politik. Realitasnya, sistem politik, Pemilu, parpol/Golkar, tata tertib lembaga-lembaga, cara pelaksanaan dwifungsi TNI, pembangunan, pembinaan generasi muda, dan lain-lainnya, sedikit banyak "disubordinasikan" sebagai "sub-sistem." Di masa Orde Lama, formalnya sistem politik kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kini pun, formalnya juga demikian. Namun kenyataannya, mengandung penyimpangan dan kelainan-kelainan. Pimpinan Orde Baru mengutamakan stabilitas, demi kontinuitas pembangunan, yang sampai kini berurgensi ekonomi.
>
> —A.H. Nasution[2]

Misteri kejadian-kejadian yang berwal dari percobaan kup kalangan kiri 30 September 1965 dan berpuncak pada naiknya Soeharto dalam kekuasaan di pertengahan tahun 1966 yang disebut dengan "Orde Baru." Kemunculan Orde Baru adalah berkat perjuangan beberapa kelompok kekuatan, diantaranya adalah aliansi antara Islam dan militer dalam perjuangannya melawan pemberontakan PKI.

Bab ini, akan mengkaji periode "awal kebangkitan Orde Baru 1966-1975," sebuah periode di mana Orde Baru mulai membangun kekuatan

---

[1]Taufik Abdullah, "Sipil-Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Teksonami Pengantar," dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 38.

[2] A.H. Nasution, *Pembangunan Moral: Inti Pembangunan Nasional* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995). 27.

ekonomi, sosial dan politiknya yang bersandarkan pada prinsip; stabilitas dan keamanan. Selain itu bab ini lebih jauh melihat peta politik awal Orde Baru, perjuangan politik Islam, perseteruan antara Islam-militer, dan akar-akar yang menyebabkan munculnya dominasi militer yang berimplikasi negatif terhadap gerakan Islam politik.

A. Awal Kebangkitan Orde Baru

Dengan hancurnya PKI, berarti perimbangan kekuatan segera hancur. Tentara tidak hanya mampu mengubur PKI. Namun, secara signifikan mengurangi kekuasaan Soekarno. TNI AD menempatkan dirinya, sebagai satu-satunya kekuatan politik yang efektif pada masa selanjutnya. Jatuhnya Soekarno dan munculnya Soeharto pada tahun 1966, ditandai oleh munculnya kekuatan tunggal yaitu ABRI yang didominasi AD. Soeharto kemudian menjadi tokoh kunci bagi kemunculan kekuatan ini.

Dalam kurun waktu 1966-1975, pentas politik nasional mengundang beragam pendapat dari para pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto, karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Diantara para pengamat yang kurang memihak, terdapat para pengamat yang—disamping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi—juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintahan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munculnya upaya kudeta Gerakan 30 September /PKI 1965 (G30S/PKI), tidaklah mengejutkan bagi kebanyakan pengamat Indonesia.[3] Sepanjang tahun 1965 situasi politik terpolarisasi lebih dari pada sebelumnya, ketegangan di Ibu Kota mencapai puncaknya pada awal 1965, ketika rumor yang berkembang saat itu menyebut soal penggulingan presiden.

Kekhawatiran AD meningkat ketika awal 1965, Presiden Soekarno, PKI, dan Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani, yang cenderung kiri mulai berbicara tentang perlunya membentuk "angkatan kelima"[4] dalam masyarakat. Dukungan presiden Soekarno tentang usulan ini, merupakan ancaman jangka panjang terhadap keunggulan AD di bidang kemiliteran yang merupakan dasar kekuatan politik tentara.[5] Hal ini jelas menunjukkan upaya terang-terangan Soekarno dan PKI untuk melancarkan revolusi sosial selangkah lebih maju lagi, dengan memobilisasi massa dalam kondisi siap angkat senjata. Semua partai menyadari, kalau rencana tersebut berhasil, memonopoli militer terhadap AD akan berakhir. Selain itu, kekuatan milisi ini juga akan memberi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3]Karena pada tahun-tahun sebelumnya 1964-1965, juga terjadi kekerasan agraria yang ekstensif dan perselisihan ideologi sangat keras. Organisasi-organisasi yang dipimpin PKI mengambil alih perkebunan-perkebunan Inggris dan perusahaan-perusahaan lain sebagai bagian kampanye mereka untuk menentang Malaysia dan kampanye aksi sepihak PKI dalam suatu wilayah yang luas. Di daerah-daerah basis PKI, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aksi-aksi penting lainnya juga dilakukan, di Jawa Barat, Bali dan Sumatera Utara. Sasaran yang dituju adalah para tuan tanah yang memiliki tanah berlebihan, yang biasanya punya hubungan dengan Partai Nasionalis Indonesia atau NU. Dorongan juga diberikan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan negara yang dikelola oleh anggota-anggota tentara. Dalam melakukan aksi ini tidak jarang PKI menggunakan cara kekerasan. Lihat, Harold Crouch, *Militer,* hlm.64-71, dan Rex Mortimer, *Class, Social Cleavage and Indonesia Communism,* Indonesia, No. 8. Oktober 1968, hlm. 18.

[4]Tidak pernah terungkap rincian tentang maksud tujuan dibentuknya "angkatan kelima" ini. Namun, Hefner menjelaskan, bahwa upaya pembentukan "angkatan kelima" ini adalah untuk membentuk milisi-milisi revolusioner yang terdiri dari para buruh dan petani yang dilatih oleh wakil-wakil TNI, namun secara operasional independen dari mereka. Lihat, Robert W. Hefner, *Civil Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI dan The *Asia Foundation*), hlm. 116.

[5]Harold Crouch, *Militer,* hlm. 98.

peluang PKI mempunyai angkatan bersenjata sendiri, setelah lepas dari tangannya sejak peristiwa Madiun 1948.

Setelah rumor beredar selama beberapa minggu, ketegangan akhirnya mencapai klimaksnya pada malam 30 September 1965. Pada tengah malam, sejumlah tentara berhaluan kiri dipimpin perwira muda menculik enam orang perwira tinggi dan seorang letnan dari rumah mereka di pusat kota Jakarta. Tiga di antara mereka ditembak mati di rumah mereka, karena melawan para penculik. Sementara yang lainnya dibawa ke markas AU Halim, Jakarta Timur, di hadapan para kader PKI dan para perwira militer dieksekusi dan mayat mereka (termasuk tiga jenderal yang dibunuh sebelumnya) dibuang ke sumur Lubang Buaya.[6]

Selama bulan Oktober 1965, runtuhnya Demokrasi Terpimpin dimulai. Pada 2 Oktober, Soeharto mengakui perintah dari Soekarno untuk mengambil sendiri komando tentara, tetapi dengan syarat bahwa Soeharto lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan.[7] Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada tanggal 1 November dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6]Keenam Perwira tinggi TNI-AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu adalah: Menteri Panglima Angkatan Darat (Men-Pangad) Letnan Ahmad Yani, Deputi II Men-Pangad Mayor Jenderal Suprapto, Deputi Khusus Men-Pangad Mayor Jenderal Harjono, Asisten I Men-Pangad Kepala Inteljen TNI-AD Mayor Jenderal S. Parman, Inspektur Kehakiman TNI-AD Brigadir Jenderal Sutojo Siswomihardjo, Asisten IV Men-Pangad Brigadir Jenderal Pandjaitan. Disamping itu, Kapten Pierre Tendean, ajudan KASAB Nasution, mendapat nasib yang sama oleh kekhilafan para petugas "pasukan pasopati". Sedang Brigadir Jenderal Sukendro yang menurut daftar dari Untung adalah anggota dari "Dewan Jenderal" pada waktu itu tidak ada di Jakarta. Dalam peristiwa ini, rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, perwira paling senior juga disergap, tetapi ia berhasil meloloskan diri melalui tembok rumah kediamannya kemudian masuk ke pekarangan duta besar Irak yang tinggal bersebelahan. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani yang masih dalam usia lima tahun tertembak dalam serangan itu.

[7]Awalnya, pada tanggal 2 Oktober, Soeharto menemui Presiden di Bogor. Pertemuan itu adalah pertemuan yang pertama antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto, setelah berlalunya krisis yang menegangkan pada 1 dan 2 Oktober. Tentang detil peristiwa ini lihat, Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gdjah Mada, 1973), hlm. 172.

pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Pada tanggal 3 Oktober, mayat para Jenderal yang dibunuh ditemukan di Halim, dan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober menjadi pemakaman umum besar-besaran bagi mereka.[8] Tentara mulai secara terang-terangan menyalahkan PKI yang melakukan usaha kudeta tersebut, yang kini disebut Gerakan September Tigapuluh (Gestapu),[9].

Para pemuda anti komunis kini menguasai jalan-jalan, membakar markas besar PKI di Jakarta pada 8 Oktober. Pada akhir bulan Oktober, para mahasiswa anti-PKI membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)[10] dengan dukungan dan perlindungan tentara.[11] KAMI berintikan kelompok pemuda Islam, Katolik, dan mantan PSI. Front kesatuan pelajar yang sama disebut Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI), dan front alumni universitas, KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dibentuk

---

[8]Ketidakhadiran Presiden Soekarno dalam upacara pemakaman keenam perwira tinggi di Taman Makam Pahlawan Kalibata telah membangkitkan kebencian lebih hebat pada kelompok anti-Komunis terhadap presiden, dan semakin besar simpati mereka kepada AD. *Ibid.,* hlm. 174.

[9]Singkatan Gestapu ini dengan jelas mengacu kepada Gestapo, dimaksudkan sebagai sindiran pada Gestapo pada masa rezim otoriter Nazi Jerman. M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 565.

[10]Front ini terdiri dari organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai Islam, PSI, Partai Katolik, dan IPKI. Jumlah terbesar mahasiswa yang tergabung dalam KAMI berasal dari HMI, sementara organisasi-organisasi yang berada di bawah pengaruh aktivis PSI menduduki posisi pimpinan dalam jumlah yang melampaui proporsi. KAMI dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965, dibawah naungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Mayjen Sjarif Thajeb, orang Aceh dan bekas perwira Siliwangi yang sangat anti-Komunis. Awal tujuan dibentuknya KAMI adalah untuk mengimbangi organisasi Mahasiswa Indonesia yang telah dipengaruhi Komunis. Lihat, Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI,* terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 396. Lihat juga, Yahya Muhaimin, *Perkembangan,* hlm. 179.

[11]Prof. Guy Pauker melihat, banyak sarjana dan penulis yang tidak bisa memastikan dengan yakin tentang esensi "*relationship*" atau kerjasama antara AD dengan KAMI terutama sejak bulan Januari 1966. Yang pasti AD mendukung dan memberi bantuan kepada aksi-aksi KAMI, bahkan secara tidak langsung terjun dalam demonstrasi kesatuan aksi mahasiswa itu. Lihat, *Ibid.,* hlm. 181.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada awal tahun 1966. Kedua front yang terakhir ini berintikan simpatisan Masyumi-PSI.

Pada bulan Oktober 1965, pembunuhan dimulai. Kekerasan terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan PKI terjadi di seluruh daerah, tetapi pembunuhan masal yang terburuk terjadi di Jawa dan Bali. Konflik di Jawa Timur antara PKI dan NU yang telah dimuali 1963 berubah menjadi pembunuhan masal secara menyeluruh yang dimuali dari minggu kedua bulan Oktober 1965. Pada pertengahan bulan Oktober, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah.

Pada 4 Oktober 1965, NU meminta supaya PKI dan semua organisasi massanya dibubarkan.[12] Demikian juga Muhammadiyah dalam pertemuan di Jakarta pada 9-11 November 1965, mengumumkan bahwa pembasmian G30S/PKI sama dengan perang sabilillah.[13] Kelompok Islam lainnya mendukung pandangan ini.[14] Apapun yang dimaksudkan oleh para pemimpin Islam dengan perang suci, pengumuman ini tampaknya untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap para komunis sebagai tugas agama dan tiket masuk surga bagi setiap Muslim yang kehilangan nyawanya dalam kekerasan itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12]Menariknya, pernyataan itu disiapkan oleh aktivis-aktivis muda NU dengan restu Subchan dan baru sehari kemudian ditandatangani oleh kalangan pemimpin senior NU, keesokan harinya pada hari pemakaman para Jenderal. Di bawah sebatang pohon kamboja, Kiai Masykur dan Kiai Dahlan tampak tergesa-gesa membubuhkan tandatangan pada pernyataan tersebut. Lihat, Andree Feillard, *Nu Vis-avis Negara: Pencarian Isi, bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 81.

[13]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 566.

[14]Semua Organisasi Islam bergandeng tangan dalam menumpas PKI. Tidak ada yang terkecuali, termasuk HMI dan PII. Lihat, Muhammad Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kebijakan Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia 1970-an dan 1980-an* (Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm.103.

Masyarakat Indonesia yang mencurigai fanatisme laten Islam merasa kecurigaan mereka kini terbuktikan.

Sejak bulan Oktober, November dan Desember, aksi demonstrasi terus berlangsung. Presiden Soekarno semakin keras mempertahankan pendiriannya bahkan dengan tegas dia menolak untuk melarang PKI: "kaum komunis tetap harus dipertahankan dan diikutsertakan dalam kehidupan politik, dan demonstrasi anti PKI harus ditumpas."[15] Dengan pernyataanya itu, Soekarno hampir tak mendapat dukungan dari angkatan bersenjata bagi kebijaksanaannya untuk melindungi PKI. Kalangan sipil juga makin bersikap anti komunis. Ada banyak kekuatan—terutama disponsori oleh AD—yang menentang kebijakan "keras kepala" presiden untuk terus menolak membubarkan PKI.[16]

Ricklefs melihat, kesetiaan politik periode 1950-an dan 1960-an telah semakin bersesuaian dengan kesetiaan aliran Jawa, begitu juga banyak pembunuhan terjadi menurut perbedaan aliran[17] Tingkat pembantaian yang besar berakhir pada akhir Desember 1965, meski peristiwa-peristiwa pembunuhan yang terpencar di beberapa tempat masih tetap berlanjut hingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15]Yahya Muhaimin, *Perkembangan,* hlm. 180. Upaya Soekarno mendukung PKI karena kurangnya kekuatan pendukung yang terorganisir yang dimiliki. Dalam kalkulasi politik ini sangat penting khususnya bagi kelangsungan masa depan politik pribadi Soekarno. Soekarno selalu menghadapai bahaya atas ketergantungannya kepada tentara, daripada sebaliknya. Makanya ia terpaksa selalu mengimbangi kekuatan kelompok-kelompok lain. Jadi ini lah yang mendorong Soekarno sering mencari dukungan dari jajaran parpol-parpol, khususnya PNI, NU dan PKI. Yang terpenting dari hubungan Soekarno-AD ini ialah bahwa Soekarno selalu berusaha untuk memberikan kedudukan kepada PKI, yang sama derajatnya dengan PNU dan NU. Lihat, Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 37-45.

[16]Sundhaussen melihat ada berbagai kekuatan beberapa kelompok baik didalam militer maupun kalangan sipil dalam melawan Soekarno selengkapnya lihat Lihat, Sundhaussen, *Politik,* hlm. 390-393.

[17]M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 566.

pertengahan 1966, dengan meninggalkan korban kematian yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Sebagian besar ahli memperkirakan setidaknya setengah juta orang tewas, tetapi tak ada seorang pun yang benar-benar tahu, karena tak seorang pun menghitungnya.

Eksekusi-eksekusi juga sempat terulang di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1968 dan 1969.[18] Waktu itu, sebagian besar kader-kader inti PKI telah dihabisi, dan sekitar 500 ribu orang dibunuh. Jumlah pembunuhan itu jauh lebih besar dari jumlah korban di pihak Indonesia ketika merebut kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949.[19] Sebelum terjadinya kudeta, PKI merupakan partai terbesar di Indonesia.

Tentang pembantaian tersebut, sejarawan Robert Cribb menyebutkan, bahwa skala pembunuhan itu sangat "tidak pada tempatnya". Maksudnya, besarnya angka pembunuhan tersebut tidak memadai bila dibandingkan dengan skala moderat dari perubahan politik yang dihasilkannya. Perlu dicatat, bahwa naiknya Orde Baru dalam kekuasaan ditandai dengan

---

[18]Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 124. Pandangan umum masyarakat antara 250.000-500.000 jiwa telah mati sia-sia di seluruh Indonesia. Lihat, Harold Crouch, *Militer,* hlm. 171. Bandingkan dengan laporan *Komisi Pencari Fakta* yang dibentuk oleh Presiden di ketuai oleh Dr. Soemarno Sastroatmodjo (10 Januari 1966) menyebutkan jumlah korban tewas sejumlah 78.500 orang dan 106.000 orang ditahan. Sedangkan, Sudomo Pangkop kamtib (1976) menyebutkan jumlah korban antara 45.000-50.000 (Majalah *Tempo,* 10 Juli 1976). Hal yang berbeda diungkapkan harian *Kami,* 27 Juli 1967, menurunkan laporan mengenai jumlah orang yang ditahan diseluruh Indonesia, menurut Jaksa Agung sebanyak 200.000 orang. Selain itu terdapat ribuan orang yang dibuang ke Pulau Buru, yang kesemuanya tanpa proses pengadilan. Menurut Kemal Idris, pemerintah kesulitan mengadakan pengadilan, karena jumlahnya terlalu banyak. Balum lagi terdapat sebagian masyarakat yang harus menanggung "dosa" warisan dari keluarganya. Namun, yang mengejutkan hasil wawancara Tri Chandra Aprianto dengan salah seorang anggota komisi pencari fakta pada tanggal 18 Juli 2002, menyatakan bahwa komisi terpaksa menyusutkan jumlah korban menjadi hanya 10% karena takut kalau Bung Karno marah. Lihat. "Kekerasan dan Politik Ingatan," dalam Budi Susanto, S.J. (ed.), *Politik Postkolonialitas di Indonesia* (Yogyakarta: 2003), hlm. 23. Mengenai ulasan dan jumlah korban PKI secara lengkap lihat Daniel Dhakidae, *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam negara Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 208-219.

[19]*Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

banyaknya perubahan yang berkesinambungan, terutama dalam soal pengaruh militer dan dominasi birokrasi.[20]

Pada bulan Februari 1966, Soekarno melangkah dengan dramatis dan amat berani, tetapi justru merupakan "blunder" terbesar yang diperbuatnya, sebuah langkah terakhirnya untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin. Pada 21 Februari, dia merombak kabinetnya. Jenderal Nasution—yang begitu dihargai AD dan KAMI—di berhentikan sebagai menteri pertahanan dan menghapus staf kepala angkatan bersenjata, namun Nasution menolak pemecatannya. Omar Dhani dan Subandrio—dua orang yang diincar tentara—dipertahankan sebagai menteri. Soekarno juga memasukkan beberapa orang pro-PKI dan anti KAMI menjadi menteri baru, diantaranya menunjuk Letkol Imam Syafei sebagai Menteri Negara Urusan Keamanan.[21]

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMI melakukan pemboikotan terhadap pelantikan menteri baru "Kabinet Dwikora yang Disempurnakan" itu. Seluruh jalan utama di Jakarta dilumpuhkan sejak pagi, sehingga para menteri baru yang akan dilantik harus diangkut helikopter. Pada hari itu dalam suatu bentrok antara demonstran KAMI dengan pasukan khusus presiden "Cakrabirawa" di sekitar istana. Seorang mahasiswa senior Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arief Rahman Hakim dan Zaenal Sakse[22] tertembak mati dan puluhan lainnya luka-luka. Dua hari kemudian, Presiden

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20]Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 125.

[21]Konon Imam Syafei ini memiliki "kelompok gangster," bahkan bos para preman Jakarta. Lihat Yahya Muhaimin, *Perkembangan,* hlm. 184. Ketika menyandang jabatan barunya—Menteri Urusan Keamanan—ini, ia segera mengorganisir preman-preman anti-KAMI. M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 567.

[22]Wimanjaya K. Liotohe, *10 Dosa,* hlm. 4.

Soekarno menyatakan KAMI sebagai organisasi terlarang, dan memerintahkan "Cakrabirawa" dan pasukan militer lain pro-Soekarno untuk menekan menyerang Universitas Indonesia yang selama ini dijadikan "Markas Besar" KAMI. Namun Jenderal Soeharto segera mengirim pasukan Kostrad guna melindungi Universitas Indonesia.

Tentara mendorong mahasiswa untuk berdemonstrasi menuntut pelarangan PKI, membentuk kabinet baru dan reformasi ekonomi. Ekonomi berjalan tak menentu, indeks biaya hidup pada bulan Desember 1965-Januari 1966 meningkat 55%. Pada 5 Maret, Soeharto mengajukan kepada Soekarno daftar menteri yang harus diberhentikan, yang kemudian ditolak oleh Soekarno.[23] KAMI memulai aksi-aksinya dengan melancarkan tiga tuntutan pokok kepada pemerintah mengenai "tidak efisiensinya jalannya pemerintah" dan "kehidupan rakyat yang dikungkungi naiknya harga". Tiga tuntutan itu terkenal dengan "Tri Tuntutan Rakyat" (Tritura) yang menuntut; 1) pembubaran Partai Komunis Indonesia, 2) pembentukan kabinet baru, 3) penurunan harga. Namun, hingga menjelang tahun 1966, aksi-aksi demonstrasi itu tidak memperoleh kemajuan yang berarti dan belum bisa menjangkau secara efektif pada "*political elities*".[24]

Pada 11 Maret 1966, permainan manuver halus antara Soekarno dan Soeharto—yang menghasilkan kekerasan berdarah di ibu kota—berakhir dengan meyakinkan untuk kemenangan Soeharto. Soekarno mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran

[23]M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 268.
[24]Yahya Muhaimin, *Perkembangan,* hlm. 180.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memadati jalan-jalan. Soekarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal tengah mengepung Istana.[25] Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Setelah Amir Machmud melaporkan kejadian itu kepada Soeharto, kemudian malam itu Soeharto memerintahkan tiga jendral[26] yang bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Soekarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi presiden atas nama revolusi.[27] Dengan mengambil kata-kata kiasan semar, dewa-badut yang paling tangguh dalam wayang Jawa, dokumen ini disebut Supersemar (Surat Perintah sebelas Maret).[28] Soeharto, dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya pada tanggal 12 Maret, melarang PKI dan semua organisasi massa pendukungnya. Soekarno marah, tapi tak mampu berbuat apa-apa.

---

[25]Dalam wawancaranya dengan Kemal Idris pada tanggal 9 Desember 1970, Crouch menjelaskan, bahwa Pasukan-pasukan ini sebenarnya adalah pasukan RPKAD yang terdiri dari tiga kompi pasukan tanpa menggunakan tanda pengenal dan tanpa baret merah yang terkenal itu. Mereka diperintahkan menduduki istana oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhie. Lihat, Harold Crouch, *Militer,* hlm. 210.

[26]Tiga Jenderal itu terdiri dari Amir Machmud, Mayor Jenderal Mohammad Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Mayor Jenderal Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi). Lihat, *Ibid.,* hlm. 209.

[27]Diantara isi "Supersemar" itu antara lain; "memutuskan dan memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima AD, untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan". Lihat, *Himpunan-Himpunan Ketetapan MPRS,* cetakan II (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1969, hlm. 207-208.

[28]Dalam wawancaranya dengan *Kompas* 15 Maret 1971 Amir Machmud menjelaskan, Surat Perintah 11 Maret dirumuskan setelah ketiga jenderal itu berbicara dengan presiden dan memahami keinginan-keinginannya. Surat tersebut dirancang oleh ketiga jenderal itu, dengan bantuan Brigadir Jenderal Sabur. Soekarno kemudian menunjukkannya kepada Subandrio, Chaerul Saleh dan Leimena. Menurut Amir, Subandrio membubuhkan perubahan-perubahan kecil dalam rumusan, kemudian presiden menandatanganinya. Beberapa penulis menyangsikan keterangan Amir Machmud. Lihat *Ibid.*, hlm. 211.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada tanggal 25 Juli, Jenderal Soeharto membentuk kabinet baru sesuai dengan keputusan Ketetapan MPRS, dengan nama "Kabinet Ampera."[29] Kabinet tersebut beranggotakan 24 orang menteri yang berada dibawah lima orang menteri-utama anggota Presidium Kabinet yang diketuai oleh Jenderal Soeharto sebagai Perdana Menteri. Kelima anggota Presidium itu adalah: Jenderal Soeharto (Ketua Presidium), Adam Malik (Menteri Utama Bidang Keamanan dan Pertahanan), Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Menteri Utama Bidang Politik), K.H. Idham Chalid (Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan), Sanusi Harjadinata (Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat). Kedua Menteri Utama yang terakhir masing-masing adalah wakil dari NU dan PNI yang dipertautkan sebagai simbol "Orde Lama" dan yang di masa lampau merupakan pendukung Soekarno, sedang ketiga Menteri Utama yang pertama merupakan wakil dari unsur dan pimpinan "Orde Baru".[30] Kalau melihat dari personalia anggota kabinet, dan juga melihat formasi Presidium Kabinet, sebagaimana Pauker menyebutkan, kabinet tersebut merupakan hasil kompromi antara "Orde Lama" dengan Orde Baru.[31]

Bagi Crouch, kondisi seperti ini sama seperti ketika presiden dihadapkan situasi tanpa pilihan dalam hal pembubaran PKI, sekarang ia hanya memiliki alternatif kecil yaitu menerima penangkapan para menterinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29]"Ampera" adalah akronim dari "Amanat Penderitaan Rakyat", suatu istilah atau slogan yang dicetuskan Soekarno untuk menghantam kaum kapitalis imperialis, dan sekarang dijadikan sebagai slogan oleh kelompok anti Soekarno untuk menyindir dan sekaligus menghantam Soekarno.

[30]Setelah Kabinet Ampera dibentuk, maka masa sebelum Juli 1966, kemudian terkenal dalam kehidupan politik dengan istilah "Orde Lama" dengan simbol Soekarno, sedangkan setelah Juli 1965, disebut dengan "Orde Baru" dengan tokoh sentral Soeharto.

[31]Lihat, Guy J. Pauker, *Indonesia in 1966: The Year of Transition* (California: The RAND Corporation, 1967), hlm.22.

serta tuntutan untuk merombak kabinetnya. Tampak jelas, bahwa presiden Soekarno kalah dalam konfrontasinya dengan Soeharto mengenai soal ini. Tetapi, Soeharto tetap mempertahankan tuntutan-tuntutannya dalam suasana yang se-moderat mungkin.

B. Islam dan Politik Awal Orde Baru

Dengan mulai berkuasanya pemerintahan Orde Baru menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965, dan setelah sekian lama terpinggirkan dari panggung kehidupan politik dan ekonomi nasional, banyak pemimpin politik Islam yang menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru untuk naik ke panggung kekuasaan. Bagi sebagian mereka, pemerintahan yang baru ini tampak akan menawarkan satu kemungkinan "orde yang baru," yang bakal mengembalikan Islam ke posisi yang sah dalam kehidupan publik.

Harapan itu terutama tampak jelas di kalangan bekas pemimpin Masyumi[32] dan pengikut-pengikutnya yang selama periode Demokrasi Terpimpin merasa benar-benar disudutkan. Karena merasa menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan koalisi.[33] Mereka membayangkan kembalinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32]Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) merupakan reingkarnasi dari MIAI—Majelis Islam 'Ala Indonesia yang didirikan pada 1937—adalah bentukan Jepang pada 1 Desember 1943. Organisasi ini sesungguhnya merupakan wadah politik untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan Islam dari berbagai aliran ke dalam suatu organisasi. Masyumi juga merupakan pelembagaan dari upaya konvergensi yang cenderung berorientasi politik dan bersifat nonsektarian. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 198. Selain itu Masyumi bertujuan "memperkuat kesatuan seluruh organisasi Islam" dan "membantu da'i Nippon untuk kepentingan Asia Timur Raya." Lihat B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970,* diterjemahkan dari, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), hlm. 13.

[33]Seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan mahasiswa dan pelajar, organisasi sosial-keagamaan dan sebagainya yang telah berhasil menghancurkan PKI dan menjatuhkan pemerintahan Soekarno.

Islam dalam panggung diskursus politik nasional. Langkah pemerintah Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjara oleh Soekarno seperti Mohammad Natsir,[34] hal ini makin memperbesar harapan mereka bahwa rehabilitasi Masyumi akan berlangsung tidak lama lagi. Melihat perkembangan ini, pada bulan Agustus 1966, 16 organisasi Islam yang barnaung di bawah payung kaum modernis membentuk sebuah badan panitia yang diberi nama Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM), didirikan untuk merealisasikan harapan itu.[35]

Namun demikian, sejak awal sudah muncul tanda-tanda yang menunjukkan sikap embivalensi sebagai penguasa Orde Baru terhadap organisasi politik umat Islam—dan juga terhadap organisasi kaum sipil secara keseluruhan. Dari pada menekan kegiatan politik Islam dan mensekularisasi politik (seperti yang dianjurkan sejumlah kaum elit) pemerintah lebih memilih langkah politik yang sifatnya menggabungkan antar kontrol yang keras terhadap Islam politik dan dukungan penuh terhadap Islam spiritual. Para perancang strategi rezim Orde Baru berupaya membentuk agama sebagai landasan moralitas publik, sebagai tameng untuk menghadapai liberalisme Barat dan juga sebagai penangkal terhadap komunisme.[36]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[34]Termasuk Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmoro, dan Hamka.

[35]Penjelasan lebih lengkap lihat, Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Denokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996). Lihat juga, Dalier Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 349-357.

[36]Dengan berkeyakinan seperti itu, rezim Orde Baru bukan hanya toleran dengan bentuk agama yang didepolitisasi, tetapi juga mendorong penetrasinya ke segala sudut kehidupan masyarakat. Lihat, Robert W. Hefner, *Cicil,* hlm. 114. Menurut Liddle, hal ini sebagai kebijaksanaan politik dua-jurusan terhadap politik Islam yang mengingatkan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang lama, yakni memajukan ketaatan beragama personal dan

Kecurigaan di atas menjadi jelas ketika pemerintah Orde Baru tidak bermaksud merehabilitasi Masyumi. Antara lain disebutkan, dalam upaya memperkuat perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945, pada Desember 1966, kelompok militer menyatakan bahwa mereka

> Akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan dari aliran apa saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan melalui pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [sebuah gerakan Islam fanatik—yang paling kuat pada 1950–an dan memperoleh basis dukungannya di Jawa Barat—yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata] dan Masyumi—Partai Sosial Indonesia ...[37]

Pada awal 1967, Soeharto dengan tegas membenarkan perintah Soekarno membubarkan partai Masyumi, "yang tidak pernah secara resmi mengutuk perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya" yang mendukung pemberontakan PRRI-Permesta.[38] Faktor-faktor hukum, politik dan psikologis inilah yang melandasi Soeharto dan TNI supaya tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi.[39]

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, beberapa kalangan berpendapat bahwa kemungkinan Masyumi untuk direhabilitasi kembali sama sekali sudah tertutup. Kalangan militer masih amat curiga terhadap Islam politik. Dalam hal ini, beberapa kali kontak senjata antara mereka dengan unsur-unsur politik Islam pada masa lalu sangat memainkan peran. Seperti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

menentang politisasi agama. Ketaatan beragama untuk Muslim dan juga untuk para penganut empat agama lainnya yang diakui resmi. Lihat R. William Liddle, *Islam Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 68-69. Tentang politik Belanda terhadap Islam, lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under the Japanese Occupation, 1942-1945* (Den Haag: V. van Hoeva, 1984).

[37]Allan Samson, *Islam in Indonesia Politics*, Asian Survey, No. 12, Vol. VII, Desember 1968, hlm. 1005.

[38]Lihat pidato Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1960 di Jakarta, dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Vol. II, 1963), hlm, 410-411.

[39]Harold Crouch, *Militer*, hlm. 292.

dicatat oleh Harold Crouch, hal ini terutama amat terasa di kalangan "perwira-perwira yang pernah terlibat dalam pertempuran bersenjata melawan Darul Islam dan pemberontakan-pemberontakan regional lain yang dilakukan oleh umat Islam". Demikian pula, mereka yang ikut serta dalam upaya pemerintah pusat untuk menumpas PPRI-Permesta benar-benar merasa tidak senang dengan 'pengkhianatan' Masyumi yang bersimpati, atau sedikitnya tidak menyalahkan, pemberontakan yang mengorbankan 2.500 nyawa tentara itu.[40]

Tanggapan-tanggapan tidak terduga di atas membuat bekas para pemimpin dan aktivis Masyumi sadar bahwa rehabilitasi partai mereka hampir sepenuhnya mustahil. Melihat sikap tegas para pemimpin militer mengenai masalah ini, banyak kalangan berkesimpulan bahwa representasi politik para pemimpin Masyumi di masa Orde Baru hanya dapat terjamin jika mereka bersedia mendefinisikan kembali agenda politik mereka dalam kerangka-kerangka yang lebih dapat diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini, pembentukan sebuah partai politik baru (dengan harapan bahwa partai ini dapat mereproduksi corak dan semangat Masyumi), tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Untuk alasan itu, pada pertengahan 1967, dibentuk Panitia Tujuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah Orde Baru mengenai kemungkinan didirikannya partai baru. Wadah politik baru ini dimaksudkan untuk "menyatukan seluruh kekuatan dan organisasi Islam yang ada dan yang tidak tergabung dalam sebuah partai".[41]

---

[40]*Ibid.*, hlm. 291

[41]Bahriat Effendy, *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 113. Lihat juga, Allan Samson, *Indonesia,* hlm. 1005-1007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengenai rencana ini, pemerintah Orde Baru tampaknya tidak mau menghalang-halangi keinginan para bekas pemimpin Masyumi. Terlepas dari penolakan tegas mereka terhadap upaya rehabilitasi masyumi, ada beberapa kekhawatiran di kalangan pemimpin Orde Baru dengan representasi konstituen politik Islam di masa depan. Kekhawatiran itu meliputi: *Pertama,* para pemimpin Masyumi yang sering dogmatis dan mudah terhasut dengan masa pendukungnya di luar Jawa memiliki potensi yang cukup besar untuk menghimpun perlawanan terhadap pemerintah. Dengan bertambahnya jarak antara Islam dan pemerintah, unsur-unsur pro-Masyumi sering menjadi pimpinan dalam demosntrasi-demonstrasi kekerasan menentang minoritas Cina, tempat-tempat perjudian, sekolah-sekolah dan gereja-gereja Kristen.[42] *Kedua,* mereka merasa terdesak oleh suatu keadaan pemerintahan yang—menurut mereka—telah menghianati prinsip-prinsip Islam di negara yang mayoritas penduduknya menyebut diri Muslim, maka pemerintah merasa perlu berpikir ulang bahwa para pemimpin organisasi-organisasi beraliran Masyumi merupakan ancaman terhadap tujuan stabilitas politik dari pemerintah.[43] *Ketiga,* ketiadaan mekanisme politik untuk mengartikulasikan dan mengangregasikan kepentingan-kepentingan konstituen politik Islam di atas akan menumbuhkan rasa frustasi yang lebih dalam, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka ke arah ekstrimisme politik yang lebih membahayakan.[44]

---

[42]Harold Crouch, *Militer,* hlm. 192.
[43]*Ibid.*, hlm. 192.
[44]*Ibid.*, hlm. 113-114.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terdorong oleh alasan inilah maka pemerintah Orde Baru menyepakati maksud mereka untuk mendirikan organisasi politik baru. Setelah melalui serangkaian perjuangan yang berat, izin untuk mendirikan partai politik baru pun akhirnya diberikan oleh pimpinan AD kepada bekas konstituen Masyumi, tetapi pada saat yang sama bertindak mencegahnya untuk tidak jatuh ke tangan bekas-bekas pimpinan Masyumi.

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru ingin terus mengontrol aktivitas politik bekas anggota Masyumi, terutama para pemimpinnya. Karena itu, organisasi politik yang hendak didirikan, baru akan diakui jika bekas pemimpin Masyumi yang senior tidak menduduki posisi kepemimpinan di dalamnya. Demikianlah, pada 20 Februari 1968, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, keduanya aktivis Muhammadiyah.[45]

Para bekas aktivis Masyumi tidak senang dengan cara Parmusi didirikan dan prasyarat-prasyarat yang menyertainya. Mereka tidak puas dengan "tidak adanya pemimpin sejati" di partai itu, terutama sekali "pemimpin dengan karisma pribadi yang besar". Karena alasan itu, disusunlah rencana untuk membawa masuk beberapa bekas tokoh senior Masyumi dalam kepemimpinan partai. Untuk itu, bukanlah suatu kebetulan jika Mohammad

[45]Keduanya masing-masing menduduki jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Komisi yang dibentuk menyadari bahwa pemerintah tidak menerima bekas pemimpin-pemimpin Masyumi seperti Mohammad Natsir, Sjarifuddin Prawira Negara dan Prawoto, tetapi tidak jelas bagi mereka bagaimana sikap pemerintah terhadap tokoh-tokoh Masyumi yang kurang senior dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemberontakan PRRI-Permesta. Sebelumnya, beberapa usul telah ditoleh oleh penasihat-penasihat militer Soeharto selama bagian kedua tahun 1967. Usul selanjutnya ditolak pada bulan Februari 1968, tetapi beberapa waktu kemudian diadakan negoisasi yang menghasilkan pengakuan pemerintah atas partai yang dinamakan Partai Muslimin Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Roem, bekas Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, dan pemimpin elite Masyumi, terpilih sebagai Ketua Umum Parmusi dalam kongres pertama partai itu di Malang, November 1968.[46]

Yang membuat mereka kecewa, ternyata susunan kepemimpinan baru ini tidak direstui oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi, daripada mengambil risiko dibubarkan, partai mengikuti kehendak itu dan akhirnya menerima struktur kepemimpinan sebelum kongres. Meskipun demikian, pengaruh para bekas pemimpin senior Masyumi dalam partai itu sebenarnya masih kuat. Para pemimpin Parmusi yang lebih muda tetap menghormati mereka, seperti digambarkan Harold Crouch:

> Terutama setelah disahkannya undang-undang pemilihan umum di penghujung 1969, mereka makin sering mendatangi mantan tokoh-tokoh Masyumi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah, untuk memperoleh dukungan bagi Parmusi. Sebuah Panitia Pemilihan Umum dibentuk di bawah pimpinan Roem, bekas tokoh-tokoh Masyumi ditunjuk untuk menduduki posisi kepemimpinan partai di daerah-daerah, dan berbagai persiapan dilakukan untuk memasukkan para pemimpin Masyumi senior dalam daftar kandidat partai untuk pemilihan umum. Pada saat yang sama, para juru bicara Parmusi di daerah-daerah makin sering berbicara dengan nada kritis terhadap pemerintah.[47]

Dilaporkan bahwa, karena alasan-alasan di atas (pengaruh bekas tokoh-tokoh Masyumi senior yang makin besar dan sikap Parmusi yang semakin kritis terhadap pemerintah), John (Jaelani) Naro, salah seorang ketua partai, "yang dianggap mempunyai hubungan dekat dengan Ali Moertopo", melakukan kudeta atas kepemimpinan partai itu pada 1970. Lebih dari yang lainnya, pergolakan internal ini memudahkan pemerintah ikut campur tangan ke dalam kepemimpinan partai. Dan hal itu menyebabkan digantikannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[46]Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 114. Penjelasan lebih luas dan rinci tentang pendirian Partai Parmusi, dapat lihat Kenneth E. Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell Universituy, 1970).

[47]Harold Crouch, *Militer,* hlm.293.

Djarnawi Hadikusumo dengan M.S. Mintaredja, salah seorang anggota kabinet Presiden Soeharto dengan latar belakang Islam yang kuat.[48]

Didirikannya Parmusi tampaknya tidak menunjukkan adanya perubahan apa pun dalam hal hubungan antara para pemimpin dan aktivis Islam politik dengan para elite pemerintah Orde Baru. Situasi yang melingkupi terbentuknya partai ini menunjukkan bahwa, berkenaan dengan artikulasi ideologis dan politis kelompok Islam, pemerintah Orde Baru setidak-tidaknya sama khawatirnya dengan para pendahulunya. Hal ini makin jelas ketika pemerintah Orde Baru menolak (1) tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang MPRS tahun 1968, dan (2) dilangsungkannya Kongres umat Islam Indonesia pada tahun yang sama.[49]

Implikasi-implikasi dari berbagai perkembangan awal ini amat jauh. Pertama, harapan kelompok Islam untuk memainkan peran lebih besar di bawah pemerintahan Orde Baru segera menyusut. Yang lebih serius, perkembangan itu menumbuhkan sikap saling curiga dan memusuhi yang jauh lebih dalam antara para pemimpin serta aktivis Islam politik dan elite pemerintah Orde Baru. Dalam hal ini, cukuplah jika dikatakan bahwa, sementara pihak yang pertama memandang pihak yang kedua perlahan-lahan bergerak ke arah sekularisasi dan bersimpati kepada kepentingan-kepentingan kelompok Kristen, pihak yang kedua memandang dukungan pihak yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[48]Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 115, Allan Samson, *Islam,* hlm. 1012-1013. Harold Crouch, *Militer,* hlm.295.

[49]Harold Crouch, *Militer,* hlm.296, Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 183-190, R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 2-14, B.J. Bolland, *Pergumulan,* 89-129, Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1975),* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981).

pertama terhadap Pancasila hanya bersifat taktis dan sekedar untuk bermanis muka. Permainan yang di tunjukkan Orde Baru seperti penolakan Mohamad Roem sebagai ketua Parmusi sebenarnya adalah Suharto tetap menolak memberikan Islam kembali mencuat sebagai kekuatan politik yang menentukan.[50]

Dengan hasil Pemilu 1971, kekuatan Islam politik makin merosot. Ini sebagian disebabkan, karena lewat langkah yang benar-benar sudah ditata. Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan "kondisi-kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi partai-partai politik". Dalam Pemilu di atas, pemerintah menggunakan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai mesin pemilihannya. Organisasi yang pada awalnya dibentuk sebagai koalisi berbagai kekuatan masyarakat, untuk mengimbangi pengaruh PKI dalam pemerintahan itu disegarkan kembali dan diperluas hingga menjadi kekuatan politik yang amat besar.

Obsesi meraih kemenangan mutlak di seluruh wilayah Indonesia telah mengakibatkan pemerintah Orde Baru menggunakan langkah-langkah koersif dan kooptatif untuk mempengaruhi hasil Pemilu. Angkatan bersenjata dan birokrasi menjadi tulang punggung Golkar. Melalui keputusannya yang tidak populer, Amir Machmud, yang kala itu Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen 12/1969), "yang dimaksudkan untuk 'memurnikan' wakil-wakil Golkar di badan legislatif tingkat provinsi dan lokal." Peraturan itu menyebutkan bahwa "seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional

[50]Wawancara dengan Anhar Gonggong, Rabo, 22 Maret 2006 di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan di tingkat provinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung ke dalam partai-partai politik [PNI, NU, Parmusi, PSII, Perti, dan lain sebagainya]". Peraturan pemerintah di atas dikeluarkan untuk menciptakan monoloyalitas.

Dengan semua langkah ini, karena dibatasi masalah-masalah yang boleh diangkat dalam kampanye. Sentimen Islam yang dapat mengundang kontroversi seputar Pancasila sebagai ideologi negara [NU, Parmusi, PSII, Perti] sebagai tema kampanye). Prosedur pemilihan kandidat serta penelitian khusus atas mereka oleh pemerintah, akhirnya Golkar berhasil memperoleh kemenangan mutlak dalam Pemilu dengan mengantongi 62,80% suara. Karena relatif tidak terkena intervensi luar, NU berhasil mengantongi 18,67% suara—sedikit lebih baik dari perolehan suara mereka dalam pemilihan umum 1955 (18,4%). Namun Parmusi, yang seringkali dipandang sebagai penerus Masyumi, benar-benar terpuruk dengan hanya mengantongi 5,36% suara (pada 1955, Masyumi memperoleh 20,9% suara). Dua partai Islam lain yang lebih kecil (PSII dan Perti) juga kehilangan dukungan. Pada pemilihan umum 1955, keduanya memperoleh 2,9% dan 1,3% suara, sedang pada pemilu 1971 hanya memperoleh 2,39 % dan 0,70%.[51]

Berbagai perkembangan setelah Pemilu 1971, hanya memperbesar rasa putus asa masyarakat politik Islam. Kekalahan dalam pemilihan umum tidak hanya tercermin dalam merosotnya wakil-wakil Islam di parlemen. Tetapi hal

[51]R. William Liddle, *Pemilu,* hlm. 10. Lihat juga, Herbert Feith, *The Indonesia Elections Of 1955* (Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1951), Masashi Nishihara, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971* (Ithaca: Monograph Series, Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1972).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu juga tampak dalam komposisi kabinet baru, keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam tertentu benar-benar mulai dibatasi. Salah satu kasus yang paling jelas menunjukan hal itu adalah mulai memudarnya dominasi NU dalam Departemen Agama. Dalam komposisi kabinet baru, departemen yang sudah sejak lama menjadi basis politik dan birokrasi NU ini dipercayakan kepemimpinannya kepada A. Mukti Ali, seorang Muslim modernis[52] dan guru besar IAIN Yogyakarta yang tidak berafiliasi kepada partai politik mana pun.

Akhirnya, konstruk lama partai-partai Islam, khususnya dalam kerangka wadah politik (yakni partai Islam), memudar ketika pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian pada Januari 1973.[53] Dengan pengecualian Golkar, pemerintah mengharuskan kesembilan partai yang ada bergabung ke dalam dua partai politik baru. Dalam kerangka ini, keempat partai Islam bergabung ke dalam PPP. Lima yang lainnya, yang pada dasarnya terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen, digabung ke dalam PDI. Karena terdapatnya ikatan Islam sebagai agama bersama para pemimpin dan aktivisnya, PPP relatif lebih kohesif dibanding PDI. Meskipun demikian, PPP berkali-kali mengalami perpecahan internal (yang menunjukkan tidak berlangsungnya fusi yang menyeluruh), yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja politisnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[52]Sebutan Muslim modernis ini diperuntukkan kepada meraka yang memiliki pandangan dan mendukung adanya politik representasi yang berasal dari ICMI, Muhammadiyah/IMM, HMI/KAHMI. Lihat Ulil Absar Abdalla, "Umat Islam dan Politik Representasi," *Ulumul Qur'an,* Vol. VI, No. 2, 1995. hlm. 16-18.

[53]Ide restrukturisasi atau fusi partai ini awalnya usul dari beberapa militer menyampaikan keberatannya atas kompromi yang dilakukan Soeharto terhadap partai politik yang ada. Pada tahun 1967, Mayjen H.R. Dharsono, panglima Siliwangi, yang didukung oleh Pangkostrad, Mayjen Kemal Idris menginginkan dibubarkannya semua partai politik warisan Orde Lama dan diganti oleh dua partai politik yang sama sekali baru. Menegnai hal ini secara lengkap lihat Harold Crouch, *Militer,* hlm. 183.

Terlepas dari proses restrukturisasi politik yang terus dilakukan Orde Baru menyusul pemilihan umum 1971, proses itu diperkuat dengan penerapan konsep "massa mengambang" di mana aktivitas-aktivitas partai di tingkat desa dan kecamatan hampir sepenuhnya dihapuskan), ditambah dengan dilaksanakannya sistem politik yang pada dasarnya tidak kompetitif oleh pemerintah, PPP berhasil memperoleh lebih banyak suara dalam pemilihan umum 1977 (29,3%, dibandingkan dengan 27,1% pada 1971). Tetapi perpecahan yang terus berlangsung di dalam tubuh partai tersebut, terutama semasa kepemimpinan John Naro (selain strategi pemerintah untuk secara intensif menarik banyak tokoh dan intelektual Muslim),[54] memperlemah kekuatan PPP dalam pemilihan umum. Demikianlah, dalam pemilihan umum 1982 dan 1987, PPP hanya memperoleh masing-masing 27,2% dan 16,0% suara.[55]

C. Ambivalensi Islam dan Militer

Tahun 1965 adalah tahun yang memperburuk Indonesia ke titik terendah krisis ekonomi, sosial, dan politik. Seperti telah dijelaskan, Situasi krisis semakin tidak menentu setelah upaya kudeta oleh G30S/PKI. Ketegangan di ibu kota mencapai puncaknya pada awal 1965 ketika rumor yang berkembang saat itu menyebut soal rencana penggulingan presiden. PKI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[54]Lebih jauh lihat Umaidi Raidi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (Jakarta: Integrita Press, 1984) dan Syaifudin Zuhri (ed.), *PPP, NU, dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam* (Jakarta: Integrita Press, 1984).

[55]R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), 60-90. Lihat juga, "Pondok Berpaling,"*Tempo,* 21 Februari 1987, hlm. 20-28, "Pasang Surut Hubungan Islam-Beringin," *Tempo,* 21 September 1991, hlm. 22-23.

mengambil sikap hati-hati terhadap kebangkitan sayap kanan. Sementara organisasi Islam khawatir kalau presiden memberikan kekuasaannya kepada PKI. Keadaan ini berujung pada kejatuhan Soekarno, hancurnya PKI dan awal kepemimpinan politik Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto. PKI yang terlibat dan bertanggung Jawab dalam pembunuhan enam perwira tinggi AD, semakin memantapkan AD untuk menumpas habis PKI yang saat ini sebagai rival utama AD.

Kekuatan-kekuatan Islam bersatu-padu dan merapatkan barisannya dalam membangun persekutuan dengan AD dalam menumpas PKI. Seperti sudah dijelaskan di atas, semua organisasi Islam bergandeng tangan dalam menumpas PKI. Tidak ada yang terkecuali.

Perlu dipahami, dalam kasus ini umat Islam mudah dipersatukan terutama ketika menghadapi tantangan berat dan musuh bersama,[56] yaitu PKI. Pada fase awal Orde Baru kecendrungan untuk bersatu sangat mendominasi hampir seluruh kekuatan umat Islam. Semua organisasi Islam dan pimpinan Islam mempunyai sikap yang sama terhadap PKI, bahwa komunisme adalah musuh bersama Islam yang harus dihadapi dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Menurut Anwar Harjono, di dalam menentang PKI umat Islam juga didorong oleh semangat Iman dan taqwa. Sikap kebersamaan ini membuat Islam menjadi satu kekuatan yang sangat ditakuti ketika itu.[57]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[56]Tentang kemudahan umat Islam untuk bersatu dalam menghadapi musuh bersama lebih jauh lihat Barbara Freyer Stowasser, "Agama dan Perkembangan Politik: Antara Ibn Khaldun dan Machiavelli, *Ulumul Qur'an,* Vol. V, No. 4, 1994. hlm. 66-75.

[57]Hasil wawancara Muhammad Rusli Karim dengan Anwar Harjono. Lihat Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 102-103. Mengenai hal ini lihat juga R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafitipers, 1992), hlm. 83-128.

Mengingat tema gerakan menumpas PKI ini, demi "kelangsungan hidup bangsa" maka solidaritas dari segenap lapisan masyarakat terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa Islam begitu besar. Disintegrasi sosial yang ditimbulkan oleh kudeta berdarah mengundang kepekaan bagi musuh PKI dan Soekarno, terutama dari kalangan Islam yang dulu pernah dininabobokkan Soekarno. Herbert Feith melukiskan keadaan di masa lahirnya Orde Baru:

> Sejauh yang saya lihat, sejumlah kelompok rakyat telah terlibat dalam proses yang mengantarkan masa Soeharto, khususnya kelompok-kelompok Islam dan mahasiswa. Namun, kepemimpinan Orde Baru sebetulnya berada secara mantap ditangan sekelompok pimpinan angkatan bersenjata, yang komitmen utamanya tertuju kepada stabilitas ekonomi dan politik.[58]

Sejak dilarang pada tahun 1960, kalangan Muslim modernis Masyumi tidak pernah lagi muncul secara menyeluruh. Para pendukungnya dari kalangan generasi muda pindah ke Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Setidaknya, secara resmi, HMI independen dari Masyumi. Selama Pemilu 1955, misalnya, HMI menyerukan kepada angotanya untuk memilih calon-calon legislatif yang baik, dan tidak secara langsung menunjuk Masyumi.[59]

Setelah tahun 1960, kalangan modernis dalam PII dan HMI berusaha secara serius mengimbangi kekuatan PKI sebisa mungkin. Karena tidak bisa berpolitik dalam dunia publik, mereka membangun aliansi dengan politisi-politisi anti-Komunis; PSI, partai-partai Kristen dan nasionalis konservatif, terutama dari NU, dan—yang terpenting—dengan sejumlah anggota militer dalam hal ini AD, yang sangat bersimpati pada gerakan ini.[60]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[58]Dialog *Prisma,* No. 7 Agustus 1978, hlm. 44.

[59]Tentang pandangan orang-orang HMI menyangkut periode ini, lihat Agus Salim Sitompul, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 56-73.

[60]Hasil wawancara Hefner dengan sejumlah aktivis HMI lokal di Malang dan Jakarta, selama tahun 1985 dan 1992. Lihat Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 95.

Ketika PKI meminta organisasi barunya untuk melakukan *landreform.*[61] Namun demikian, saat kampanye tersebut menunjukkan kemajuan, PKI mulai sadar bahwa penyingkiran umat Islam ke pinggiran tidaklah sepenuhnya memadamkan kekuatan politik mereka. Sistem demokrasi prosedural-konstitusional yang sebelumnya diperjuangkan Masyumi bisa saja berakhir, namun tidak demikian dengan kekuatan Islam terorganisir yang mengagumkan.

Meski secara resmi bergabung dengan PKI dalam pemerintahan Nasakom, NU secara aktif terlibat dalam gerakan aliansi anti-komunis selangkah lebih maju dengan mengikutsertakan barisan-barisan milisinya di wilayah terpencil Jawa Timur dalam latihan-latihan dengan militer.[62] Di daerah Malang, Surabaya dan beberapa tempat di Jawa Timur, HMI juga menerima latihan serupa yang akan bertugas sebagai mata-mata sipil.

Kerjasama antar Islam dan militer mulai meningkat tajam dan berpuncak setelah peristiwa G30S/PKI. Militer memanfaatkan jaringan seperti ini yang terus dimobilisasi selama tahun 1965-1966, dalam rangka menciptakan aliansi oposisi sipil. Dalam sejarah Orde Baru, 5 Oktober adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[61]Secara nyata pada paro awal 1964, Jawa Timur menjadi wilayah terbesar di seluruh Jawa yang menjadi ajang konflik antar berbagai kekuatan politik di masyarakat. Perlu dicatat adalah konflik yang terjadi pada waktu itu dipicu oleh dua rasa keengganan dari kalangan tuan tanah. Tindakan tersebut dikarenakan UUPA 1960 yang salah satu isu utamanya adalah *landreform* (redistribusi tanah) dan penataan ulang tas sumber-sumber agraria. Lihat Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan,* hlm. 35. Selengkapnya tentang *Landreform,* lihat Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (Yogyakarta: Jendela, 2001), Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966),* (Jakarta: Kepustakan Gramedia Populer bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan *The Ford Foundation*, 2000).

[62]Tentang barisan para militer NU dalam melakukan pembersihan PKI seperti: Ansor dan Banser yang secara aktif melakukan latihan bekerjasama dengan ABRI, lihat Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan,* hlm. 19-90.

hari yang secara resmi dicatat sebagai awal gerakan mahasiswa khususnya mahasiswa Islam yang tergabung dalam HMI, dalam melawan Soekarno. Walau demikian, para aktivis HMI segera mengatakan bahwa organisasi itu sebenarnya sudah menjalin hubungan rahasia dengan militer pada 2 Oktober.

Beberapa minggu kemudian, dalam upayanya memperluas kerjasama mahasiswa dan tentara, dibentuklah satu kesatuan aksi menentang komunis dan sisa-sisa G30S/PKI, yang diberi nama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang disponsori militer. Karena—meskipun sudah ada organisasi mahasiswa seperti PPMI (Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia)[63]—dengan dibentuknya organisasi baru ini militer lebih mudah untuk mengatur.

Ada delapan kelompok dalam KAMI.[64] Diantara delapan kelompok itu adalah HMI dan PMII yang berasal dari kelompok Islam, namun demikian HMI merupakan kelompok terbesar dalam KAMI. Pada bulan-bulan berikutnya dalam waktu singkat, KAMI menjadi kekuatan sipil yang paling berpengaruh dalam perjuangannya melawan PKI dan membatasi kekuasaan Presiden Soekarno. Dengan dibantu rekannya KAPPI,[65] KAMI berhasil merebut dan menguasai jalan-jalan di Jakarta dari rivalnya, Barisan Soekarno, yang dimobilisasi presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[63] Karena dimata militer dan mahasiswa anti-komunis PPMI masih memiliki banyak anggota yang Soekarnois. Dalam pandangan mereka, kritik terhadap PKI tidak perlu menjangkau presiden.

[64] Diantaranya adalah PMKRI, GMKI, Gemsoso (Gerakan mahasiswa Sosialis) dan juga beberapa organisasi mahasiswa yang berhaluan nasionalis non-agama (*nonreligious nasionalism*).

[65] Didirikan pada bulan Februari 1966. KAPPI didominasi kalangan pemuda Muslim modernis melebihi yang ada di KAMI. Ketuanya adalah Husni Thamrin, Sekjen PII (Persatuan Pelajar Indonesia), organisasi modernis yang punya ikatan dengan HMI dan Masyumi. Lihat Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 129. Lihat juga Crouch, *Militer,* hlm. 175-197.

Demikian juga kelompok Islam tradisionalis dalam hal ini NU menunjukkan sikap yang lebih dalam hal persekutunnya dengan militer. Pada bulan Agustus 1966, Achmad Sjaichu, Wakil Ketua NU II, menyebut aliansi NU dengan militer bagaikan hubungan "dua saudara sekandung". Seperti kita lihat, NU memainkan peranan kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap setelah dalam waktu beberapa hari saja Jenderal Soeharto berhasil menumpas G30S/PKI. Di samping kekikutsertaan para aktivis radikalnya, dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa seperti di atas, NU juga memainkan peranan yang penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh pihak militer dalam hal ini Jenderal Soeharto.[66]

Bagi para jenderal yang menekankan keabsahan peralihan kekuasaan, NU merupakan satu-satunya pasangan yang dapat dijadikan tumpuan harapan. PNI terlalu dekat hubungannya dengan Soekarno, Masyumi sudah dilarang tahun 1960 dan sangat dicurigai. Sementara, partai-partai Islam lainnya terlalu kecil untuk berperan. MPR dan DPR yang mengalami perombakan tidak lama setelah peralihan kekuasaan kepada Soeharto tangal 11 Maret 1966, sebagian diserahkan ke tangan NU. Maka terjalinlah suatu kerjasama antara TNI dan gerakan tradisionalis NU. Suatu solidaritas-timbal balik lahir dari hubungan tersebut. Pernyataan-pernyataan yang muncul sangat hiperbolis: Angkatan bersenjata "mempercayakan" tentaranya pada NU dan sebaliknya.[67].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[66]Andree Feillard, *NU,* hlm. 95.

[67]Pernyataan Panglima Militer Sumatra, Mayjen Mokoginta seperti ditulis oleh Fiellard. Lihat Andree Feillard, *NU,* hlm. 95

Di bawah komando Subchan[68] dan NU, secara tidak langsung mempunyai andil dalam disahkannya kekuasaan darurat Soeharto yang dapat menyusul tekanan para mahasiswa dan militer pada bulan Maret. Subchan dan NU juga punya andil dalam dipertahankannya kelompok-kelompok fungsional dan disahkannya fungsi sipil TNI.[69]

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah keruntuhan Orde Lama dan menyongsong kebangkitan Orde Baru peta politik umat Islam, nampaknya kurang menunjukkan keberuntungan bagi umat Islam yang selama ini aktif bekerjasama dengan militer dalam membasmi kekuatan PKI dan memprotes atas segala kebijakan-kebijakan Soekarno. Baik dari kalangan Islam modernis (mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, HMI, KAPPI, PII, Muhammadiyah, dan para bekas anggota Masyumi) maupun dari kalangan Islam tradisional, NU (dan gerakan mahasiswanya dalam PMII). Kalau kita lihat sejarah secara retrospektif mudahlah bagi kita untuk melihat betapa Orde Baru dan militernya memperlakukan mereka sebagai boneka-boneka AD, yang dimanipulasi untuk kepentingan tentara dan juga tidak adanya integritas dari mereka sendiri. Ketika tahun-tahun berikutnya, mereka mulai menentang kebijakan-kebijakan Orde Baru, kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan mudah ditekan, dan beberapa aktivisnya dipenjara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[68]Bahkan Pimpinan Partai Katolik, Kasimo, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa, Subchan adalah seorang "Pancasilais sejati," dan motor yang kuat dalam pemberantasan G30S/PKI. *Duta Masyarakat* juga mendukung pelantikan tersebut dengan dalih Idham Chalid saat itu masih menjabat Wakil Perdana Menteri sehingga tidak bisa sekaligus menjabat sebagai wakil ketua MPRS. *Ibid.*, hlm. 96.

[69]*Ibid.*, hlm. 97.

Hal yang sama juga menimpa nasib politik kalangan Islam tradisional NU. Setelah beberapa bulan kekuasaan Orde Baru terjadi perbedaan serius dengan pemerintah menyangkut kebijakan soal agama, dalam hal ini menganai perlunya diterapkannya kembali Piagam Jakarta sebagai aturan dasar bernegara.[70] Sejumlah upaya ini membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi kepentingan Islam politik, tetapi ironisnya justru menamatkan riwayat politik NU. Pada pertengahan tahun 1970-an, NU berubah dari teman akrab pemerintah menjadi pengkritiknya yang paling keras. Pemerintah menanggapinya dengan memperkukuh tekanannya terhadap NU dan segenap komunitas umat Islam. Ketika diadakan reorganisasi DPR pada tahun 1968, porsi umat Islam menurun tajam dari 42% yang sempat diraih pada tahun 1955 menjadi 28%. Dalam susunan kabinet yang baru saja diumumkan setelah itu, hanya empat dari 24 orang menteri yang ditunjuk berasal dari partai Islam.[71] Dengan langkah-langkah tersebut Soeharto menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi keinginannya bakal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[70]Pada awal 1996, bahkan sebelum terjungkalnya Soekarno dari kursi kekuasaan, sudah ada tawar-menawar diantara pejabat-pejabat pemerintah dan kalangan Muslim konservatif tentang rencana umat Islam membangkitkan kembali Piagam Jakarta, termasuk penegakan hukum Islam oleh pemerintah. Beberapa bulan kemudian, NU menarik diri dari tuntutan garis keras kaum modernis Muslim, dengan alasan bahwa yang mereka perjuangkan adalah penerapan syariah dalam negara Pancasila. Formulasi yang kabur ini tampak mengisyaratkan tentang persetujuan NU terhadap keinginan militer bahwa hanya Pancasila yang bisa menjadi dasar negara. Tetapi, rumusan dari NU itu masih menyisakan ketidakjelasan soal bagaimana hukum-hukum syariah dilaksanakan. Apakah hukuman mati (seperti diajarkan dalam Islam) bisa dilakukan terhadap orang yang menentang pemberlakuannya? Apakah mantan orang-orang komunis yang kini masuk Islam bisa dihukum mati?. Lebih jauh Lihat, *Ibid.,* hlm. 114-19. Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 167. Tentang ulasan Piagam Jakarta secara rinci, lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959),* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), Ahmad Syafi'i Marif, *Islam,* Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia: Studi Sosio-Legal Alat Konstitusi* (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 1995).

[71]*Ibid.,* hlm. 110-111.

terhempas dari patronase pemerintahan rezim militer. Persekutuan, koalisi dan kerjasama yang dibangun selama ini—dari melawan komunis, kejatuhan Soekarno dan berakhir pada naiknya Soeharto—adalah persekutuan ambivalen, yang tidak berarti apa-apa bagi kepentingan Islam politik pada masa-masa berikutnya.

D. Benih Dominasi Militer

Beberapa uraian di atas telah membicarakan keterlibatan militer dalam politik dan situasi politik ketika Orde Baru didirikan. Munculnya TNI setelah tahun 1965 merupakan hal yang penting, mengingat tidak ada kelompok lain yang mempunyai organisasi sekuat TNI. Mahasiswa, buruh dan kelompok perusuh bukan merupakan kekuatan yang mampu bertahan dan bersatu. Girling menyebutkan, hanya kelompok Islam saja sebenarnya yang bisa menghalangi "supremasi" sipil militer, tetapi dalam tubuh Islam sendiri terjadi banyak perselisihan.[72]

Bagi kebanyakan pengamat alasan umum untuk membenarkan keterlibatan militer dalam politik adalah karena kelemahan institusi politik sipil, yaitu ketidakmampuannya menjalankan roda pemerintahan.[73] Campurtangan militer tidak mungkin terjadi ketika pemerintah dipimpin oleh kelompok yang kuat dari elit sipil dan mempunyai tujuan yang jelas. Bahkan dalam kasus Asia Tenggara, menurut McCloud, dasar legitimasi agama tradisional dan tuntutan partisipasi dalam revolusi sesungguhnya menjadi

[72]Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 82.

[73]McCloud, *Southeast Asia Tradition and Modernity in the contemporary World* (Boulder: Westview Press, 1985), hlm. 149.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bentuk-bentuk legitimasi yang kuat terutama bagi para pemimpin militer.[74] Keterlibatan TNI biasanya dihubungkan dengan imejnya sebagai pemimpin revolusi dan penekanan pada ancaman komunis terhadap cita-cita revolusi[75] Sebagai pemimpin revolusi, TNI merupakan teras kekuatan yang selalu berada pada barisan terdepan, bahkan TNI dianggap sebagai penjelmaan dari nasionalisme Indonesia, dan sekaligus kekuatan utama pendukung Pancasila sejak tahun 1945.[76]

Perlu dipahami bahwa, presepsi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari tidak adanya batas yang jelas tentang fungsi militer dan fungsi politik pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1949)—atau lebih dikenal dengan masa revolusi fisik—melawan Belanda. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus juga militer. Para pemuda yang terlibat perang bersenjata melawan Belanda tidak didorong oleh keinginan untuk membina karir dalam kehidupan militer, tetapi oleh semangat patriotik terhadap republik yang telah diproklamasikan oleh para politisi dari kalangan nasionalis. Watak perjuangan tersebut selanjutnya telah memperkuat kecondongan militer dalam masalah politik.[77] Tanpa bekal suatu kecondongan latihan kemiliteran yang cukup serta kurangnya persenjataan modern, perlawanan Indonesia terhadap Belanda berlangsung dalam bentuk gerilya.

---

[74]*Ibid.*, hlm. 150.

[75]Suryadinata, "Islam and Soeharto's Foreign poilc, Indonesia the Middle *East, and Bosnia",* dalam *Asian Survey* vol 9, 1988. hlm. 268-281.

[76]Lihat Dudi Susanto dan A. Made Tony Supriatma (ed.), *ABRI: Siasat Kebudayaan 1945-1995* (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1995), hlm. 1-10.

[77]Harold Crouch, *Militer* hlm. 23. Lihat juga Salim Said, "Tentara Nasional Indonesia dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Pada Masa Datang," *Prisma,* No. 6, 1987. hlm. 81-96. Bandingkan dengan TB. Simatupang, "Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kesejarahan dan Perspektif Masa Depan," dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 45-72.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbedaan antara kehidupan militer dan sipil tidak jelas, para pejuang sepenuhnya sangat tergantung pada dukungan penduduk setempat. Akhirnya, perjuangan ditempuh melalui perang gerilya. Para pejuang gerilya diorganisasikan kedalam satuan kelompok politik yang tidak reguler sebagaimana mestinya suatu angkatan bersenjata yang bersifat reguler. Crouch, karakter perjuangan seperti mendorong kecenderungan militer untuk melaksanakan fungsi-fungsi politik.[78]

Sepanjang kurun waktu—masa perjuangan kemerdekaan itu—antara militer dan negara menunjukkan sikap yang saling bertentangan dan selalu konfrontatif. Ada perbedaan bagi militer dalam perjuangan kemerdekaan yang secara prinsip sangat bersebrangan, dalam hal strategi yang ditempuh antara militer dan pemerintah. Bagi militer perjuangan kemerdekaan harus dilakukan dengan aksi militer, sebab mereka melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada niat dari Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Pandangan ini menurut Sundhaussen, sangat wajar mengingat keterampilan dan usia para perwira yang relatif muda, lebih cenderung pada tindakan keras ketimbang melalui cara-cara diplomatik. Sebaliknya, pemerintah, dalam hal ini Soekarno dan teman-temannya, seperti Hatta dan Sutan Sjahrir dari jajaran sipil, adalah orang-orang dengan usia lebih tua yang keahlian utamanya adalah memformulasikan dan menyodorkan ide-ide politik.

Dalam Dwi Tunggal Sjahrir dan Amir Sjarifuddin mengemukakan suatu argumen ideologis yang mengalienasikan militer untuk selama-lamanya.

---

[78] *Ibid.*, hlm. 24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sjahrir mengecam para "pemuda"[79] telah menggunakan "cara-cara fasis" dan bahwa perjuangan revolusioner yang demokratis harus dimulai dengan membersihkan dari noda-noda fasisme Jepang, dan mengekang pandangan orang-orang yang masih dipengaruhi propaganda dan indoktrinasi Jepang. Hal yang sama juga dilakukan Menteri Keamanan Amir Sjarifuddin, baginya pemuda-pemuda yang telah merelakan dirinya menjadi tentara PETA sebagai orang yang telah menyerahkan jiwa mereka kepada Jepang. Ia juga mengecam para perwira didikan Belanda, bahwa perwira mantan opsir KNIL tak lebih sebagai tentara bayaran. Sebaliknya, para pemuda yang masuk angkatan bersenjata sesudah proklamasi kemerdekaan adalah orang-orang yang dibimbing oleh patriotisme sejati. Sikap Amir dan Sjahrir yang gegabah itu telah menimbulkan rasa dendam terhadap kaum politisi di kalangan para perwira.[80]

Hebert Feith mensinyalir, kebijakan-kebijakan Soekarno di atas merupakan suatu kemunduran bagi semua kelompok yang memihak militer (dan memusuhi PKI) dalam upaya mempertahankan tentara sebagai kekuatan politik yang utuh dan berdiri sendiri yang mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan mereka yang memihak kepada presiden.[81]

Berbagai pengalaman inilah—apa yang disebut Sundhaussen—sebagai bentuk permulaan buruk hubungan sipil-militer. Menurutnya, interaksi antara

---

[79]Sebutan pemuda adalah sebuah istilah yang pada waktu itu ditujukan unt k para perwira muda mantan opsir-opsor KNIL dan PETA. Lihat Ulf Sundhaussen, *Politik Milite,* ł łm. 36.

[80]*Ibid.*, hlm. 59-60.

[81]Pengamat melihat, kebijakan Soekarno ke kiri-kirian itu dianggap sebagai bentuk kecemasan Soekarno terhadap suatu kudeta kelompok Militer. Herbert Feith, membenarkan bahwa usaha Soekarno adalah untuk mengamankan dirinya dari usaha-usaha kudeta yang dilakukan para pemimpin tentara sejak pengangkatan Yani mengantikan Nasution. *Ibid.,* hlm. 148.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kedua golongan elit (pemerintah-militer) itu pada mulanya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan struktural dalam sistem politik secara keseluruhan, yang dipergawat oleh antagonisme yang kian tajam sebagai akibat curiga-mencurigai secara perorangan, perbedaan nilai, tujuan dan kepentingan, serta perbedaan pendapat mengenai strategi militer dalam politik dan pembebasan nasional.[82]

Dapat disimpulkan, bahwa benih-benih dominasi militer dalam wilayah sipil diatas didukung oleh beberapa faktor yang membawa militer larut dalam politik. *Pertama,* pengalaman militer dengan kaum sosialis terdahulu, untuk mengindoktrinasikan tentara dengan ideologi mereka sendiri telah menyebabkan para perwira AD bersikap waspada terhadap ideologi partai, dan mendorong mereka untuk mengembangkan jenis nasionalisme mereka dalam versi mereka sendiri. Sikap mandiri dibidang ideologi yang sangat mirip dengan sikap *Reichswehr* sebagai pengemban suatu wawasan nasional yang rumusannya kabur, telah berhasil untuk secara efektif mencegah setiap pemerintah sipil yang didasarkan atas orientasi dan ideologi kepartaian untuk memperoleh kontrol penuh atas AD.[83]

Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengadu domba lasykar-lasykar dengan tentara dengan merugikan kepentingan pertahanan nasional telah memaksa Markas Besar Tentara untuk mencari dukungan presiden dan partai-partai oposisi dengan tujuan untuk mengatasi kepentingan politik yang sempit dari kabinet-kabinet sosialis di bi dang pertahanan.

---

[82]*Ibid.,* hlm. 20.
[83]Wawancara dengan Abdoel Fattah, Jum'at, 24 Maret 2006, di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketiga, berkurangnya keragaman di kalangan korps perwira adalah pembersihan terhadap kelompok-kelompok "ekstrem kiri" di dalamnya sebagai akibat Peristiwa Madiun dan G30S/PKI dan kelompok "ekstrem kanan" setelah peristiwa pembelotan orang-orang Islam yang radikal ke pihak Darul Islam, DI/TII dan PRRI-Permesta. Pemberontakan Madiun dan G30S/PKI serta proklamasi Negara Islam Indonesia, kedua-duanya diangap sebagai penghianatan, dan telah menyebabkan tentara menolak, baik komunisme maupun Islam militan. Faktor ini pada gilirannya kelak, membawa dampak kecurigaan berkepanjangan atas trauma militer terhadap gerakan Islam politik di Indonesia.

Beberapa faktor yang merupakan peristiwa sejarah diatas nampaknya semakin menguatkan keyakinan kita bahwa benih-benih kebangkitan hegemoni-dominasi militer dalam wilayah-wilayah sipil—tanpa disadari sebelumnya—telah "disemayamkan" oleh pendahulu elit-elit politik bangsa ini. Tanpa rasa malu, sungkan dan ragu bahkan dengan bebas militer melenggang dalam ayunan langkah irama politik sipil, khususnya penindasan dan pengibirian terhadap gerakan Islam politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III

DARI KEKERASAN DAN PEMINGGIRAN MENUJU SEMANGAT KEBANGKITAN POLITIK ISLAM (1976-1988)

> Sebagai "bangsa," kita tak hanya berhadapan dengan kesadaran politik baru yang telah melampaui batas-batas etnis, tetapi juga pada suatu komunitas yang dibina berdasarkan nilai-nilai yang diserap dari pengalaman sejarah. Dalam konteks Indonesia sebagai "komunitas-nasional," yang bertolak dari gagasan kultural ini, maka suatu corak hubungan yang—bukan politik pun terbentuk pula. Dalam komunitas yang berkembang dengan kesadaran dan pengalam sejarah ini, suatu corak hubungan sosial baru terbina. Komunitas-nasional adalah suatu "komunitas yang dibayangkan"
>
> —Benedict R. O'Gorman Anderson[1]

Setelah melalui periode kebangkitan dalam tahapan proses pembangunan yang penuh dengan intrik-intrik politik antarberbagai kekuatan, Orde Baru kini, selama hampir dua belas tahun (1976-1978) memasuki puncak kejayaan dan kesuksesan dalam bidang ekonomi. Tidak demikian halnya dengan kebijakan politiknya. Pembangunan, stabilitas dan keamanan yang selama ini di dengungkan telah membawa dampak luar biasa terhadap serentetan peristiwa kekerasan. Dalam periode ini militer sebagai "komprador" kekuatan utama Orde Baru telah "terseret" secara nyata berhadapan dengan kekuatan Islam politik pada tingkat represifitas yang tinggi.

Namun, pada saat yang sama pada pertengahan 1980-an, muncul gerakan pembaru Islam politik sebagai antitesis terhadap kebijakan politik pemerintah. Gerakan—yang sudah muncul sejak tahun 1970-an—ini kian

[1]Benedict R. O'Gorman Anderson, *Imagined Communities-Komunitas-komunitas Terbayang* (Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar, 2001).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terasakan pengaruhnya setelah Orde Baru memberlakukan undang-undang Pancasila sebagai ideologi resmi semua partai politik (parpol) dan seluruh organisasi masyarakat (Ormas) pada 1984. Bab ini akan mengkaji berbagai kebijakan politik dan kekeran Orde Baru, dwifungsi dan hegomoni militer, peminggiran dan depolitisasi Islam politik, sampai pada munculnya gejala akomodasi ke arah kebangkitan Islam politk dalam pusat kekuasaan birokratik negara pada penghujung 1980-an.

A. Jurus Politik Orde Baru

1. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru

Berbicara mengenai kekerasan (*violence*) politik dan kekerasan di masa Orde Baru, dapat dilihat dari masa awal Orde Baru. Historiografi politik Orde Baru diawali oleh sejarah kekerasan dengan munculnya peristiwa G30S/PKI dan jatuhnya Soekarno. Warisan sejarah Orde Lama, menghantui *brain trust* Orde Baru, terutama kelompok militer yang paling banyak dirugikan.

Berbagai peristiwa kekerasan telah terjadi dalam sejarah panggung politik kekuasaan Orde Baru. Seperti tampak kita lihat pada beberapa kasus yang menewaskan sejumlah korban.[2] *Pertama,* kasus Malari, 15 Januari 1974 saat kedatangan PM Jepang. Kerusuhan pecah setelah berlangsung demo anti-Jepang. Akibat kerusuhan itu, puluhan kendaraan bermotor produksi Jepang hancur. Pemerintah menerapkan jam malam

[2]Banyak peristiwa kekerasan lainnya yang dilakukan Orde Baru, beberapa contoh kekerasan yang disebutkan dalam tulisan ini sebatas kekerasan—baik langsung maupun tidak langsung—sangat berhubungan dengan gerakan Islam politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

untuk menertibkan keadaan.[3]

Kedua, kasus demo mahasiswa, Januari 1978. Gerakan ini mengambil momentum menjelang SU MPR. Gerakan ini, pada intinya mempersoalkan masalah pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-3 kalinya. Menghadapi aksi mahasiswa ini, pemerintah mengancam dengan melakukan penangkapan, dan ternyata benar-benar dilakukan. Sampai pada 26 Januari 1978, sekitar 143 Mahasiswa ditahan. Selain itu, pada hari yang sama insiden kekerasan juga terjadi di IKIP Surabaya, aparat melakukan tindakan represif dalam menyikapi gerakan mahasiswa.[4]

Ketiga, kasus petisi 50, Mei 1980. Peristiwa ini terjadi pada rentang waktu akhir Mei 1980, berawal dari "Pernyataan Keprihatinan" 50 orang tokoh untuk presiden Soeharto yang bermaksud mempertanyakan kebijakan-kebijakannya. Seoharto tidak menanggapi secara serius. Karena kekritisan mereka terhadap kebijakan pemerintah, 50 orang perumus dan penandatanganan petisi 50 tersebut diperlakukan semena-mena oleh pemerintah Soeharto.

Keempat, penembakan misterius (Petrus), Juli 1983. Gejala penembakan misterius mulai meningkat di kota-kota besar di Indonesia pada pertengahan tahun 1983. Sasaran penembakan misterius adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3]Peristiwa yang memakan korban jiwa itu telah memicu militer untuk bersikap represif terhadap aktivitas mahasiswa. Pengendalian terhadap aktivitas mahasiswa semakin ditingkatkan dengan dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Hal ini pada gilirannya telah meretakkan kemesraan antara militer dengan mahasiswa yang sebelumnya terbangun.

[4]Setelah peristiwa ini Soeharto mengkonsolidasi kekuatannya (dari militer), karena Seharto takut dengan ideologi lama. Wawancara dengan Salim Said, Senin, 27 Maret 2006 di Jakarta.

mereka yang diduga melakukan tindak kejahatan (penjahat/residivis). Tindakan ini nampaknya disetujui oleh aparatur negara. Alasannya, demi terciptanya ketertiban dan tercapainya rasa aman di masyarakat.

Kelima, kasus Tanjung Priok, 12 September 1984. Peristiwa Tanjung Priok adalah peritiwa berdarah yang menimpa umat Islam, buah hasil ketegangan yang terjadi antara pihak aparat keamanan dengan jamaah sebuah mushalla As Sa'adah di daerah Rawa Badak. Ketika itu ada pamflet/poster ditempel di masjid yang menurut versi pemerintah adalah selebaran yang bernilai menghasut. Kemudian ada himbauan dari aparat untuk mencopot poster tersebut. Karena himbauan tidak diindahkan, seorang petugas berusaha menutup tulisan di poster dengan warna hitam. Menurut versi masyarakat, upaya penghitaman itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Petugas masuk ke dalam mushalla dengan tidak melepas sepatunya dan menutup poster dengan cara menyiramkan air selokan yang berwarna hitam.[5]

Keenam, kasus meninggalnya Warsidi, 7 Februari 1988. Warsidi—yang oleh pemerintah dan aparat keamanan—diyakini sebagai gembong GPK yang tinggal di Lampung Tengah. Kerusuhan terjadi di dukuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[55]Kasus Tanjung Priok tidak bisa dilepaskan dari peranan pihak militer, dimana pada waktu itu pasukan ABRI telah melakukan penembakan sehingga menewaskan sejumlah warga sipil di kawasan Jakarta Utara. Saat peristiwa terjadi Dandim 0502 Jakarta Utara dijabat oleh Letkol Butar-Butar. Sementara Pangdam Jaya saat itu dijabat oleh Try Sutrisno yang masih berpangkat Mayjen. Sedangkan Pangab dijabat oleh LB. Mordani yang saat itu sudah menyandang bintang empat. Lihat, Riza Sihbudi, *Tragedi Tanjung Priok,* dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.), "Militer, hlm. 17-38, A.M. Fatwa, *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-63, Diane F. Orentlicher, *Human Rights in Indonesia and East Timor: An Asia Watch Report* (new York: The Asia Watch Committee, 1998), hlm. 92-126.

Cihideung pada 7 Februari 1989. Ide awal dari Warsidi sendiri hanya ingin membentuk miniatur masyarakat Islam. Tetapi tiba-tiba aparat datang menyerbu dan Warsidi memerintahkan pengikutnya untuk bertahan sehingga terjadilah pertarungan antara Warsidi dan aparat keamanan [6]

Kenyataan di atas memperlihatkan bahwa militer telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang melintasi batas wilayah kekuasaan sipil sesuai dengan opini dan persepsi militer itu sendiri. Ia tidak hanya berperan sebagai kekuatan keamanan dan sosial politik, tetapi juga menyangkut wilayah ideologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Tidak terbendungnya terlibatnya militer dalam wilayah politik, maka secara tidak langsung membiarkan aksi kekerasan-demi kekerasan terus berlangsung dan sulit untuk dihentikan. Utrecht mengidentifikasi, bahwa selama Orde Baru momok kekerasan yang diperkuat oleh kenangan masa-masa berdarah 1965-1966, telah menghantui masyarakat Indonesia, sementara pemerintah terus-menerus menampilkan pertunjukan kekuatan dan menerapkan kekerasan di depan umum sebagai sarana utama mempertahankan kontrol politik. Terutama selama tahun 1970-an sampai 1980-an, pemerintah dan militer sangat bertangan besi dalam tindakan mereka melawan pemberontakan daerah, gerakan sparatis, dan protes sosial, dengan menganggap hal ini sebagai cara yang tepat untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6]Pemerintah menyebut 27 orang pengikut Warsidi, termasuk Warsidi sendiri, tewas dalam insiden tersebut. Sumber tidak resmi menyebutkan paling tidak lebih dari seratus orang tewas Tentang kasus kekerasan dan tindakan represif lainnya selama pemerintahan Orde Baru secara lengkap di tulis oleh Saurip Kadi dalam bukunya. Lihat, Saurip Kadi, *TNI-AD: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 12-39.

mengintimidasi publik.[7] Jelas bahwa penghasut dan perlakuan kekerasan yang paling utama pada tahun-tahun tersebut adalah negara, dalam hal ini Soeharto, militer dan para kroninya.[8] Situasi ini digambarkan oleh Pramodya Ananta Toer menggambarkan sebagai bentuk ciri khas mentalitas Orde Baru, menurutnya:

> Politik kekerasan yang dipakainya telah menyebabkan timbulnya keadaan sosial, dimana orang merasa ketakutan tetapi tetap ingin hidup. Maka lahirlah hipokrisi. Lahirlah kemunafikan yang meluas. Orang yang hipokrit itu membenarkan apa saja dari pihak kekuasaan, tetapi nuraninya sendiri berontak. Tetapi toh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan itu. Hipokrisi menjadi umum dan meluas, yang serta merta mendukung kekuasaan tanpa nurani.[9]

Politik Orde Baru yang melibatkan militer dan birokrasi secara sistematis ini menjadi jurus bagi kekuatan politik dominan di kalangan ekskutif. Jurus ini, pada gilirannya kelak menjadikan masyarakat dan lembaga-lembaga demokrasi baik dalam tentara supra struktur maupun infra struktur semakin melemah.[10]

2. Dwifungsi dan Hegemoni Militer

Kedudukan dominan militer, atau bisa disebut sebagai "dominasi militer" di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa terutama—terlihat sangat parah pada periode 1976-1980-an—mempunyai pengaruh besar atas sikap mental, cara pikir, tutur bahasa, dan perilaku masyarakat sipil,

---

[7]Frans Husken dan Huub de Jonge (ed.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 196 -1998* (yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 4.

[8]*Ibid.*, hlm. 6.

[9]Wawancara Pramodya Ananta Toer dengan Baskara T. Wardaya seperti dikutip oleh Imam Ihya'uddin, Lihat Imam Ihya'uddin, "Hipokrisi, Budaya Politik Orde Baru" dalam Jurnal Ilmu Sejarah an Kebudayaan MADDANA, Departemen Pers dan Jurnalistik Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, edisi 6, Tahun VI, 2004, 93-95.

[10]Lihat, Cholisin, "*Militer dan Gerakan Demokrasi: Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Inonesia* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 43.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terutama mereka yang menduduki jabatan atau kedudukan resmi dalam pemerintahan (para birokrat) maupun masyarakat pada umumnya, di berbagai lapisan dan golongan, tua dan muda. Ini mungkin yang bisa kita mengerti sebagai kesadaran sipil.[11]

Pengaruh dominasi militer sebenarnya tidak hanya menyangkut kesadaran sipil rakyat yang tidak ikut berkuasa, melainkan mereka yang berkuasa. Dari segi sikap mental kepemimpinan, khususnya dalam arti wibawa atau otoritas kepemimpinan di kalangan militer didasarkan pada doktrin, yang bagi militer Indonesia berasal dari Sapta Marga.[12] Dwifungsi telah menyebabkan ABRI mencampuri urusan yang bukan haknya, sebagai alat rezim Soeharto untuk mendominasi kekuasaannya, dan pada akhirnya mengakibatkan daya insiatif rakyat bawah.[13]

Melalui seminar AD II 25-31 Agustus 1966, dibentuklah suatu keputusan penting yaitu model struktur politik komando, struktur politik sentralistik, terutama untuk menciptakan trilogi pembangunan yaitu, *Pertama,* stabilitas politik; *kedua,* pertumbuhan ekonomi; dan *ketiga,* pemerataan pembangunan.

Keputusan terpenting lainnya dari seminar itu adalah perubahan konsep "Jalan Tengah" yang dicetuskan oleh A.H. Nasution. Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11]Lihat, J. Soedjati Djiwandono, "Hegemoni Militerisme atas Kesadaran Sipil", dalam Anas S. Machfuds dan Jaleswari Pramodhawardani (ed), *"Militar Withaut Militarism: Suara dari Daerah,"* (Jakarta: LIPI, 2001), hlm. 151-164.

[12]Menurut Djiwandono, sikap mental seperti itu semakin berkembang pula dikalangan sipil karena pengaruh dominasi militer. Perkembangan ini didukung oleh masyarakat Indonesia yang umumnya bersifat feodal dan paternalistik. Lihat, Djwandono, *ibid,* hlm.151-164.

[13]Wawancara dengan Abdoel Fatah, Jum'at, 24 Maret 2005. Lebih jaub pemikirannya mengenai hal ini lihat Abdoel fatah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 171-196.

seminar ini militer secara terbuka mengungkapkan perlunya peran kepemimpinan militer. Militer bukan lagi sebagai kekuatan yang berperan di bidang pertahanan keamanan dan sosial politik saja, tetapi mengendalikan kepemimpinan nasional. Militer harus mampu tampil di depan untuk menerapkan misi *ing ngarso sung tulodo*.

Dalam kata sambutannya, ketua panitia Seminar, Letjen TNI M. Panggabean menyebutkan bahwa TNI memiliki tugas untuk membentuk atau menumbuhkan suatu pemerintah yang kuat, baik, dan berusaha menyempurnakan pemerintahan dengan cara pengisian personelnya yang kuat. Hasil akhir dari seminar ini lebih menekankan fungsi militer sebagai kekuatan sosial politik daripada kekuatan pertahanan keamanan.[14] Dari sini dapat dilihat, bahwa sebenarnya dwifungsi ABRI, sudah mulai diterapkan sejak pemerintahan di bawah Presiden Soekarno.

> ...ketika doktrin "Jalan Tengah di perkenalkan Nasution pada bulan November 1958. Pada saat itu sebenarnya sejumlah posisi sipil telah berada ditangan tentara. Maka ketika Nasution, dalam doktrin "jalan Tengah," menekankan bahwa tentara tidak lagi hanya akan jadi penonton, tapi juga harus diberi kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan non-militer mereka, maka jenderal ini sebenarnya hanya mencari pembenaran bagi apa yang sesungguhnya telah terjadi.[15]

Dwifungsi menjadi melembaga dan semakin kuat dengan dukungan perundang-undangan, sejak pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang kebetulan juga seorang jenderal AD. Dengan segala dalihnya, yang bersifat historis maupun ideologis, dwifungsi

---

[14]Soebijono, dkk, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, Cet. VIII), hlm. 35.

[15] Salim Said, "Tentara Nasional Indonesia dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Pada Masa Datang," *Prismma,* No. 6, 1987. hlm, 88-89.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menemukan pembenarannya. Seperti yang dikatakan Presiden Soeharto bahwa:

> Peranan yang disumbangkan oleh ABRI kepada perkembangan politik dan ketatanegaraan ini, kiranya mudah difahami apabila kita melihat kembali kepada kelahiarn dan sejarah pertumbuhan ABRI. ABRI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi fisik, ia lahir dari anak-anak rakyat sendiri. ABRI adalah angkatan bersenjata yang lahir dan tumbuh dengan kesadarannya untuk melahirkan kemerdekaan, membela kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. ABRI bukan semata-mata angkatan bersenjata bayaran, ABRI adalah juga pengisi kemerdekaan, ABRI juga berhak dan merasa wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. ...inilah sebab pokok, mengapa ABRI mempunyai dua fungsi; yaitu sebagai alat negara dan sebagai golongan karya. Nanti dan kapan pun juga ABRI terus siap-siaga untuk mencegah kembalinya Orde Lama; terus siap-siaga untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dari siapa pun dan dari mana pun bahaya itu akan datang.[16]

Oleh karena itu, dalam perkembangannya dwifungsi telah mengakar kuat dalam tubuh militer, sehingga muncul kecenderungan yang sangat sulit untuk melepaskan konsep dwifungsi. Bagi kalangan militer dwifungsi merupakan bagian dari demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pandangan demikian berkonsekuensi pada logika bahwa menggugat dwifungsi berarti menggugat Pancasila yang berarti pula menggugat ideologi negara, dan itu adalah tindakan subversif. Lebih dari itu, pernyataan tersebut mengandaikan posisi sipil dalam politik (kekuasaan) semakin sempit.

Peran nyata militer dalam politik juga terlihat dari peran mereka dalam Golkar. Mayoritas pengurus Golkar adalah militer aktif. Keterlibatan mereka dalam partai politik berakibat pada keberpihakan mereka dalam pelaksanaan Pemilu. Berbagai intimidasi dan keberpihakan

---

[16]Pidato kenegaraan Presiden Soeharto 1967. Lihat Soeharto, *Amanat Kenegaraan: Kumpulan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 1967-1971,* Vol. I (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara nyata yang dilakukan militer untuk memenangkan Golkar dalam pemilu adalah akibat logis dari keterlibatan mereka dalam partai politik.[17]

Kebijakan tersebut merupakan rangkaian dari kerja militer, dalam hal ini Letjen Ali Moertopo, untuk kepentingan stabilitas, sekaligus kepentingan partai politik. Karena pada kenyataannya, camat dan kepala desa merupakan perpanjangan dari Golkar dan mayoritas di antara mereka adalah militer yang berarti pula memiliki hubungan hirarkis dengan pimpinan militer.[18]

Sejak awal Orde Baru, keberadaan konsep dwifungsi ini sebenarnya mendapat kritik dari berbagai kalangan. Pecahnya kemesraan antara kelompok Islam, dalam hal ini NU dengan militer yang begitu intim pada awal berdirinya Orde Baru, juga disebabkan oleh sikap kritis yang ditunjukkan oleh NU dalam hal ini dwifungsi TNI. Adalah Subchan yang waktu itu merupakan politikus muda NU begitu keras menentang konsep dwifungsi. Begitu juga dengan kalangan mahasiswa yang telah bersama-sama menumbangkan Orde Lama, melancarkan kritiknya yang cukup keras tentang dwifungsi ini.[19]

Dalam perkembangan selanjutnya TNI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan Orde Baru. Presiden berasal dari TNI. Banyak menteri termasuk menteri dalam departemen kunci seperti Departemen Hankam dan Departemen dalam Negeri juga berasal dari TNI, seperti

---

[17]Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 297.

[18]Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer, Studi tentang Budaya Politik* (Jakarta: LP3ES, 1995, Cet. II), hlm. 80.

[19]Mohtar Mas'oed, *Ekonorni dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, hlm. 130.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

halnya banyak Sekjen dan Dirjen. Pada 1960-an dan 1970-an, hampir semua gubernur dan bupati/walikota berasal dari TNI, ditambah pula peran Kopkamtib cukup besar waktu itu. Partai-partai politik menjadi kurang berpengaruh dan mengalami intervensi Opsus untuk menjamin agar pemimpin-pemimpinnya tidak mengganggu stabilitas politik.[20]

Secara perlahan tetapi pasti Orde Baru menerapkan kebijakan yang sama dengan berlandaskan pada alasan yang sama pula, yaitu demi pembangunan dan stabilitas politik. Alasan inilah yang dijadikan pijakan untuk menggabungkan beberapa partai politik menjadi dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Peran militer yang tidak saja dalam hal pertahanan keamanan, telah memunculkan sikap dan prilaku politik yang semakin menyimpang dari fungsi militer yang sesungguhnya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Menurut Crouch ada dua konsekuensi logis yang lahir dari aktivitas militer dalam wilayah non-militer. *Pertama,* politisasi korp perwira. Hal ini telah berakibat pada kegagalan militer untuk mempersatukan atau sebagai kekuatan netral dalam kehidupan bangsa. Bahkan militer termasuk dalam bagian yang merapuhkan integritas bangsa.

Kedua, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari aktivitas non-militer itu, seperti bisnis, telah merangsang mereka untuk melebarkan

[20]M. Najib Azka, *Hegemoni Tentara* (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm.80-95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keberhasilannya itu. Mereka, paling tidak, akan berusaha untuk tetap eksis di bidang yang telah ditekuninya dengan segala cara, termasuk mengalahkan saingannya. Pada titik ini militer tentu akan lebih berhasil, karena mereka memiliki power.[21]

Menurut Daniel Sparinga,[22] setidaknya ada 5 faktor yang digunakan Orde Baru untuk melegitimasi dwifungsinya atas keabsahan militer terlibat dalam bidang politik. *Pertama,* TNI dianggap bagian yang tak terpisahkan dari rakyat. Sokongan utama argumentasi ini datang dari kenyataan bahwa TNI terlahir dari kekuatan rakyat. *Kedua,* sejak awal TNI terlibat dalam masalah-masalah non-profesional kemiliteran—sesuatu yang kemudian melandasi argumentasi bahwa keterlibatan militer dalam masalah sosial dan politik adalah bagian integral dari sejarah perkembangan politik Indonesia. *Ketiga,* TNI merupakan satu-satunya kekuatan efektif yang sejarahnya selalu tampil sebagai 'penyelamat' negara proklamasi 17 Agustus 1945. Keberhasilan memadamkan berbagai peristiwa pemberontakan dan atau sparatisme yang dipandang telah mengancam keutuhan negara nasional, seperti PRRI-Permesta, DI/TII, Peristiwa Madiun dan G30S/PKI, dipakai sebagai ilustrasi untuk memperkuat klaim ini. *Keempat,* Indonesia yang merupakan masyarakat plural dan heterogen dipahami sebagai masyarakat yang memiliki potensi besar bagi berkembangnya antagonisme etnis, agama, ras, dan golongan (SARA). Pada saat yang sama, TNI menganggap dirinya sebagai satu-

[21]Harold Crouch, *Militer*, hlm. 16.

[22]Daniel Sparinga, "TNI: Sebuah Refleksi Kritis atas Sejarah", dalam dalam Anas S. Machfuds dan Jaleswari Pramodhawardani (ed), "*Militer*", hlm. 93-137.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

satunya kekuatan yang secara ideologis tidak terpecah-pecah karena ikhwal itu. *Kelima,* kesetiaan tak terbatas pada ideologi negara, Pancasila, sebagaimana terdapat dalam sumpah prajurit merupakan ilustrasi untuk menunjukkan kuatnya komitmen TNI pada negara sekaligus penegasan pada sifat otonom hubungan AD terhadap pemerintah.

Dengan demikian, memahami Dwifungsi tanpa mengaitkan dengan usaha memahami Orde Baru adalah langkah yang agak menyesatkan. Orde Baru yang dalam desain dasarnya memang tidak pernah memberi tempat penting bagi partisipasi politik rakyat telah memberi jalan yang amat leluasa bagi TNI untuk menjadi kekuatan politik yang dominan. Lumpuhnya kekuatan-kekuatan sosial politik yang berbasis dan berakar pada masyarakat sebagai akibat dijalankannya politik 'depolitisasi politik massa dan aliran' dalam kenyataannya telah mengakibatkan masalah itu bertambah nyata.

3. Peminggiran Gerakan Islam Politik

Dalam demonologi Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sejak 1966, politik Islam telah lama dinamai sebagai "ekstrem kanan". Unjung lain dari spektrum ideologi ini, disebut "ekstrem kiri" yang ditempati oleh komunisme. Dalam keduanya itu, nama-nama tersebut dipergunakan oleh pemerintah untuk mendefinisikan batas-batas perilaku politik yang dapat diterima, dan untuk mengeluarkan dari arena politik, ide-ide, pelaku-pelaku dan organisasi-organisasi yang dianggap berada diluar "konsensus nasional" yang didefinisikan oleh negara, yaitu Pancasila.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permusuhan Orde Baru terhadap komunisme bersumber dari perebutan kekuasaan antara tentara dan Komunis Indonesia. Konflik ini sudah mulai selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949 dan berkembang secara intensif yang kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 1 Oktober 1965. Partai Komunis segera dilarang, dan ratusan ribu anggota dan pendukungnya dibunuh. Soekarno, yang cenderung melindungi komunis disingkirkan dari kekuasaan secara diam-diam oleh penguasa baru yang berbasis tentara dibawah pimpinan Soeharto.

Setelah orang-orang komunis, kaum militan Islam yang dipandang oleh pejabat-pejabat sebagai pendukung Negara Islam telah menjadi sasaran pokok kedua dalam represi politik Orde Baru. Kaum militan Islam tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang-orang komunis. Namun mereka didiskriminasikan, dianiaya, ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang nampaknya lemah, dan kadang-kadang mendapat hukuman penjara yang lama. Kaum militan Islam yang dicurigai disingkirkan di luar pemerintahan dan kehidupan politik nasional. Tuntutan-tuntutan satu partai politik Islam untuk mewakili kepentingannya di parlemen, atau di dalam kebijakan politik dan program-program pemerintah untuk menggapai kepentingannya terus-menerus gagal dan selalu kandas. Melihat kondisi seperti ini, hingga seorang pengamat,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

McVey, menganggap "Islam merasa kedudukannya seperti anak tiri yang tidak dikehendaki."[23]

Dilarangnya Masyumi 1960, sebagian karena ketegarannya atas isu negara Islam, tetapi lebih penting lagi karena disebabkan oleh partisipasi beberapa anggotanya yang amat terbuka dalam pemberontakan daerah pada penghujung tahun 1950-an.[24] Di mata pemimpin-pemimpin tentara di markas-besar pusat, kebanyakan dari pemberontakan ini (dan yang lainnya yang terjadi dari awal tahun 1950-an sampai tahun 1960-an) muncul sebagai pemberontakan kaum militan Islam dan sparatis.

Selanjutnya, pemerintah Orde Baru mengambil suatu kebijakan politik dua-jurusan terhadap politik Islam yang mengingatkan kepada pemerintah kolonial Belanda yang lama: memajukan ketaatan beragama personal dan menantang politisasi agama. Ketaatan beragama untuk muslim dan juga untuk para penganut empat agama lainnya yang diakui resmi sangat digalakkan,[25] sebagian besar adalah sebagai senjata anti komunisme.

Ekspresi Islam politik di satu pihak secara drastis dibatasi. Pada awalnya, empat partai politik Islam diizinkan berdiri, tapi dibawah kondisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23]Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 153.

[24]Soekarno membubarkan Masyumi karena dianggap sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya terus melakukan pemberontakan atau lebih jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan para anggotanya. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 187. Bagi Soekarno, berdasarkan moral revolusioner dan moralnya revolusi, maka penguasa wajib membasmi tiap-tiap kekuasaan asing ataupun pribumi, yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya revolusi. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Vol. II (Jakarta: Panitia Dibawah Bendera Revolusi, 1965), hlm. 410-411.

[25]Lihat, M. Syafi'i Anwar, *Islam, Negara dan Formasi Sosial dalam Orde Baru,* Ulumul Qur'an, Vol. III, No. 3 (1992), Suplemen hal. 1-128.

pengontrolan organisatoris dan kepemimpinan yang ketat. Tahun 1973 empat partai difusikan menjadi satu, PPP tidak diizinkan memakai nama Islam. Setelah Pemilihan Umum tahun 1977, PPP dipaksa untuk meninggalkan tanda gambar partai Islamnya dengan menyetujui tanda gambar bintang yang non-religius. Pada tahun 1984, semua partai politik diminta menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal, dan tekanan pun dikenakan kepada PPP untuk membuka keanggotaannya kepada yang non-muslim. Dalam periode ini secara resmi PPP adalah partai terbuka, meskipun sejauh ini tidak ada orang non-muslim masuk.[26] Mengenai hal ini Soeharto menegaskan:

> Dengan GBHN 1983 kita telah mengambil keputusan nasional teramat penting yang merupakan langkah maju dalam pembangunan politik, ialah agar partai politik dan golongan karya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. ...oleh karena semua kekuatan politik telah secara terbuka menegaskan Pancasila [sebagai] satu-satunya asas, maka akan mudah dicegah dan dihindarkan menajamnya pertarungan golongan dalam usaha mencapai tujuan masing-masing yang mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. ...maka disatu pihak kita semua akan terbebas dari sisa-sisa saling curiga dan khawatir yang telah tumbuh dimasa lalu. Pemerintah juga telah menyampaikan ...undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan ...dalam rangka usaha meningkatkan peranan oraganisasi-organisasi sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, dan fungsinya masing-masing. Tegasnya, ...memberi saluran yang tertib dan teratur, agar semua warga negara dapat mewujudkan tanggungjawab sosialnya dalam bersama-sama membangun masyarakat Pancasila, ...yaitu: bahwa semuanya menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam arti asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.[27]

Pernyataan diatas didasarkan pada prinsip, bahwa sebagai negara sedang berkembang yang masuk dalam barisan negara dunia ketiga, Indonesia perlu melakukan perubahan-perubahan dalam semua aspek, baik

---

[26]R. William Liddle, *Islam,* hlm. 69.

[27]Pidato kenegaraan Presiden Soeharto 1984. Lihat Soeharto, *Amanat Kenegaraan: Kumpulan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 1982-1985,* Vol. IV (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 19.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Modernisasi adalah kata kunci yang harus ditempuh oleh Orde Baru. Krisis ekonomi dan politik sebagai bentuk warisan Orde Lama harus segera ditinggalkan yang pada tahap selanjutnya mendorong Orde Baru untuk segera melakukan kebijakan-kebijakan inovatif yang mampu merubah keadaan kearah yang lebih baik bagai pemenuhan kepentingan pemerintah. Orde Baru berkeyakinan, bahwa segala bentuk upaya modernisasi dapat tercapai bila didukung oleh stabilitas nasional yang mantap.

Selain itu, peristiwa-peristiwa perseteruan antara gerakan Islam politik dan pemerintah pada masa Orde Lama, menjadi memori kelam pemikiran politik Orde Baru. Akibatnya, Orde Baru menghendaki tidak adanya pengaruh Islam politik. keadaan "Islam politik" dalam posisi semakin terpinggir. Terpinggirnya Islam politik semakin mengental ketika posisi kelompok abangan dan non-Muslim kian menguat.[28] Bahkan adanya aktivitas Kristenisasi juga merupakan salah satu faktor melemahnya peran Islam.[29] Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa cukup besar sumbangan dan partisipasi umat Islam dalam menciptakan pembentukan Orde Baru, namun umat Islam sering dibuat marah oleh

[28]Hefner mencatat, selama era 1970-an dan 1980-an, telah ada semboyan di lingkungan studi-studi Indonesia bahwa ketegangan antara Islam terorganisir dengan rezim Soeharto mencerminkan konflik kultural yang sudah berusia lama. Soeharto dan Para Jendral yang ada di sekeitarnya berasal dari lingkungan Hindu Jawa yang membuatnya lebih sebagai muslim nominal (*abangan*) dan bukan sebagai muslim yang taat (*santri*). Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 153. Lebih dalam lihat, Emmerson, *The Bureaucracy in Political Context*, hlm. 96.

[29]Isu Kristenisasi dalam pangggung politik nasional ini semakin memperburuk hubungan antara pemimpin politik Islam dan pemerintahan Orde Baru. Namun, dengan alasan untuk meningkatkan stabilitas nasional, keamanan dan keharmonisan kehidupan umat beragama, pada tahun 1967 pemerintah mulai menutup lembaga missi dan zending. Lihat, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 119.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kondisi sosial-politik hasil karya rezim Orde Baru yang berakibat pada melemahnya stabilitas nasional. Kemesraan yang pernah terjalain antara umat Islam dan Orde Baru menghilang seiring dengan tidak adanya kesamaan sikap politik, kekhawatiran dan kecurigaan Orde Baru terhadap umat Islam.

Permainan kepentingan yang kompleks pemerintahan Orde Baru menunjukkan betapa terlalu sederhana, seperti dilakukan banyak pengamat, bahwa rezim ini dengan konsisten terus memusuhi Islam. Munculnya beragam kepentingan yang menentukan arah kebijakan, berimplikasi terhadap praktik kekuasaan berjalan dengan tidak konsisten.

Rusli Karim mencatat, bahwa ada dua sumber konflik yang dihadapi oleh umat Islam—sebagai kelompok mayoritas—yang pada akhirnya mengurangi peran yang harus dimainkan dalam pentas politik nasional. *Pertama,* sikap TNI terhadap Islam sejak awal sudah berniat melakukan depolitisasi Islam.[30] *Kedua,* dilema modernisasi yang belum dapat dihadapi dengan penuh keyakinan oleh umat sendiri. Modernisasi dikhawatirkan terjebak dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan arus modernisasi sama saja membiarkan diri masuk dalam kubangan ketertinggalan dan selalu terpinggirkan.[31] Kekhawatiran semacam ini sama halnya yang dialami oleh Prof. Riaz Hassan ketika membandingkan keadaan Islam di Pakistan dan Indonesia,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30]Azyumardi Azra, *Contemporary Islamic Renewal in Indonesia,* makalah dalam Konferensi Internasional tentang Islam dan Perubahan di Kuala Lumpur 7-9 Juni 1996.

[31]Muhammad Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era-1970-an dan 1980-an* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999), hlm. 117.

ia berkesimpulan bahwa modernisasi telah menghilangkan agama-agama rakyat di seluruh belahan dunia.[32]

Sepanjang kekuasaan Orde Baru, dari tahun 1976 sampai pertengahan tahun 1980-an sejumlah insiden kekerasan terjadi yang dikaitkan oleh penguasa kepada "ekstrem kanan", lalu dipergunakan sebagai alat pembenaran untuk bersikap waspada terhadap militansi Islam.[33] Beberapa kasus yang—dimata pemerintah—menempatkan umat Islam sebagai pelaku dalam gerakan-gerakan yang membahayakan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan negara, seperti gerakan "Komando Jihad" 1978,[34] pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla 1981, peledakan bom di

---

[32]*Ibid.,* hlm. 117.

[33]Frans Huuken dan Huub de Jonge (ed.), *Order,* hlm. 4-5

[34]Seperti yang dicatat oleh Hamdan Basyar dalam satu penelitiannya, dalam penjelasan setebai 12 halaman, Sudomo memaparkan kegiatan teror yang terjadi dalam kurun waktu 1976-1981. Berbagai kelompok yang menamakan dirinya "Komando Jihad". Teror yang mereka lakukan antara lain berbagai peledakan bom di Bukittinggi, Padang, dan Medan. Kemudian ada perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Warman. Kelompok yang beroperasi antara tahun 1978-1980 itu dianggap telah melakukan pembunuhan terhadap Parmanto, Pembantu Rektor I Universitas Negeri 11 Maret, dan pembunuhan mahasiswa IAIN Yogyakarta, Hasan Bauw. Mereka juga melakukan perampokan uang gaji dan "penggaringan" toko emas di Jawa Barat. Selain itu mereka menewaskan dua anggota Polri dalam kasus di Raja Polah, Jawa Barat, 28-31 Maret 1981. Dalam penjelasannya, berbagai kelompok tadi, menurut Laksamana Sudomo, mempunyai tujuan politis jangka panjang, yakni ingin mendirikan negara Islam. Belakangan diketahui, tampaknya "Komando Jihad" adalah suatu situasi khusus yang dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu. Hal ini tidak terlepas dari hasil evaluasi yang dibuat oleh Golkar, 1974-1975, untuk mempersiapkan pemilu berikutnya. Hasil evaluasi itu menunjukkan kemungkinan Golkar akan mengalami kekalahan dalam Pemilu. Karena ada kesamaan antara kejadian tahun 1977 dan tahun 1981. Sebelum Pemilu 1977, terjadi berbagai kasus yang dihubungkan dengan "Komando Jihad", begitu juga sebelum pemilu 1982 kembali terjadi peristiwa yang sekali lagi dihubungkan dengan kasus yang sama, yakni "Komando Jihad". Dalam dua peristiwa itu, Sudomo menggelar pertemuan dua kali setelah masing-masing peristiwa itu berlangsung untuk menjelaskan kejadian itu versi pemerintah. Sebelum kedua peristiwa itu pada tahun 1971, menjelang pemilu, terungkap ada gerakan gelap yang berhubungan dengan komando Jihad. Walaupun secara terbuka, Sudomo mengatakan tidak ada kaitan hubungan antara "komando Jihad" dengan partai politik, tetapi para pemimpin PPP meyakini, bahwa pengungkapan kasus "Komando Jihad" dimaksudkan untuk menjegal perolehan suara PPP dalam pemilu. Belakangan diketahui, tampaknya "Komando Jihad" adalah hasil rekayasa pemerintah. Dalam perkembangannya, Hispran, orang yang dituduh sebagai tokoh "Komando Jihad" selain mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang binaan Bakin, dia juga seorang provokator yang dibiayai oleh Ali Murtopo. Sementara itu, kelompok Imran disusupi oleh agen intel yang berusaha berkiprah untuk mendeskriditkan umat Islam

bank-bank milik Cina, dan Candi Borobudur Jawa Tengah, BCA 1985. Bentrokan antara kelompok-kelompok semacam sekte Islam di daerah dengan penguasa negara, dan protes ribuan pekerja Muslim di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, "Tragedi Tanjung Priok" 1984. Beberapa pemimpin Islam membalas bahwa insiden-insiden ini tidak mewakili masyarakat Islam seluruhnya. Yang lain menuduh bahwa pemerintahan Orde Baru memakai "agen-agen provokator" untuk menciptakan penampilan kerusuhan Islam.[35]

Disamping itu, banyak juga kebijakan politik yang dibuat bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Islam, diantaranya; *Pertama,* pengumuman rencana Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973, yang menimbulkan protes keras dari hampir semua golongan Islam, karena rancangan yang dibuat benar-benar mengabaikan ajaran Islam. Bagi Mukti Ali, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama, rancangan undang-undang itu tidak dibuat oleh Departemen Agama melainkan oleh Ali Murtopo dan kawan-kawan dibawah payung partai Golkar. *Kedua,* pembangunan tempat-tempat perjudian, tempat lokalisasi bagi para Wanita Tuna Susila (WTS), melegalisasikan perjudian terselubung melalui pungutan uang lotre melalui Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Tentu saja kebijakan ini menimbulkan reaksi yang sama kerasnya dari

---

menjelang pemilu 1982. Dan Imran sendiri pada Agustus 1982, pernah mengakui bahwa perbuatannya dilindungi oleh pejabat tinggi pemerintah. Lihat, M. Hamdan Basyar, "Komando Jihad: "Monster" Bagi Muslim Indonesia (1976-1981)," dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Militer*, hlm. 39-57, David Jenkins, *Soeharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1965-1983* (Cornell Modern Indonesia Project, 1984), hlm. 54. Lihat juga, Diane F. Orentlicher, *Human Rights in Indonesia and Est Timor* (The Asia Watch Committee, 1988).

[35]B. William Liddle,*Islam,* hlm. 69.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

umat Islam. *Ketiga,* larangan memakai "jilbab" di sekolah menengah. *Keempat,* program Keluarga Berencana (KB). Banyak kalangan umat Islam menilai bahwa kebijakan ini tidak memperhatikan ajaran Islam.[36] Pada mulanya kebijakan ini banyak ditentang umat Islam, dan akhirnya kaum agamawan mulai dilibatkan dalam perumusan metode KB ini. Sebagaimana ditulis Rusli Karim, Vatikiotis melihat, bahwa kebijakan ini adalah salah satu kesepakatan antara orang Kristen untuk mengurangi jumlah orang Islam.[37] *Kelima,* maraknya penjualan minuman keras (MIRAS), dan pemberian izin secara bebas oleh pemerintah dalam pengembangannya.

Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur yang tidak sempurna kehendak politik rakyat. Pemilihan-pemilihan itu mencerminkan proses elektoral yang dikelola serta dikontrol sangat ketat hasil rancangan pemerintah—yang kekuasaannya terutama berasal dari dukungan TNI—untuk memperlihatkan keabsahannya kepada rakyatnya dan dunia luar, sementara pada saat yang sama menghindari sejauh mungkin pertarungan nyata di antara kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.[38] Di dalam Pemilu 1971, 1977, dan 1981 partai-partai Islam mengalami tekanan berat dari rezim Orde Baru. Menjelang Pemilu 1977, banyak gerakan mahasiswa yang pemimpinnya didominasi oleh kader HMI melakukan protes, terutama mengenai pembinaan generasi muda, tentang aliran

---

[36]Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 120.
[37]*Ibid,* hlm. 120.
[38]R. Wiilliam Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Terj. Mung Katjasungkana (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 90.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepercayaan dan mengenai rancangan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Banyak pengamat menilai, bahwa Pemilu 1977 adalah pertarungan antara Islam dengan pemerintah. Hasil suara dalam pencapaian Pemilu 1977 memperolah suara diatas rata-rata partai non-pemerintah. Liddle menegaskan, bahwa Pemilu ini adalah pengulangan atas apa yang terjadi pada Pemilu 1871. Monopoli efektif pemerintah atas aktivitas politik pejabat-pejabat negara terus dilakukan.[39]

Keadaan semacam ini memaksa rezim mengambil langkah untuk membatasinya. Maka dalam pemilihan ini, intimidasi, koresi, dan represi makin banyak dilakukan rezim guna memenangkan partainya sendiri. Bahkan menurut semua komponen birokrasi dan Komandan Kodim ditugaskan untuk memenangkan Golkar,[40] sebagai usaha untuk mempertahankan Soeharto dalam masa jabatan ketiga.

Peminggiran Islam politik selama dua dekade 1970-an sampai 1980-an, secara struktural menurut Kuntowijoyo, merupakan akibat dari adanya komplotan (konspirasi) dari kekuatan politik tertentu yang hendak mengucilkan Islam.[41] Cederroth secara tegas dapat dikatakan bahwa TNI abangan jawa, kelompok minoritas Kristen dan kelompok "priyayi"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[39]R. William Liddle, *Pemilu,* hlm. 65.

[40]Strategi utama Golkar dalam pemilu-pemilu Orde Baru ialah, memobilisasi pejabat-pejabat pemerintah, yang pada gilirannya digunakan untuk memobilisasi para pendukung. Pejabat-pejabat daerah tingkat propinsi, kotamadya, dan kecamatan menerapkan tekanan kepada kepala-kepala desa untuk mengumpulkan suara bagi Golkar. Terutama di pedesaan Jawa, dimana pejabat-pejabat desa cenderung mengontrol sebagaian besar sumber-sumber nilai secara tradisional sangat dipatuhi, strategi ini sangat berhasil. *Ibid.*, hlm. 91-92. Lihat juga, Macky J.A. dan Andrew MacIntyre, "Politics", dalam Hill, H. (ed.). *Indonesia's New Order the Dynamic of Socio Economics Transformation* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), hlm. 1-53.

[41]Kuntowijoyo, "Tiga Tragedi Pergerakan Islam: Struktur, Kultur, dan Pergerakan Sosial" dalam *Republika,* 15-16 November 1996.

kebatinan bersatu menentang Islam politik.[42] Namun demikian, hingga pertengahan 1980-an bagi para aktivis Islam kehidupan beragama di Indonesia belum cukup menggembirakan. Kehidupan beragama secara formal-politis memang sudah ada, tetapi sikap terhadap agama adalah bersifat "instrumental", agama hanya sebagai "setempel" untuk pembenaran bagi program-program pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan yang seringkali dirasakan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Di samping itu, pelaksanaan ajaran agama tidak memperoleh suasana yang baik, karena terancam oleh lingkungan yang tidak mendukung.[43]

Menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang banyak merugikan itu, sampai akhir 1970-an umat Islam banyak menampilkan sikap-sikap pembangkangan (oposisi). Abdul Qadir Djaelani melihat, setidaknya ada enam kelompok yang melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintah.[44] *Pertama,* oleh para bekas pemimpin Masyumi, setelah rumusan penjelasan pelengkap Undang-Undang Dasar dan perincian hak-hak asasi manusia (yang semula telah diterima oleh Badan Pekerja MPRS ditolak oleh militer pada Sidang MPRS V, 1968). *Kedua,* penentangan terhadap rezim militer, yang dilakukan oleh bekas anggota DI/TII, 1978. *Ketiga,* para bekas pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). *Keempat,* dilakukan oleh sebagian Generasi Muda Islam yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[42]Seperti dikutip oleh Rusli Karim dalam, Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 125.

[43]M. Dawam Raharjo, *Intelektual dan Perilaku Politk Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 380.

[44]Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 128.

tergabung dalam Persedium Front Aksi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Aksi yang terjadi 20 Maret 1978, dimaksudkan untuk menentang masuknya kepercayaan P4 dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke dalam GBHN dan menentang CSIS yang berfungsi sebagai "*think tank*" rezim Orde Baru serta menentang dominasi ekonomi oleh penduduk peranakan Cina. *Kelima,* berasal dari kelompok NU, terutama dalam menghadapi pemilihan umum 1982, ketika pemerintah mengesahkan calon yang diajukan oleh kelompok Muslimin Indonesia (Parmusi).[45] *Keenam,* dari kelompok Muhammadiyah, ketika pemerintah merancang untuk menarik subsidi bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah kerena Muhammadiyah tidak mematuhi perintah libur sekolah pada bulan Ramadhan.

4. Depolitisasi Islam Politik

Rencana untuk melumpuhkan partai-partai politik secara sistematik telah dimulai sejak 1969. Bryan May mencatat, setelah meloloskan rancangan undang-undang Pemilu di DPR pada 31 Desember 1969, Soeharto memerintahkan untuk membuat persiapan kampanye. Sementara jabatan kekuasaan Pemilu telah menggariskan enam tujuan pasca-Pemilu. 1) tidak ada ideologi kecuali Pancasila; 2) partai politik hendaknya berdasarkan pada program pembangunan, bukan ide politik; 3) jumlah partai politik dikurangi; 4) diantara pemilihan-pemilihan umum dalam pembangunan, orang-orang desa berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi

[45]Ulasan cukup bagus tentang hal ini lihat, R. William Liddle, *Pemilu,* hlm. 94-95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak dalam politik; 5) organisasi-organisasi massa dipisahkan dari partai-partai politik; 6) pegawai pemerintah dikeluarkan dari partai politik dan harus taat hanya kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan lebih diutamakan daripada politik.[46]

Tahun 1976-1988 adalah masa keemasan Orde Baru,[47] dan mencapai puncaknya sejak awal 1980-an. Pada tahun-tahun itu, Orde Baru membawa Indonesia dalam puncak peningkatan ekonomi yang luar biasa. Keberhasilan Orde Baru ini, menurut Liddle tampaknya berakar kuat pada kombinasi kursi otoriter, pengelolaan politik yang lihai, dan keberhasilan ekonomi jangka panjang yang membuat relatif kedap terhadap arus perubahan jangka pendek dalam lingkungannya.[48]

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, sejak tahun 1979, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka, 7,7 persen, dan tidak pernah berada dibawah angka 5%. Presti ini kebanyakan karena karena pendapatan dari minyak, yang tetap tinggi hingga 1982, terutama dipicu olehperang Irak-Iran 1979. Pada tahun 1981, Indonesia merupakan penghasil gas alam cair terbesar di dunia.[49] Prestasi ekonomi ini kelak membawa Orde Baru dalam tuduhan tentang penyalahgunaan lisensi-lisensi impor, kontrak-kontrak negara, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[46]*Ibid.*, hlm. 73.
[47]M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 593.
[48]R. Wiilliam Liddle, *Pemilu,* hlm. 90.
[49]Mengenai presatasi ini kaum nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan terhadap donor luar sebagai alasan untuk menuntut lebih besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pemberdayaan usaha dalam negeri, dan pembatasan terhadap perusahaan asing. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah,* hlm. 594. R. William Liddle, *Pemilu,* hlm. 99-104.

peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang melibatkan putra-putri dan kerabat dekat Seoharto.

Kemajuan Orde Baru dalam ekonomi, tentu tidak sesuai dengan kemajuan yang dicapai di arena politik. Pada awal 1984, terlihat pemerintah meluaskan kampanye ideologisnya, yaitu bahwa semua organisasi sosial dan politik harus mengakui Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Organisasi keagamaan pun diharuskan mengubah AD/ART-nya dan mengakui Pancasila sebagai asas organisasi. Umat Islam sangat geram dengan kebijakan pemerintah ini. Bagi umat Islam kebijakan ini berdampak buruk. Umat Islam terpecah dalam hal bagaimana seharusnya umat Islam merespon peraturan baru tersebut. Sebagian umat Islam yakin, tujuan utama kebijakan asas tunggal adalah menghancurkan organisasi Islam.[50] Hampir semua organisasi Islam menolak diberlakukannya peraturan ini, seperti HMI yang secara tegas dalam kongresnya menolak asas tunggal.

Dalam pemilu kampanye pemerintah menghantam PPP dan tentu saja menguntungkan partai pemerintah, Golkar. Ini terutama tampak setelah tahun 1984, ketika NU menarik diri dari PPP dan menegaskan kembali ke Khittah—atau pola dasar dalam berpikir dan bertindak—1926. Dengan kembali ke Khittah 1926, NU menjadi organisasi keagamaan dan peduli pada kesejahteraan sosial, dan bukan merupakan organisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50]Syamsudin Haris, "PPP dan Politik dibawah Pemerintahan Orde Baru," dalam *Prisma* 49 (1995), hlm. 31-51.

politik.[51] Dengan ditariknya dukungan NU, dukungan umat Islam terhadap PPP menurun. Pada saat yang sama, suara umat Islam yang diraih Golkar meningkat. Para pengamat ada yang mengecam apa yang mereka sebut manipulasi rezim terhadap sistem kepartaian. Bagi banyak umat Islam, hal ini menunjukkan hancurnya partai politik Islam.

Hampir semua kenaikan suara Golkar dalam pemilu 1987 diimbangi dengan menurunnya suara PPP. Dukungan PPP merosot di 24 dari 27 propinsi. Kecuali propinsi Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur. Menurut perhitungan yang disebut ilmuwan politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, 76,7% kemerosotan pemilu PPP terjadi di "basis utama" NU, delapan propinsi dimana NU memperoleh suara lebih dari 60% dari empat partai Islam pra-fusi dalam pemilihan umum 1971. Dari seluruh pemilih PPP, 75% hidup di delapan propinsi. Lebih sempit lagi, hampir 5 juta (69%) dari hilangnya 7 juta suara yang diderita PPP di tahun 1987 dibandingkan dengan 1982 bisa diurut di tiga propinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dimana pada pemilu 1971, NU memperoleh berturut-turut 89,6%, 80,6%, dan 63,3% dari total suara yang diperoleh semua partai Islam. Enam puluh dua persen dari 13,7 juta pemilih PPP 1987 tinggal di propinsi ini. Jawa Timur—propinsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[51]Tindakan NU ini tidak didasarkan pada keinginan untuk meninggalkan politik, tapi NU yakin bahwa melawan pemerintah harus ditanggung sangat mahal. Lihat Hefner, *Civil,* hlm. 216. Keputusan NU untuk menarik diri dari politik praktis—hal serupa pernah dilakukan Muhammadiyah lebih dari satu dasawarsa sebelumnya untuk tidak mendukung Masyumi—dan menerima Pancasila, sebagai respon tekanan politik dari luar. Namun, keputusan ini menunjukkan apa yang harus diperjuangkan NU menyangkut kepentingan pendukungan dari pada harus memperebutkan kursi diparlemen. Lihat Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacan Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 115-149. Lihat juga, Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*, hlm. 233-261.

terbesar Indonesia, sumber dari 25% pemilih PPP 1987 dan jantung NU—bertanggung jawab bagi kemerosotan 32% itu.[52]

Hasil-hasil itu harus dilihat sebagai kemenangan pemerintah dan NU. Partai-Parti independen tidak pernah populer di mata Soeharto dan rekan-rekan militernya. Partai-partai Islam adalah bagaikan duri dalam daging. Budaya politik Indonesia terpecah ke dalam Muslim Saleh (sebagian besar orang luar Jawa), separuh pengusaha (secara aktual, 45%, dihitung dengan suara keseluruhan yang diperoleh partai-partai Islam dalam Pemilu 1955 yang tanpa paksaan) yang disebut *Santri,* dan separuh lagi sinkretis Hindu-Jawa birokrat yang dicap *abangan.* Sebagian besar jenderal secara kultural adalah abangan dan sangat mencurigai maksud-maksud politisi *santri,* yang dalam pandangan mereka menyembunyikan kecenderungan-kecenderungan "ekstrem-kanan" menuju transformasi Indonesia menjadi *Negara Islam.* Ingatan-ingatan beberapa pemberontakan berdasar Islam dalam tahun 1950-an dan 1960-an memperkuat kecurigaan ini.

Toleran terhadap Islam, tapi menindas secara bengis terhadap semua bentuk politik Islam adalah ciri kebijakan politik Orde Baru yang menggambarkan kebijakan politik Belanda. Kebijakan ini terus digunakan secara efektif sebagai pijakan strategis dalam langkah politik Orde Baru. Sejak awal kekuasaannya, selangkah demi selangkah Soeharto terus maju memperlemah politik partisan Islam yang berujung pada pemberlakuan

[52]Angka-angka dan beberapa analisis Arbi Sanit, Lihat Arbi Sanit, "Pergeseran Pemilih PPP dalam pemilu 1987 dan Masa Depan Perpolitikan Islam," *Panji Masyarakat,* 21 Mei 1987, hal. 66-70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pancasila sebagai asas tunggal, sebagai dasar Ideologi. Van Dijk menyebut, kondisi ini sebagai bentuk "depolitisasi" yang merupakan langkah untuk menghilangkan perbedaan ideologi dan perselisihan agama seperti yang dialami menjelang tahun 1965.[53] Untuk itu pengawasan pemerintah pusat makin ditingkatkan. Inilah yang disebut Crouch sebagai rezim "patrimonial," sebuah warisan budaya politik tradisional.

B. Formula Baru Gagasan Islam Politik

> Usaha pembaruan berhadapan dengan kenyataan dan prospek yang tidak selalu ramah. Sebagaimana dulu, ketika proses Islamisasi baru bermula, Islam yang berasal dari konteks kebudayaan asing harus menjadi dirinya, sebagai sesuatu yang sesungguhnya terkait erat dengan kebudayaan asli, maka kini dunia modern harus pula dikonversikan. Dalam polemik, hal ini merupakan salah satu aspek apologi Islam, sedangkan dalam tindakan ia mengharuskan perubahan struktural.
>
> —Taufik Abdullah[54]

> Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subyek penting, yang meski telah lalu hingga dewasa ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini makin hangat, tatkala antusiasme—untuk tidak menyebut "kebangkitan Islam"—melanda hampir seluruh dunia Islam. Pangalaman masyarakat Muslim di berbagai penjuru dunia, khusunya sejak usai Perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang canggung antar Islam (*din*) dan negara (*daulah*), atau bahkan politik pada umumnya. Secara Teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah—dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar [aturan] sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (universal), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.
>
> —Azyumardi Azra[55]

---

[53]Muhammad Rusli Karim, *Negara,* hlm. 72.

[54]Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Nasional* (Jakarta: LP3ES, 1996).

[55]Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i-1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Merumuskan Kembali Landasan Islam Politik: Belajar dari Masa Lalu

Sekarang tiba saatnya untuk mempertanyakan peranan Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai suatu kelompok strategis atau kesatuan politik dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kaum Muslim Indonesia yang tergabung dalam gerakan Islam politik sejak masa kebangkitan sampai masa 22 tahun pertama kekuasaan Orde Baru senantiasa menganggap tak ada pemisahan antara yang suci dan yang sekular dalam Islam, yang berarti bahwa agama juga berhubungan dengan masalah duniawi, termasuk dalam hal politik. Umat Islam, yang merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Islam, memang memainkan peran penting pada titik-titik kritis dalam sejarah Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh tragedi G30S/PKI. Untuk menjawab itu—sebagai studi sejarah—perlu sedikit menjernihkan posisi Islam melalui pararelisme diakronik, dengan menengok kembali peranan agama dan umatnya pada periode-periode sejarah tertentu khususnya bagaimana konfrontasi dan ketegangan Muslim (*santri*) dan Muslim (*abangan*) di mana ideologi sebagai sumber masalah tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagi Kuntowijoyo, "Semangat perjuangan umat" merupakan semboyan yang paling sering diucapkan dalam komunitas Muslim, dengan demikian memberikan makna objektif bagi kepada setiap tindakan umat. Walaupun terus bertahan, tetapi politik Islam nyatanya takkan pernah sukses di masa lalu, hal itu selalu bertemu dengan kekecewaan. H.J. Benda

dalam pengantar buku Herbert Feith mengenai pemilu 1955 berkesimpulan, bahwa Islam ternyata tak sebegitu kuat dan bahwa kekuatan politik non-Muslim ternyata berhasil memporak-porandakan "mitos mayoritas angka.[56] Itu benar, tetapi pertanyaannya yang paling penting adalah "mengapa" demikian? Kuntowijoyo menyebutnya, bahwa Indonesia atau dalam hal ini Jawa, bukanlah masyarakat Muslim yang sebenarnya.[57] Salah seorang anggota Konstituante di tahun 1957 secara berapi-api menolak anggapan bahwa Indonesia merupakan masyarakat Islam, sebaliknya ia menyatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat abangan, atau masyarakat sinkretik.[58] Umat Islam tak pernah menjadi pembuat keputusan, bahkan tidak mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, demikian halnya pada masa Orde Baru keadaan tidak berubah dari posisi sebelumnya. Dalam keadaan teralienasi ini lah , mereka lantas menjadi lawan dari siapapun yang sedang berkuasa.

Beberapa episode sejarah gerakan politik umat Islam yang telah dijelaskan di atas dapat diartikan, bahwa sesungguhnya benturan mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[56]Pengantar H.J. Benda dalam Herbert Feith, *The Indonesia Election of 1955* (Ithaca: Modern Indonesia Project, 1957).

[57] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 146.

[58]Ia (seorang anggota Konstituante) adalah seorang yang menjunjung tinggi sinkretisme dan gigih menentang Islam. Ia wakil dari Partai Gerinda, partai kecil dari kaum tradisionalis jawa. Karena sikapa blak-nlakannya berbicara sebnagai wakil dari abangan, tindakannya ini membuat marah partai-partai Islam dan membuat gembira kalangan PNI dan PKI. Atmodarminto, "Abangan Menentang Agama Islam", dalam Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), 184-188.

ideologi antara dua kelompok aliran santri dan abangan telah mewarnai gelanggang peta politik Orde Baru.[59]

Beberapa peristiwa di atas menunjukkan betapa benturan, konfrontasi dan pertentangan antara Islam-militer khususnya (dan umumnya Islam-negara) dihadapkan persoalan yang sesungguhnya menyangkut adanya politik aliran, yang sudah sedemikian mendarah daging dalam setiap generasi bangsa yang sangat beragam. Hal ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak masa kolonialisme Belanda, cuman perbedaannya, masa kolonialisme Belanda negara belum memiliki ideologi resmi sebagai acuan bersama sebagai dasar negara dan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan acuan dasar resmi negara yang mengutamakan terhadap pluraslisme dan persatuan nasional yang juga sekaligus sebagai ideologi resmi kaum tentara.[60]

Masyarakat Indonesia secara sosiologis dan kultural sangat majemuk, maka kaitan formalistik atau legalistik antara Islam dan negara tidak dapat diterima oleh semua pihak. Seperti yang dilakukan oleh para pemimpin dan aktivis awal Islam politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Variasi lebih halus dapat dilihat dari upaya mereka—melalui desakan agar Piagam Jakarta dilegalisasikan—untuk memberi wewenang kepada negara untuk melakukan kontrol atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[59]Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 79. Lebih jauh tentang hal ini baca bukunya

[60]Wawancara dengan Salim Said tanggal Senin 27 Maret 2005 Di Jakarta. Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

penerapan *syari'ah* oleh para pemeluknya. Mereka cederung berorientasi kepada teks-teks keagamaan dalam maknanya yang skriptual. Mereka berobsesi untuk mengkaitkan Islam dan negara secara formal dan legal, yang mendorong banyak dari mereka untuk mempertahankan gagasan pembentukan negara Islam sebagai tujuan politik utama mereka. Dalam pandangan mereka tujuan umum di atas (yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*) tidak dapat dicapai dalam sebuah negara yang tidak secara formal berdasarkan ideologi Islam dan/atau negara yang tidak menyatakan Islam sebagai agama resminya.

Sebagaimana terbukti, upaya tersebut tidak saja mengakibatkan kebuntuan politik tetapi juga menyebabkan posisi para aktivis Islam politik terpinggirkan dan semakin melemah. Banyak pemimpin dan aktivis Islam politik pada 1950-an dan 1960-an menggunakan doktrin diatas untuk mengembangkan dan memperluas agenda-agenda sosial dan politik mereka. Termasuk disini adalah pandangan bahwa Islam telah menyediakan bagi para pemeluknya sebuah konsep negara atau sistem pemerintahan yang lengkap. Disamping itu, sebagian dari mereka bahkan mendukung pandangan bahwa negara pada hakikatnya merupakan bagian integral, atau perluasan dari Islam.

Sebaliknya, generasi baru aktivis Islam politik yang mulai nampak dalam periode ini, menawarkan formula baru untuk merumuskan kembali Islam politik, mereka menganut pendekatan subtansialis terhadap doktrin-doktrin kemasyarakatan Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Islam Alternatif

Sejalan dengan pergulatan Islam politik dengan segala konsekuensinya di kalangan generasi muda Islam, yakni muncul pemikiran alternatif yang lebih menekankan pada penghargaan terhadap pluralitas dan penonjolan terhadap inkulusifitas agama. Pemikiran trersebut merupakan formula baru dan sekaligus respon kritis terhadap generasi tua yang melihat perjuangan Islam hanya melalui politik. Agama bagi kalngan muda Muslim ini dilihat sebagai ajaran yang memandang nilai-nilai egaliter yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan persamaan.[61]

Pemikiran ini yang berhembus sejak awal tahun 1970-an, merupakan pemikiran alternatif di tengah menguatnya Islam politik. Para pemikiran Islam ini lebih menekankan pada substansi daripada bentuk formal politik Islam. Mereka berusaha untuk membangun sebuah wacana politik Islam dalam konteks keindonesiaan yang plural dan heterogen. Oleh sebab itu wacana keislaman yang dikembangkan oleh kelompok ini lebih inklusif (sangat menekankan pada sosialisasi nilai-nilai universal).

Tidak seperti kelompok yang menampilkan Islam secara formalistik-legalistik (negara Islam), kelompok ini menawarkan pemahaman keislaman yang lebih terbuka dan lebih tertarik pada usaha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[61]Msykuri Abdillah, *Demkokrasi di Persimpangan Makna, Respons Inteltual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1999).

menanamkan nilai-nilai keislaman daripada memunculkan lembaga dengan label Islam, apalagi untuk mendirikan negara Islam.[62]

Agenda tersebut secara tidak langsung berusaha menyusun strategi perjuangan Islam di tengah depolitisasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini berbeda yang dilakukan oleh kalangan Islam politik yang berusaha mempertahankan idealisme perjuangnnya yang eksklusif di tengah kehendak penguasa yang begitu kuat. Model perjuangan ini tidak terlepas dari pemahaman keagamaan mereka yang memahami Islam sebagai agama yang mencakup segala hal termasuk masalah politik. Baginya, Islam dan politik merupakan satu kesatuan (holistik) yang harus diwujudkan dalam sebuah lembaga resmi.[63]

Pemikiran yang cukup menantang mainstream waktu itu adalah penolakan terhadap gerakan Islam politik yang kemudian diformulasikan dalam sebuah slogan "Islam Yes, partai Islam No". Jargon ini memiliki makna yang cukup mendalam bagi upaya merekonstruksi terhadap pemikiran Islam yang berkembang.[64]

Dalam konteks praktik politik, jargon tersebut secara tidak langsung merupakan kritik terhadap eksistensi partai politik Islam yang berasaskan Islam. Lebih jauh pemikiran tersebut ingin membongkar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[62] Pemikiran Islam alternatif ini lebih menekankan pada penghargaan terhadap pluralitas, keadilan, dan terciptanya masyarakat madani (*civil society*). Robert W. Hefner, "A Muslim Civi Society? Indonesian Reflections on the Conditions of its Possiibility", dalam Robert W. Hefner (Peny.) *Democratic Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal* (London: Transaction Publisher, 1998). Mengenai gagasan-gagasan Islam alternatif lebih jauh lihat Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatuf* (Bandung: Mizan, 1991).

[63]Bahtiar Effendy, *Islam,* 126.

[64]A. Bakir Ihsan, *Perubahan Hubungan Islam dan Militer di Indonesia 1990-1998,* tesis S2, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2000, hlm. 53.

monoloyalitas yang ditunjukkan oleh umat Islam terhadap partai Islam yang waktu itu hanya diwakili oleh PPP. Untuk itu, umat Islam tidak harus terkonsentrasi pada satu partai. Bagi mereka nilai-nilai keislaman bisa di tampakkan melalui berbagai wahana tanpa harus mengalami dilema teologis.

Di samping itu, jargon tersebut bias bermakna desakralisasi partai politik. Kecenderungan yang menguat saat itu adalah persepsi bahwa parpol yang berideologikan Islam dianggap sakral, oleh sebab itu terkandung keharusan untuk mencoblosnya. Desakralisasi politik ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam tidak menyediakan model yang jelas tentang politik Islam, apalagi negara Islam.[65]

Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan adanya inklusifitas yang menghargai adanya pluralisme di kalangan umat Islam dalam menilai keberadaan partai politik. Bahkan muncul pemikiran agar PPP menjadi inklusif yang menerima semua golongan tanpa membedakan agama maupun sosial budaya untuk terlibat ke dalam partai ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Gerakan Pembaruan "Pemikiran" Islam Politik

Setelah lama terpinggirkan dari arena politik, gerakan Islam politik menampakkan wajah barunya dalam menterjemahkan dan mengartikulasikan ide-ide politik mereka. Situasi krisis yang selalu menekan Islam politik telah mendorong kalangan generasi baru Islam untuk mencari berbagai bentuk sikap yang lebih moderat dan lebih modern

[65] William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas* (Jakarta: Srigunting, 1997), hlm. 188.

sebagai alternatif untuk dapat terakomodasinya kepentingan Islam politik khususnya dalam menjalin dan sekaligus meredam kecurigaan militer dan pemerintah menuju kerah kebangkitan yang lebih maju dan terarah sesuai dengan kepentingan dan nafas suatu zaman. Segala usaha yang dilakukan generasi baru Islam ini nampak jelas seperti yang dianjurkan oleh Mohammed Arkoun:

> ...kita harus mengakui bahwa empat abad pemikiran Islam tidak berdenyut sebagaimana pemikiran Islam Eropa. Tidak semua yang dihasilkan oleh Eropa selama ini baik, ... mereka hanya bergerak. Mereka mengalami perubahan-perubahan. Semenatra kita [umat Islam] tak tahu bahwa telah terjadi perubahan! Kita hanya mengulang-ulang sikap akal-religius skolastik yang konservatif, sebagaimana yang digunakan selama Abad Pertengahan, tanpa bergeser sedikit pun dari posisi ini ke posisi yang modern.[66]...bahwa kita harus mengkritik modernitas di Barat. Kita pun harus mengkritik apa yang kita lakukan di masyarakat-masyarakat [muslim] kita. Kita harus mengkritik kedua-duanya, untuk bergerak dengan langkah lain yang [lebih] maju.[67]

Untuk alasan-alasan seperti itu muncullah suatu Islam politik dengan format baru yang menjadi penggerak kebangkitan Islam politik di Indonesia. Hal ini sebagai upaya penyelesaian masalah ketidak harmonisan antara Islam dan militer. Sejauh ini upaya-upaya tersebut ternyata dilakukan terutama melalui pernyataan pemikiran dan tindakan politik Islam baru yang dipandang lebih sesuai. Para aktivis Islam yang sejak awal 1970-an berusaha mengembangkan gagasan ini di mana substansi, bukan bentuk, merupakan titik tekan utamanya. Seperti yang ditulis Bahtiar Effendy, ada tiga hal yang dilakukan oleh generasi baru Islam politik ini.[68]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[66]Mohammed Arkoun, "Menuju Pendekatan Baru Islam," *Ulumul Qur'an,* Vol. II, No. 7, 1990, hlm. 82-86.

[67]*Ibid.*

[68]Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 125.

Pertama. **Pembaruan teologis/keagamaan**. Terlepas dari kenyataan bahwa, seperti yang telah digambarkan dalam bab terdahulu, masalah teologi telah membawa kekalahan terhadap Islam politik. Jika diamati dinamika politik Indonesia pasca kolonial, tampak bahwa politisi Muslim mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam mensintesiskan tentang landasan teologis mereka ketika dihadapkan dengan kenyataan yang ada. Hal ini khususnya berkenaan dengan upaya mereka untuk merumuskan hubungan antara Islam dan negara yang dapat diterima secara nasional. Berbagai episode politik menunjukkan bahwa upaya untuk membangun hubungan formalistik dan legalistik antara Islam dan sistem politik negara selalu berakhir dengan kebuntuan, perumusan ideologis dan politis yang meruncing, dan bahkan dengan kekerasan.

Dengan latar belakang itu, para aktivis Islam baru menyerukan pembaruan pemikiran Islam dan penyegaran kembali pemahaman keagamaan kaum Muslim. Dalam konteks sejarah Islam Indonesia modern, hal ini bukan sama sekali agenda baru. Beberapa proposisi pokok mereka mirip dengan apa yang pernah dikemukakan Soekarno, yang pada dekade 1930-an menyerukan pandangan bahwa Muslim Indonesia harus menemukan kembali "api Islam," bukan sekedar memahami pesan-pesan Islam dalam pengertian literal dan tekstual.[69]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[69]Mengenai pandangan-pandangan Soekarno tentang Islam, lihat *Surat-Surat Islam dari Endeh* (Bandung: Persatuan Islam, 1936), yang dicetak ulang dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Vol. I (Jakarta: Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 325-344. Lihat juga M. Thalib dan Haris Fajar (ed.), *Pembaharusan Faham Islam di Indonesia: Dialog Bung Karno-A. Hassan* (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1985).

Gerakan pembaruan teologis ini berpusat di kalangan tokoh-tokoh yang lebih muda di Jakarta, seperti Djohan Effendi, Mansyur Hamid, Ahmad Wahid, dan—dalam beberapa hal—M. Dawam Raharjo. Namun demikian, titik paling menentukan dari gerakan pembaruan teologis ini bermula dari gagasan Nurcholis Madjid, dengan jarginnya "Islam Yes, Politik No."

Kedua. **Reformasi Politik/Birokrasi**. Para aktivis Muslim yang mendukung posisi ini berkeyakinan bahwa masalah tidak harmonisnya hubungan antara Islam politik dan militer (negara), beserta akibat-akibatnya yang dirasakan oleh para aktivis politik Islam, dapat perlahan-lahan diatasi dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam arus utama proses-proses politik dan birokrasi negara.[70] Meskipun hanya sedikit di antara para pendukung aliran ini yang memiliki kemampuan untuk melihat masalah ini dalam perspektif seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh aliran pertama. Gagasan reformasi politik/birokrasi ini juga dibangun atas pertimbangan-pertimbangan teologis dan politis tertentu.

Dalam pandangan aliran ini, Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini, yang penting untuk dilakukan adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Melainkan, keduanya harus dipandang sebagai

[70]Wawancara Bahtiar Effendy dengan beberapa tokoh terkemuka seperti, M. Dawam Raharjo, Hartono Marjono, Djohan Effendy, Sulastomo, Ridwan Saidi, antar Agustus-September 1991. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 152.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saling melengkapi. Pandangan ini tumbuh dari pemahaman religio-politik bahwa setiap sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.[71]

Pengikut aliran ini di antaranya adalah Dahlan Ranuwiharjo, mantan Ketua Umum HMI, 1951-1953. Awal 1950-an, dengan tegas mendukung posisi politik yang menentang penghadapan Islam dengan Pancasila. Kemudian pada 1970-an diikuti oleh Mintardja dan Sulastomo, masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parmusi. Kemudian langkah pendahulu mereka diikuti oleh para mantan aktivis HMI dan Parmusi, termasuk antara lain Sularso, Bintoro Tjokroaminoto, Barli Halim, Bustanul Arifin, Madjid Ibrahim, Norman Razak, Zainul Yasni, Omar Tusin, Sa'adillah Mursid, Mar'ie Muhammad, Hariry Hadi, dan sebagainya.

Ketiga. **Transformasi Sosial**. Dilihat dari perspektif rekonsiliasi politik antara Islam dan negara yang diperjuangkan gerakan pembaruan, pernyataan-pernyataan aktivis aliran transformasi sosial ini lebih kompleks—dan karenanya lebih sulit—dipaparkan. Karena kompleksitas terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi kepada masyarakat.[72] Selanjutnya, kompleksitas itu juga terletak pada nada politisnya yang tampak mengarah kepada pembentukan masyarakat

[71]Argumen ini sejalan dengan argumen Muhammad Nastir, Dalam pidatonya yang terkenal di depan Pakistan Institute of World Affairs di Karachi pada 1952, ia menyatakan bahwa Pancasila sejajar dengan Islam. Bahkan Ia juga mensejajarkan Indonesia dengan Pakistan sebagai sebuah negara Islam terutama karena Indonesia menerima Pancasila sebagai dasar negara. Lihat *Ibid.*, 153-154. Hal yang sama juga di sampaikan K. H. Ahmad Siddiq, salah satu tokoh NU dalam muktamar ke-27 pada tanggal 8-12 Desember 1984 bahwa, Pancasila dan Islam sebagai dua kesatuan yang terpisah namun tidak saling bertentangan. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi sedangkan Islam adalah agama. Lihat, Andree Feillard, *NU,* hlm. 242-243.

[72]Lihat A.M. Fatwa, "Transformasi Nilai Islam dalam Kepemimpinan Nasional," *Ummat,* No. 18 Tahun 1, 4 Maret 1996, hlm. 82.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang kuat *vis-à-vis* negara, dan tidak sekedar diarahkan pada rekonsisliasi politik aliran Islam dan negara. Yang jelas, sikap kritis aliran transformasi sosial ini berjalan dalam arah yang bertentangan dengan pendekatan yang ditempuh aliran pembaruan teologis/keagamaan dan reformasi politik/birokrasi, yang dalam orientasinya tampak kurang kritis dan lebih akomodasionis.[73]

Pada awal 1970-an, Sudjoko Prasodjo dan M. Dawam Raharjo adalah dua diantara tokoh-tokoh menonjol yang menakhodai program-program transformasi sosial. Berikutnya disusul oleh Adi Sasono pada penghujung tahun 1970-an. Dawam menyuarakan agenda-agenda sosialnya melalui Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, selanjutnya mendirikan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Adi lewat Lembaga Studi Pembangunan (KSP). Pada 1980-an disusul oleh kader NU Abdurrahman Wahid, yang bahkan menjadi aktor utamanya.[74]

4. Kebangkitan Islam Politik

Orientasi kebijakan politik pemerintah Orde Baru yang menempatkan Islam pada posisi yang kurang menguntungkan telah mendorong para intelektual dan aktivis Islam politik baru tentang strategi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[73]Tentang gerakan pembaruan intelektual Islam selengkapnya, lihat Bahtiar Effendy, *Islam.* 125-173. Lihat juga Kuntowijoyo, *Paradigma.* Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah*, Harun Nasution, *Isalam Rasional: gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), M. Amien Rais (ed.), *Islam Indonesis* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), Budy Munawar Rahman (ed.), *Konstektualisasi Doktrin Islam dan Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994).

[74]Sepintas ide-ide pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hal ini, lihat Abdurrahman Wahid, "Gagalkah Para Pemimpin Islam?," *Panji Masyarakat,* No. 393, hlm. 50. 1983.

dan pendekatan yang harus ditempuh. Terjadinya proses peminggiran Islam politik melahirkan sejumlah perlawanan dan berbagai bentuk pemberontakan di kalangan segolongan umat Islam. Tidak jarang, akibat terjadinya ketidakseragaman antara Islam politik dan kebijakan negara melahirkan situasi yang saling berhadap-hadapan secara diametral antara Islam dan militer. Ketiga model pembaruan diatas (pembaruan teologis/keagamaan, reformasi politik/birokrasi dan transformasi sosial), yang bercirikan *integrasionisme* dan *akomodasionisme* adalah pendekatan yang secara efektif mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Islam politik masa kini.

Bagi kalangan generasi pembaru Islam politik pembubaran Masyumi oleh Soekarno, yang diikuti oleh penahanan beberapa tokohnya, ketidaksetiaan pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi Masyumi untuk memimpin Parmusi, peleburan entitas Islam ke dalam entitas politik tunggal PPP, dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik—semua dipandang sebagai bukti posisi kemunduran politik umat Islam.

Sejarah panjang corak hubungan politik yang tidak harmonis itu telah memungkinkan bagi para pembaru pemikiran politik Islam untuk membuat terobosan dan strategi menuju awal kebangkitan Islam politik untuk memilih akses yang mudah melalui akses kepada kekuasaan.[75]

---

[75]Hal ini terutama ditandai oleh pembangunan masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan aktivitas-aktivitas dakwah yang disponsori oleh negara. Yang lebih menarik, sejak dekade 1980-an hampir seluruh kantor departemen memiliki masjid atau mushalla sendiri. Sejalan dengan itu, aparat-aparat birokrasi yang Muslim juga makin lama makin merasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun tidak ada kaitan politik yang formal dan legal antara Islam dan negara, mereka sepenuhnya percaya bahwa bentuk negara-bangsa Indonesia dewasa ini—dengan pancasila sebagai dasar ideologinya—cukup memadai untuk mengakomodasi penerapan ajaran-ajaran sosial-politik Islam. Dengan kata lain negara—setidaknya secara teoritis—memberi kesempatan dan peluang bagi penerapan idealisme sosial-politik Islam.

Jelasnya, bersamaan dengan kekerasan militer terhadap gerakan Islam politik, generasi pembaru pemikiran Islam telah melakukan kinsolidasi atas ide-idenya sejak tahun 1970-an hingga mendapatkan ruang-ruang politik secara bebas dan nyata pada penghujung tahun 1980-an. Sikap politik atas konsep yang diusung oleh generasi baru Islam ini secara poisitif mendapat respon pemerintah. Ini adalah awal bagi kebangkitan Islam politik di Indonesia dan terus berkembang secara fantastis dalam tahun-tahun berikutnya pada 1990-an. Kiranya, melalui gerakan pembaruan pemikiran arah strategi dan pendekatan inilah "perilaku" Islam politik—yang telah dimotori oleh Nurcholis Madjid—telah membawa Islam politik berada dalam arah dan posisi yang lebih memuaskan dan menguntungkan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, semarak keislaman dalam pentas politik nasional telah melahirkan sesuatu yang menjadikan umat Islam berkeyakinan kearah positif bagi

---

terbuka dengan keislamannya. Hal ini dengan pengertian bahwa mereka tidak canggung lagi menunjukkan keberagamaan mereka di depan publik, baik dalam konteks ritual maupun sosial-politik. Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam*, hlm. 261.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkembangan Islam politik di masa depan, khususnya perubahan bagi hubungan gerakan Islam politik dan militer di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

HARMONISASI ISLAM - MILITER: TANGGAPAN AKOMODATIF NEGARA ATAS GERAKAN ISLAM POLITIK (1990-1998)

> Penting untuk diamati bagaimana generasi muda Islam sekarang ini berpikir. Penting, karena ia mewakili apa yang dinamakan kesadaran kolektif, respon, atau kesaksian zaman dari sebuah generasi yang berada pada masa peralihan dari masyarakat agraris ke zaman industri. Kita melihat bahwa ada keinginan besar dari generasi muda Islam untuk melihat masa depan Islam sebagai kekuatan sosial, kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Gejala ini adalah suatu gejala baru yang menggembirakan. Ini mungkin disebabkan karena adanya suatu semangat intelektual yang mereka miliki, sehingga memungkinkan mereka berpikir tentang hal-hal besar dan relevan mengenai masa depan umat, pembangunan bangsa, dan lain-lain, secara jenial. Mereka tengah mencoba menerjemahkan Islam dalam konteks yang aktual, dalam bahasa yang baru, serta mencoba merumuskan norma-norma Islam ke dalam berbagai konsep. Sekali lagi perlu dikatakan bahwa ini merupakan perkembangan yang jenial.
>
> —Kuntowijoyo[1]

Setelah melalui masa-masa sulit akibat segala bentuk peminggiran dari panggung kekuasaan Orde Baru (1966-1988), Islam telah menampakkan wujudnya. Islam tidak merasa asing lagi untuk masuk dalam wilayah jarring-jaring pusat kekuasaan. Sepuluh tahun terakhir kekuasaan Orde Baru (1989-1998), adalah masa kejayaan bagi Islam politik. Islam menjadi mitra dalam percaturan politik dalam menentukan kebijakan penting dalam urusan publik. Inilah—paling tidak—yang disebut dengan tanggapan integratif negara atas kepentingan Islam politik.

Bab ini akan mengulas secara lebih rinci tentang bentuk-bentuk tanggapan integratif negara itu, yang pada gilirannya merubah wajah

---

[1]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Mizan: Bandung, 1998), hlm. 185.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"kegarangan" militer ketika berhadapan dengan Islam politik; dari kemajuan hubungan Islam-militer dan negara, harmonisasi antara keduanya, yang selanjutnya terjadi pergeseran peran militer dari abangan-nasionalis ke militer santri, hingga pada bentuk-bentuk akomodasi Islam politik menyangkut kebijakan bagi kepentingan umat Islam secara keseluruhan

A. Kearah Kemajuan Hubungan Islam-Militer dan Negara

Seperti telah dikemukakan pada bab-bab yang lalu, karena idelaismenya dalam perjuangannya untuk meletakkan Islam sebagai landasan ideologi negara dan tekadnya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara telah membuahkan kekerasan demi kekerasan yang ditunjukkan militer terhadap gerakan Islam politik generasi awal. Kecurigaan yang terus menerus antara kedua beiah pihak telah menguras energi yang berkepanjangan. Kegagalan mencapai tujuan itu, yang sebagiannya disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua umat Islam mendukungnya, hal ini mengakibatkan berlangsungnya hubungan politik yang tidak harmonis antar Islam dan militer.

Hubungan yang tidak harmonis itu berdampak luas, Puncaknya, akses para aktivis Islam politik ke koridor kekuasaan menyusut drastis dan posisi politik mereka merosot terutama sepanjang 22 tahun pertama kekuasaan Orde Baru. Beberapa ilustrasi yang secara jelas memperlihatkan kekalahan Islam politik itu adalah: di tolaknya pengesahan status hukum Piagam Jakarta pada sidang DPR (1968); tidak diperkenankannya tokoh-tokoh penting bekas Masyumi untuk memimpin Parmusi, partai yang dibentuk untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggantikannya (1968); dibatasinya jumlah partai politik Islam dari empat (NU, MI, PSII, dan Perti) menjadi satu, PPP (1973); berkurangnya jumlah wakil-wakil Islam dalam parlemen dan kabinet; dan, lewat pengasastunggalan Pancasila, tidak dibolehkanyya Islam sebagai asas organisasi sosial dan politik (1984). Yang lebih menyedihkan itu semua, adalah Islam politik telah menjadi sasaran kecurigaan ideologis. Oleh negara, para aktivis Islam politik sering dicurigai sebagai anti terhadap ideologi negara Pancasila.

Situasi yang tidak menguntungkan semacam itulah yang ingin diatasi oleh generasi baru pemikir dan aktivis Muslim yang muncul pada awal 1970-an. Yang menjadi penekanan mereka sesungguhnya adalah upaya untuk mentransformasikan idealisme dan aktivisme para aktivis Islam awal yang bercorak legalistik-formalistik dan eksklusif menjadi suatu pendekatan politik yang lebih subtantif-integratif dan inklusif. Dengan mengubah format Islam politik, termasuk merumuskan kembali landasan teologis, tujuan dan pendekatannya yang baru, diyakini bahwa posisi Islam politik—bukan dalam pengertian kategoris—(yaitu "Islam sebagai kategori politik"), tetapi lebih dalam pengertian inspirasionalnya—perlahan-lahan dapat dinaikkan kembali. Yang lebih penting lagi, diharapkan pula bahwa dengan strategi semacam itu, sintesis politik yang sesuai antara Islam, militer dan negara dapat benar-benar diwujudkan. Hal itulah yang dapat memungkinkan Islam berfungsi sebagai rahmat tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harapan-harapan semacam itu tampaknya mulai menjadi kenyataan. Meskipun cita-citanya yang paling tinggi, yakni terbinanya hubungan politik yang harmonis dan saling melengkapi antara Islam dan negara, mungkin belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Ada beberapa isyarat penting yang mengindikasikan masuknya kembali Islam politik (dengan formatnya yang baru) dan harmonisnya hubungan antara Islam dan negara dalam kehidupan politik negeri ini. Salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan terakhir memasuki periode 1989-1990-an adalah melunaknya politik negara dengan kekuatan militernya terhadap Islam, hal itu ditandai dengan beberapa kebijakan negara yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Mengingat corak politik antara Islam dan militer dimasa lalu, dapat dikatan sangat tidak mungkin langkah-langkah akomodatif semacam itu diterapkan pemerintah Orde Baru—suatu periode dimana Islam politik masih dipandang, terutama oleh negara, sebagai sesuatu yang secara ideologis non-integratif, jika bukan ancaman.

Sikap-sikap akomodatif negara terhadap Islam politik dewasa ini sesungguhnya tidak hanya disandarkan hanya kepada satu faktor.[2] Konteks

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2]Kebanyakan pengamat melihat bahwa akomodasi Islam politik yang dilakukan Soeharto karena:1) untuk menarik dukungan umat Islam menjelang suksesi 1993 ; dan 2) makin melemahnya kontrol Soeharto atas kelompok militer, bersama-sama birokrasi dan Golkar, yang selama ini menjadi tulang punggung pemerintahan Orde Baru. Bila akomodasi itu ini tidak dilakukan sangat menggoyang posisi Soeharto sebagai presiden dalam periode berikutnya. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 311, R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 75-81, Hefner menyebutkan, bahwa Soeharto telah melakukan lebih dari sekedar meningkatkan partisipasi umat Islam dalam politik elite Soeharto sedang mamainkan kartu Islam untuk menghadapi kalangan militer dan gerakan prodemokrasi yang telah menentang kekuasaanya. Politik Orde Baru tampak tidak akan pernah sama. Robert W. Hefner, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1995), hlm. 225. Anhar Gonggong termasuk dalam aliran pendapat ini, menurutnya,

sosial-politik di mana fenomena itu berlangsung tentu saja juga turut berperan dalam perkembangannya. Meskipun demikian, dari perspektif yang melandasi studi militer ini, saya akan mengajukan pandangan bahwa berubahnya sikap militer terhadap Islam politik karena didorong oleh perubahan sikap negara terhadap Islam, dan berubahnya sikap negara pada Islam politik disebabkan oleh adanya transformasi intelektual, gagasan, pemikiran, dan praktik politik Islam itu sendiri. Tanpa transformasi intelektual tersebut—yakni jika para aktivis Islam politik masih tetap menyuarakan gagasan negara atau ideologi Islam—sulit dibayangkan bahwa tanggapan-tanggapan akomodatif itu akan muncul, dan rasanya kekerasan dan represifitas militer atas gerakan Islam politik mustahil akan berhenti. Militer yang selama ini sebagai "buldozer" pembangunan rezim Orde Baru telah menunjukkan sikap kooperatif seiring dengan melunaknya negara yakni presiden Soeharto atas kebijakan represifnya terhadap gerakan Islam politik. Salim Said berpandangan, bahwa perubahan sikap itu terjadi karena Orde Baru melihat Nurcholis Madjid dkk., (dari kelompok pembaru) dianggap tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Islam yang keras tetap dimata-matai oleh Soeharto. Soeharto merasa lebih aman berhubungan dengan Islam yang seperti itu.[3] Oleh krena itu, perubahan Soeharto dalam melihat Islam juga mendorong berubahnya sikap militer kepada Islam. Bila mengacu kepada pendapat Liddle bahwa:

---

sebelum kejatuhannya Soeharto telah menggunakan Islam melalalui Habibi dengan ICMI. itu dilakukan hanya untuk keuntungan Suharto. Islam tidak mendapat keuntungan apa-apa. Apabila suharto membuka dan orang mau masuk, Soehartolah yang eksis tapi Islamnya hilang. Wawancara dengan Anhar Gonggong, Rabo, 22 Maret 2006 di Jakarta.

[3]Wawancara dengan Salim Said, Senin, 27 Maret 2006 di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

> .... yang berkuasa di Indonesia sebetulnya adalah TNI. Banyak teman saya tidak sependapat dengan itu. Mereka menyatakan bahwa Soeharto yang berkuasa dan TNI seperti kekuatan-kekuatan yang lain dimanfaatkan oleh Soeharto. Saya lebih suka melihat dari segi lembaga. Bagi saya lembaga yang berkuasa di Indonesia adalah TNI dan presiden Soeharto adalah pemimpinnya.[4]

B. Harmonisasi Hubungan Islam-Militer

Beberapa peristiwa kekerasan—yang telah disebutkan—yang dilakukan militer terhadap umat Islam, karena umat Islam dianggap telah melawan arus kepentingan militer dan kebijakan negara. Hal ini memunculkan kesan negatif dimata militer. Ironisnya, kesan ini terus dipelihara oleh militer, sehingga nilai historis yang menunjukkan adanya kesatuan antar umat Islam dengan militer, seperti yang ditunjukkan umat Islam melawan G30S/PKI, runtuhnya Orde Lama, dan menyongsong kebangkitan Orde Baru—menjadi hilang begitu saja. Kenyataan ini merupakan deviasi historis yang dipicu oleh banyak faktor. Bahkan ada kesengajaan dan rekayasa dari militer untuk mengeruhkan suasana yang berlangsung dikalangan umat Islam, khususnya menyangkut tersumbatnya aspirasi umat Islam.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerenggangan dan peminggiran terhadap kelompok Islam oleh pihak militer. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang menyebabkan terpinggirnya Islam politik adalah: *Pertama,* dominasi kelompok militer abangan dan Kristen di jajaran elite militer. Keadaan kelompok ini sangat berpengaruh terhadap langkah dan

---

[4]R. William Liddle, *"Menjawab Tantangan Masa Reformasi"*, Makalah yang untuk Konferensi Indonesia's Road to Recovery II: Redefining Nationalism to Rebuild the Nation, Berkeley, CA, 27 Mei, dimuat dalam *Kompas,* 8 Juni 2000, hlm. 4-5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aktivitas gerakan Islam politik. Nazaruddin Syamsudin menegaskan, ada kesengajaan dari militer (negara untuk menampilkan militer dari kelompok non-Muslim dan abangan. Menurutnya, hal ini dinyatakan langsung oleh T.B. Simatupang, mantan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) ketika berada di Australia pada tahun 1960-an, bahwa porsi dalam proses seleksi penerimaan militer diutamakan dari non-Muslim dan abangan.[5] Pembersihan terhadap tentara Muslim yang terlibat dalam pemberontakan pada tahun 1950-an juga memberi kontribusi terhadap ketidak seimbangan presentasi antar Islam dan Kiristen.[6] *Kedua,* adanya kegairahan sebagian kalangan Islam politik menampilkan Islam secara formalistik-legalistik dan eksklusif yang di mata Orde Baru dianggap bertentangan Pancasila dan sekaligus menjadikan Islam sebagai ideologi dasar negara. Perjuangan untuk menegakkan ideologi Islam yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta pada gilirannya melahirkan ketakutan dan kekhawatiran dari kalangan nasionalis dan militer.[7]

Walaupun secara historis ada kedekatan antara umat Islam dan militer, tetapi dalam perkembangannya. Khususnya dalam masa Orde Baru, militer dikuasi oleh kelompok Kristen dan abangan. Menurut David Jenkins, masuknya beberapa orang orang militer yang sangat dekat dengan Soeharto yang *notabene* abangan dan non-Muslim,[8] diantaranya adalah Ali Moertopo,[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Lihat A. Bakir Ihsan, *Perubahan Hubungan Islam dan Militer di Indonesia 1990-1998,* tesis S2, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2000, hlm. 105.

[6]Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 242.

[7]Din Syamsudin, *Jendral TNI Faisal Tanjung, ABRI-Islam Mitra Sejati* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 25.

[8]David Jenkins, *Soeharto and His Genaral Indonesia Military Politics 1975-1983* ((Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia, 1987)

Soedomo,[10] dan LB. Moerdani.[11] Dalam perjalanannya ketiga orang ini memiliki peran yang sangat dominan dan strategis selama Orde Baru.

Peran kelompok abangan didalam tubuh militer yang lebih dekat dengan kelompok Kristen daripada kelompok Islam ini bisa dilihat pula dalam atmosfir yang tercipta dalam lembaga pendidikan militer di Magelang. Menurut Peter Bitton, suasana pendidikan militer di Akabri secara umum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa abangan (kejawen).[12]

Tidak heran apabila beberapa kasus radikalisme di kalangan umat Islam berlangsung pada saat militer dikuasai oleh kedua kelompok, yakni abangan dan non-Muslim tersebut. Walaupun tidak ada kebijakan khusus yang dibuat oleh militer berdasarkan agama, tetapi ia memiliki pengaruh yang secara *de facto* tidak terlihat tetapi terasakan.

---

[9]Ali Moertopo merupakan arsitek hampir seluruh kebijakan politik Orde Baru. Ia adalah tangan kanan (Aspri bidang politik) Soeharto. Moertpo yang lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1924 ini memiliki kedekatan dengan Soeharto sejak di Kodam Diponegoro. Ketika Soeharto menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro dengan pangkat kolonel, Moertopo ditempatkan sebagai Deputi Asisten V yang menangani masalah teritorial dengan pangkat kapten. Keduanya kemudian ditugaskan di Jakarta di Cadangan Utama Angkatan Darat (Tjaduad) yang kemudian dikenal dengan nama Kostrad. Pada saat Soeharto menjadi presiden, Moertopo yang berpangkat kolonel diangkat menjadi staf pribadi presiden (Aspri).

[10]Soedomo oleh sebagian kalangan dianggap sebagai orang yang *Islamphobia*. Walaupun bukan dari AD, Soedomo yang lahir di Malang pada tanggal 20 September 1926 ini termasuk diantara orang-orang dekat Soeharto. Beberapa pos penting diraihnya sejak awal Orde Baru. Mulai dari jabatan KSAL (1969-1973), Wakil Pangkopkamtib (1973-1974), Kaskopkamtib (1974-1981), Pangab/Pangkopkamtib (1982-1983), Menteri Tenaga Kerja (1983-1987), sampai terakhir sebagai ketua DPA. Pada tahun 1998, Soedomo yang beragama Kristen Protestan ini, menyatakan diri masuk agama Islam.

[11]LB Moerdani merupakan soal lain, selain Ali Moertopo dan Sudomo, yang memilki kedekatan dengan Soeharto. Beberpa peristiwa yang melibatkan sikap radikal umat Islam terjadi pada saat pria kelahiran Cepu 2 Oktober 1932 ini menjabat sebagai Pangab/Pangkopkamtib sejak tahun 1983-1988. Sebelumnya (1974-1983), ia sebagai asisten inteljen Hankam. Kedekatannya dengan Soeharto sejak ia menjadi staf operasi Kostrad pada tahun 1965 di saat Soeharto sebagai Panglima.

[12]Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1996). hlm. 161.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan Muslim sipil, tetapi juga oleh kalangn militer yang memiliki latar belakang keislaman yang cukup kuat.[13] Menurut salah seorang nara sumber di jajaran perwira tinggi, bahwa ketika ia menjadi perwira ada perlakuan diskriminatif yang sulit dibantah, tetapi sulit untuk dibuktikan.[14]

Begitu pun dalam melihat Islam. Keberadaan elite militer yang didodiminasi kalangan abangan dan non-Muslim telah menciptakan sebuah kondisi sistematis untuk melihat secara negatif terhadap umat Islam. Menurut militer yang *notabene* Muslim, para elit militer telah memahami secara salah terhadap aktivitas keagamaan umat Islam. Jilbab, misalnya, dipahami sebagai sebuah rangkaian dari kegiatan yang akan mengarah pada usaha pendirian negara Islam. Oleh sebab itu, fenomena pemakaian jilbab tidak terlepas dari pengawasan militer. Akhirnya, pemahaman yang salah mengenai jilbab berakibat pada pelarangan pemakaian jilbab dikalangan para pelajar. Bagi militer yang memiliki pemahaman keislaman yang cukup, opini yang salah terhadap jilbab bisa dinetralisir.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13]Seperti Jendral (Purn) A.H. Nasution, seorang Jenderal Santri kelahiran Sumatera Utara, seorang yang dikenal Muslim taat itu terasing dari dunianya. Tanpa alasan yang jelas—orang yang mempunyai jasa besar atas kenaikan Soeharto itu—ia dicekal selama 22 tahun sejak Soeharto menjabat sebagai Presiden. Kemudian ia dibebaskan dan bahkan mendapat gelar Jenderal Besar berbintang lima. Lihat Drs. Wimanjaya K. Liotohe, *10 Dosa Besar Soeharto* (Jakarta: Upaya Warga Negara, Tanpa tahun), hlm. 8.

[14]Bakir Ihsan tidak secara jelas menyebutkan siapa perwira yang dimaksud, lihat A. Bakir Ihsan, *Perubahan,* hlm. 107.

[15]Menurut Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid dalam wawancaranya dengan A. Bakir Ihsan pada tanggal 29 Mei 2000, pandangan militer pada tahun 1980-an bahwa, aktivitas keislaman identik dengan usaha pembentukan negara Islam. Syarwan ketika bertugas di Serang, Jawa Barat, pernah menerima suatu perintah untuk mengawasi orang-orang yang memakai jilbab. Menurut petinggi militer diatas Syarwan, apabila umat islam dibiarkan memakai jilbab, mereka akan menuntut yang lebih dari itu, yakni mendirikan negara Islam. Tetapi Syarwan berusaha menjelaskan bahwa jilbab merupakan suatu ajaran Islam yang sudah menyatu dengan adat masyarakat setempat dan tidak ada kaitannya dengan pendirian negara Islam. *Ibid.*, hlm. 108.

Radikalisme umat Islam terjadi pada saat tingkat represifitas militer terhadap umat Islam berlangsung begitu kuat. Hal ini sering dengan semakin mengerasnya kekuasaan negara terhadap rakyat. Daniel Dhakidae menjelaskan, Orde Baru mengalami puncak kekuasaannya pada tahun 1980-an, atau sekitar 22 tahun setelah runtuhnya Orde Lama. Pada masa itu terjadi akumulasi kekuasaan dan ekonomi, sehingga Orde Baru tidak lagi memerlukan legitimasi dari lembaga apa pun, khususnya dari partai politik.[16] Kekuasaan yang semakin dominan ini telah memungkinkan militer yang menjadi penyangga utama Orde Baru bertindak sewenang-wenang terhadap berbagai kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan. Kesewenang-wenangan telah melahirkan radikalisme di kalangan umat Islam "puncaknya" pada tahun 1980-an. Kondisi seperti ini terus berlangsung sampai pada akhir 1980-an atau menjelang awal tahun 1990-an, seiring dengan semakin surutnya peran militer yang *notabene* Kristen dan abangan di bawah komando L.B. Mordani. Bersamaan dengan itu, beberapa militer yang memiliki latar belakang Islam dipercaya menduduki jabatan strategis dalam elite militer.

Fenomena itu telah menghantarkan hubungan keserasian secara harmonis antara Islam dan militer. Sikap akomodatif dan integratif yang ditunjukkan oleh negara telah ikut mendorong adanya keharmonisan Islam dan militer yang selama kekuasaannya pada tahun-tahun sebelumnya punya cukup peran dalam mengendalikan langkah militer. Hal ini benar, karena yang sesungguhnya menguasai negara adalah militer dan Soeharto adalah

[16]Dhaniel Dhakidae, "Orde Baru dan Peluang Demokrasi," dalam Th. Sumartana dkk (Tim Editor), *ABRI dan Kekerasan* (Yogyakarta: Interfidei, 1999), hlm. 101.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemimpinnya. Perkembangaan kearah kemajuan hubungan Islam dan militer ini terus berlanjut dalam tahun-tahun berikutnya, sampai pada tingkat pergeseran posisi dan kedudukan militer dari abangan-nasionalis ke pihak Muslim Santri.[17]

Fnomena lain lain yang dianggap mengarah pada perubahan dan harmonisasi antara Islam dan militer adalah dilepaskannya tapol/napol yang berhaluan Islam pada, seperti Letjen (Purn) H.R. Dharsono pada 1991, A.M. Fatwa dan Abdul Qadir Jaelani pada 23 Agustus 1993. Perlakuan militer terhadap narapidana politik ini dianggap sebagai langkah baru bagi penghargaan terhadap hak umat Islam sebagai warga negara.[18]

Perkembangan dan transformasi yang dialami oleh umat Islam ini terus berlanjut. Menurut Nurcholish Madjid, 10 sampai 15 tahun mendatang akan tumbuh generasi Muslim dengan akar budaya yang kukuh dan memiliki tingkat kemurnian yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok Muslim ini akan menjadi kekuatan baru yang memiliki posisi strategis dalam percaturan politik nasional (*newly emerging Moslem intellectuals*).[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17]Komentar-komentar mengenai hal ini lihat Syafii Maarif, "Bumerang," *Gatra*, 13 Januari 1996, hlm. 12.

[18]Tentang masalah ini secara luas dibicarakan oleh A.M. Fatwa. Lihat A.M. Fatwa, *Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim: Sebuah Skripsi Pembebasan* (Surabaya: Bina Ilmu, 2002. Lihat juga, *A.M. Fatwa, Dari Cipinang ke Senayan* (Jakarta: Intrans, 2003).

[19]Bagi Nurcholish Madjid, hambatan umat bagi perkembangan Islam tidak hanya oleh faktor internal umat Islam, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang diwariskan oleh kaum kolonial. Kaum kolonial dengan sengaja memberikan hak istimewa terhadap kelompok tertentu (non-Muslim dan abangan) dengan menempatkan mereka dalam elit birokrasi yang dikenal dengan kaum priyayi . *Kompas,* 30 Desember 1996.

C. Pergeseran Militer: Dari Abangan dan non-Muslim ke Muslim Santri

Watak pemikiran Islam yang dimunculkan oleh generasi kedua Islam politik pada 1980-an seiring dengan munculnya perwira-perwira dengan latar belakang santri dan akomodasi negara terhadap Islam politik.[20] Dalam perkembangan berikutnya militer memiliki kepedulian dan kedekatan khusus terhadap umat Islam. Cara pandang mereka kini sangat berbeda dalam menterjemahkan kepentingan Islam politik seperti yang tampak pada awal kekuasaan Orde Baru 1970-an dan masa kejayaannya 1980-an. Soeharto mulai menaruh perhatian dalam hal terakomodasinya Islam politik dan merangkul jajaran perwira militer santri untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pusat kekuasaan.

Sejak tahun 1989, peran Moerdani tidak lagi sebesar masa sebelumnya, khususnya ketika ia menjabat sebagai Pangab/Pangkopkamtib sejak tahun 1993, yang bertanggung jawab atas stabilitas negara. Sejak Kabinet Pembangunan Lima (1988-1992), Mordani ditempatkan pada posisi yang tidak terlalu penting, yaitu sebagai Menteri Pertahan Keamanan (Menhankam). Jabatan ini hanya berfungsi secara administratif terhadap kemanan dan pertahanan negara. Kemesraan antara Moerdani dan Soeharto yang selama ini terjalin mulai berakhir. Selanjutnya jabatan Pangab yang memiliki peran strategis itu diserahkan kepada Try Sutrisno, seorang jenderal mantan ajudan Soeharto. Oleh sebagian kalangan, Try Sutrisno di posisi strategis ini dianggap sebagai langkah awal bagi masuknya militer yang

[20]Inilah yang disebut oleh Ulil Absar Abdalla muali terjadinya representasi politik di kalangan umat Islam. Lihat Ulil Absar Abdalla, "Umat Islam dan Politik Representasi," *Ulumul Qur'an*, Vol. VI, No. 2, 1995, hlm. 16-18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memiliki latar belakang keislaman yang kuat, santri. Seorang jenderal yang berasal dari Jawa Timur.[21]

Pada awal tahun 1990-an, khususnya pasca peristiwa Dili, pergeseran di dalam tubuh militer mulai memeprlihatkan semakin terdesaknya orang-orang dekat Moerdani. Pada tahun 1991, Soeharto mulai dengan sempurna menggusur kalangan militer mantan binaan Moerdani, seperti Brigjen Rudolf Warouw dan Mayjen S. Panjaitan.[22] Dari sinilah militer yang *notabene* Muslim mulai menempati posisi strategis.

Pada tahun 1993, posisi Pangab dipercayakan kepada Jendral TNI Faisal Tanjung.[23] Dua tahun berikutnya posisi KSAD diserahkan kepada Jendral TNI R Hartono. Munculnya kedua orang berlatar belakang Muslim santri ini di dalam posisi strategis di militer semakin menguatnya kekuatan Islam di tubuh militer. Dari kedua jenderal inilah hubungan Islam dan militer

---

[21]Memang anggapan ini menyangsikan sebagian banyak pengamat, karena—disamping pada awal karirnya ia dikenal dekat dengan Moerdani—pada saat meletusnya peristiwa Tanjung Priok 1984, Try Sutrisno saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya, yang masih berpangkat Mayjend. Tetapi segera dibantah, bahwa keterlibatannya dalam peristiwa itu karena ia merupakan "korban" dari sistem lembaga militer, yang saat itu Dandim 0502 Jakarta Utara dijabat oleh Letkol Butar-Butar sedangkan Pangab dijabat oleh L.B. Moerdani (yang keduanya Abangan/Kristen). Satu hal lagi, bahwa Tri Sutrisno sebenarnya bukan merupakan bagian dari gerakan kelompok *Islamphobia*, ini terlihat dari pandangannya yang melihat Islam bukan sebagai ancaman. Menurutnya, pandangan yang menyatakan Islam sebagai ancaman adalah pandangan yang keliru dan menyesatkan. Lihat A. Bakir Ihsan, *Perubahan*, hlm. 109, *Editor*, No. 21, Tahun VI, 13 Februari 1993, hlm. 21. Lihat juga Riza Zihbudi, *Tragedi Tanjung Priok*, dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.). *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hlm. 17-38, A.M. Fatwa, *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

[22]A Bakir Ihsan, *Perubahan*, 110. Lihat juga, The Editors (Benedict Anderson, dkk), "Current Data on the Indonesian Militar Elite, July 1, 1989-January 1, 1992," *Indonesia*, Nomor 53, April 1992.

[23]Sebelum Faisal Tanjung dilantik sebagai Pangab, ia menjabat sebagai Kepala Staf Umum ABRI yang dijabatnya selama satu tahun dengan pangkat Letnan Jenderal. Sosok Faisal Tanjung dan posisinya sebagai Kasum ABRI tidak banyak diperhitungkan oleh berbagai kalangan untuk meniti karir yang lebih tingi . Waktu itu perwira yang diprediksi bintangnya akan terus besinar menduduki posisi Pangab adalah Wismoyo Arismunandar yang masih ada ikatan keluarga dengan Soeharto.

mulai berlangsung secara baik dan harmonis. Kedua jenderal ini dikenal sangat dekat dengan berbagai kelompok Islam, baik NU, Muhammadiyah, maupun kelompok Islam lainnya yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara.[24]

Selanjutnya, Faisal Tanjung bersama petinggi militer lainnya berkunjung ke beberapa purnawirawan yang dianggap vokal dan kritis yang dikucilkan oleh pemerintah Orde Baru, seperti A.H. Nasution. Fenomena ini oleh beberapa kalangan juga dilihat sebagai awal dari adanya perubahan dalam tubuh militer. Hal ini sebagaimana diakui oleh Ali Sadikin mantan gubernur DKI yang lebih dikenal sebagai aktivis Petisi 50. Menurutnya perubahan yang berlangsung dalam tubuh militer salah satunya dapat dilihat dari kunjungan petinggi ABRI terhadap A.H. Nasution dan H.R. Dharsono pada 13 Juli 1993.[25]

Beberapa militer santri lainnya yang telah menduduki jabatan dalam periode 1989-1998 adalah; Mayjen TNI Kivlan Zen,[26] Mayjen TNI Syamsul Ma'arif,[27] Mayjen TNI Muchdi PR,[28] Letjen TNI Suaidi Marasabessy,[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24]"Dua Jenderal Santri di Pucuk Piramida ABRI," *Tiras,* NO. 4 Tahun I, 23 Februari 1995. Baca juga, "Setelah Sang Lokomotif Bergerak," *Gatra,* 18 Februari 1995, "Aku Bukan yang Satu-Satunya Islami di ABRI," *Forum,* No. 23, Tahun III, 2 Maret 1995.

[25]*Kompas,* Rabu, 14 Juli 1993. Petinggi ABRI yang melakukan kunjungan terhadap A.H. Nasution dan H.R. Dharsono adalah Pangab Feisal Tanjung yang didampingi oleh KSAD Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, KSAL Laksamana Madya TNI Tanto Koeswanto, KSAU Marsekal madya TNI Rilo Pambudi, Kapolri Letjen (Pol) Drs. Banurusman, dan Kapuspen ABRI Brigjen TNI Syarwan Hamid. Menurut Ali Sadikin kenyataan tersebut merupakan kejadian yang benar-benar sangat menggembirakan. "Saya kira baru kali ini sekonyong-konyong ada tokoh militer yang menemui Pak Nas". Ujar Ali Sadikin dengan penuh haru.

[26]Beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh putra Sumatera Barat ini adalah Kasdam VII/Wirabuana (966). Kepala Staf Kostrad (1997), dan Kordinator Staf Ahli KSAD (1998).

[27]Syamsul Ma'arif yang lahir di Kediri ini pernah menjabat Staf Pengamanan (Spam) TNI AD di Jakarta (1993), Kordinator Staf Pribadi Pangab/Sekretaris Pangab (1994), Danrem Surabaya termuda diseluruh Indonesia (1995), Kasdam V/Brawijaya (1997), dan Gubernur Akmil (1998).

Mayjen TNI A. Rahman Gaffar,[30] Mayjen TNI Zacky Makarim, dan TNI Sjafrie Sjamsoeddin,[31] Letjen TNI Syarwan Hamid, dan Letjen TNI Hendropriyono. Mereka menempati posisi yang strategis sebagai dampak dari mutasi yang dilakukan di lingkungan militer, menggantikan posisi-posisi yang ditinggalkan oleh kalangan militer di lingkungan Moerdani.[32]

Perlu dicatat, bahwa ideologi militer adalah pluralisme dan persatuan nasional yang tercermin dalam Sapta Marga dan sumpah prajurit yang telah menjadi konsensus nasional yaitu Pancasila. Maka tampilnya militer yang memiliki latar belakang kultur santri ini tidak dengan sendirinya memprioritaskan kepentingan umat Islam, tetapi paling tidak mampu mengikis berlangsungnya keecurigaan militer terhadap Islam.

---

[28]Alumni Akabri 1970 ini pernah menjadi Kasdam V/Brawijaya (1996), Pangdam VI/Tanjungpura (1997), Komandan Jenderal Kopasus (1998).

[29]Adalah Putra Maluku dan alumni Akabri 1971 ini menjabat Aisten Operasi Kasdam IV/Dipenegoro, Wakil Asisten Operasi Kasum ABRI, Asisten Opersi KSAD (1997), Pangdam VII/Wirabuana (1998).

[30]Abdul Rahman Gaffar ini pernah menjabat Kasdam VII/Trikora (1996), dan Pangdam I/Bukit Barisan (1997).

[31]Jabatn strategis yang pernah dijabat diantaranya sebagai Pangdam Jaya (1997). Sebelumnya ia menjadi komandan pasukan pengamanan presiden dan mengawal presiden ketika berkunjung ke daerah konflik di Bosnia.

[32]Diantara mereka memang lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang cukup kuat. Sehingga sebelum memasuki lembaga pendidikan militer mereka sudah memiliki dasar keagamaan yang cukup kuat. Tetapi ada juga sebagian tentara yang minat atau semangat keagamaannya tumbuh pada waktu pendidikan di Akabri, seperti Prabowo Subianto. Diantara militer lulusan Akabri 1970-an itu sebagian dikenal sangat dekat dengan kalangan Islam. Seperti Muchdi PR, ketika menjabat Kasdam V/Brawijaya dikenal sebagai tentara kiai karena seringnya ia tampil sebagai khatib Jum'at, bahkan seorang kiai dari ploso, kediri menyebutnya dengan Gus Muh. Jabatannya sebagai Kasdam V/Barwijaya digantikan oleh rekannya, Brigjen TNI Syamsul Ma'arif. *Jawa Pos,* 29 Maret 1998. Bagi Anhar Gonggong, fenomena ini tidak ada keuntungan bagi umat Islam, Karena yang untung sesungguhnya hanya Soeharto. Pergantian posisi jabatan dari Islam-Santri ke abangan hanyalah alat dan strategi Soeharto saja. Ada kesan ketika Fasial tanjung dihabisi Islamnya hilang. Selama konfrontasi ini bukan permasalahan santri dan abangan, tapi semua ini adalah strategi Suharto. Wawancara dengan Anhar Gonggong, Rabo, 22 Maret 2006 di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tentara tidak menyukai negara Islam karena mereka tidak menyukai Islam Politik dalam pengertian ideologi. Tetapi kalau partai Islam yang bisa menerima Pancasila tidak menjadi soal bagi tentara, karena pluralisme dan persatuan yang ada dalam Pancasila adalah ideologi yang tak terbantahkan.[33] Eksistensi umat Islam sebatas sebagai mitra dalam ikut serta menjaga stabilitas negara. Atas dasar ini militer tidak akan pernah mentoleransi terhadap gagasan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, sebuah corak ideologi Islam politik yang formal-legal dan ekslusif dan gerakan-gerakan sparatisme yang mengancam integritas nasional. Oieh sebab itu, kedekatan mereka lebih bersifat persuasif (proses penjinakan), mencegah gerakan Islam radikal yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

Penekanan pada kepentingan negara (penguasa) Orde Baru tertanam sangat dalam pada diri militer. Nilai-nilai keislaman militer secara kultural tertanam dalam diri mereka. Sementara dalam kesehariannya mereka merupakan bagian dari struktur kekuasaan politik Orde Baru. Sikap dan pendekatan mereka sangat ditentukan oleh pemegang kekuasaan, yaitu Soeharto. Hal ini tampak dari keterlibatan militer santri dalam bertindak sangat bertentangan dan jauh dari nafas Islam yang menekankan kedamaian dan keadilan. Sebuah sikap paradoksal telah berlangsung dalam tubuh militer.

Kebijakan Orde Baru politik yang sentralistik telah menjadikan militer sebagai pertahanan kekuasaan semata dan menjadi penekan atas hak-hak

[33]Pada masa melawan Belanda, Indonesia belum memiliki konsep negara dan Snouck Hurgronje merumuskan ideologi yang ada di Indonesia adalah ideologi Islam, karena yang melawan Belanda adalah Islam. Setelah kemerdekaan ada konsep ideologi baru yaitu Pancasila, inilah yang diwarisi Tentara sampai sekarang. Wawancara dengan Salim Said, Senin, 27 Maret 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kedaulatan rakyat. Kepemimpinan hirarkis dalam tubuh militer telah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan segelintir penguasa. Suatu kekuatan yang tak tertandingi oleh siapapun dan kelompok manapun telah dimanfaatkan dengan segala bentuk penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, militer santri sekali pun, larut dan terbuai dalam barisan kelompok ini. Dalam tahap ini, sekali lagi intensitas kecurigaan militer tidak seperti militer padan tahun-tahun sebelumnya.

Keterlibatan militer dalam politik merupakan konsekuensi logis dari distorsi peran mereka yang menyempit yakni menjadi alat penguasa. R. Hartono membenarkan kenyataan ini ketika menjabat KASAD. Dalam sebuah wawancara khusus dengan majalah *Forum Keadilan,* Hartono menyatakan bahwa dirinya hanyalah wayang dari presiden.[34] Liddle dan Sayidiman Soerjohadiprojo berpendapat:

> bahwa keberadaan militer santri memang akan memiliki pengaruh terutama terhadap keberadaan umat Islam, tetapi sebagai militer mereka akan tetap berpegang teguh pada Sapta Marga dan sumpah prajurit. Dalam kebijakannnya mereka akan bertindak sebagai militer, bukan sebagai santri. Tentara dalam melaksanakan tugas, latar belakang keagamaannya tidak memiliki keterkaitan yang ketat dalam diri militer. Tentara tetaplah tentara yang akan tetap menjalankan tugasnya dan ajaran agamanya. Oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang aneh apabila tentara yang Muslim rajin shalat.[35]

Pandangan di atas secara tidak langsung kian memperjelas posisi militer sebagai sebuah lembaga dengan agama (Islam) sebagai ebuah keyakinan yang bersifat individual dan personal. Tugas kemiliteran adalah tugas kelembagaan, sementara agama adalah panduan yang bersifat personal

---

[34]*Forum Keadilan,* No. 23, Tahun III, 2 Maret 1995.
[35]William Liddle dan Sayidiman Soerjohadiprojo, *Gatra,* 18 Februari 1995, hlm. 25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang memungkinkan setiap individu, tanpa mengenal kelas dan status sosial, memahami dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa uraian diatas, dari (1) konfrontasi antar gerakan Islam politik Islam (yang santri) dan militer (yang abangan dan non-Muslim) sampai pada (2) terakomodasinya beberapa para petinggi perwira Muslim santri dalam tubuh militer serta (3) dilepaskannya tapol/napol berhaluan Islam, telah mengindikasikan betapa yang pertama adalah karena kuatnya keinginan para aktivis Islam politik awal pada keyakinannya memperjuangkan Islam secara formal dan legal sebagai dasar institusi negara, yakni corak Islam formalistik-integralitik dan eksklusif (kaum skriptualis). Dan (2) adalah bagian cita-cita generasi intelektual dan aktivis Islam politik baru (kaum substantif) dengan hasratnya keyakinannya untuk menjadikan agama bukan bagian dari dasar ideologi negara, sebuah Islam yang humanis, terbuka dan moderat, yakni dengan menampilkan corak Islam secara subtantif-integratif dan inklusif, yang sejak awal 1970-an sudah diperjuangkan oleh Nurcholis Madjid dkk. Nampaknya pada awal 1990-an dan pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah telah melihat dan mengakomodasi gagasan aliran pembaru itu. Sebuah upaya tranformatif sintesis politik yang sesuai antara Islam dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tidak hanya sampai disini, bentuk akomodasi negara dalam bidang-bidang lainnya dan kebijakan-kebijakan harmoninya terhadap Islam politik dalam kurun waktu tahun 1989-1998 terus mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, suatu hal yang sangat fantastis dan tak dapat dibayangkan oleh kebanyakan pengamat pada tahun-tahun sebelumnya.

Mengenai sikap akomodatif negara itu secara lengkap akan diuraikan dalam sub bab berikut.

D. Akomodasi Islam Politik

Pendekatan yang ditempuh kaum aktivis Islam politik baru (substansialis) dalam perkembangannya terus mengalami kemajuan cukup pesat terutama dalam hal respon pemerintah terhadap strategi mereka. Sikap akomodatif pemerintah dalam hal kebijakan negara telah memberikan tempat secara leluasa bagi umat Islam.

Ada beberapa bukti yang menunjukkan sikap akomodatif negara, sebuah kebijakan yang sejalan dengan dengan kepentingan-kepentingan dengan sosial-ekonomi dan politik Islam. Akomodasi itu meliputi: baik akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi infrastruktur, maupun akomodasi kultural. Paparan secara kronologis dan terperinci mengenai bukti-bukti secara ringkas, kita perlu mengetahui secara sepintas untuk melihat apa yang kita pandang sesuai sikap akomodatif negara terhadap Islam.

Pertama, salah satu bentuk akomodasi yang paling mencolok adalah di rekrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru kedalam lembaga-lembaga ekskutif (birokrasi) dan legislatif negara. Bentuk akomodasi ini tidak berlangsung dalam sekejap, melainkan sudah bermula dengan direkrutnya beberapa aktivis Muslim ke dalam lembaga-lembaga negara dan lembaga lainnya dalam entitas ekonomi dan politik awal Orde Baru, seperti dalam tim ekonomi Soeharto, Golkar dan Bappenas. Proses itu sudah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berlangsung pada tahun 1970-an. Tetapi puncaknya akhir 1980-an dan awal 1990-an para aktivis Muslim diminta untuk menduduki posisi politik dan birokrasi penting,[36] yang memberikan akses relatif mudah kepada kekuasaan dan sangat bermanfaat bagi umat Islam. Setidaknya ada dua alasan utama dibalik fenomena tersebut, baik sosiologis maupun politis.

(1) Akses kepada pendidikan modern dan perkembangan ekonomi pada masa Indonesia merdeka, terutama selama Orde Baru, telah mentransformasikan basis sosial komunitas umat Islam.[37] Hal itu telah menyebabkan umat Islam memperoleh porsi besar dalam sektor-sektor menengah dan professional di negeri ini.[38] Jika pada periode akhir penjajahan dan awal kemerdekaan komunitas intelektual modern Indonesia pada umumnya didominasi oleh sekurang-kurangnya golongan priyayi dan mereka telah mengidentifikasi sebagai "subkultur metropolitan", maka intelektualisme yang berkembang dewasa ini dicirikan oleh partisipasi aktif para pemikir dan aktivis Islam politik.[39] Akibat mobilitas sosiologis ini, yang diperkuat oleh kembalinya sejumlah pelajar Muslim dengan gelar doktor sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, umat Islam tidak lagi bias dipandang sebagai kelompok marjinal, terbelakang, dan anti modernisasi.[40]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[36]Lihat, "Golkar dan Pemilih Islam," *Tempo,* 21 September 1991, hlm. 21.

[37] "Mengapa Cendekiawan Muslim," *Tempo,* 8 Desember 1990, hlm. 25-37.

[38]Lihat M. Dawam Raharjo, "Basisi Sosial Pemikiran Islam Indonesia Sejak Orde Baru," *Prisma,* No. 3, Maret 1991.

[39]Mengenai masalah kelas menengah Indonesia, lihat artikel yang termuat dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed.), *Politik Kelas Menengah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996. Lihat juga Budhi Munawar Rachman "Islam, Negara dan Formasi Sosial dan Orde Baru," Ulumul Qur'an Vol. III, No. 3 (1992, Suplemen hal. 1-28.

[40]Lihat, "Setelah Bom Sarjan Muslim," *Tempo,* 8 Desember 1990, hlm. 34-37.

(2) Munculnya gerakan politik Islam baru yang telah membentuk format dan strategi baru Islam politik di Indonesia. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa mereka tidak mendukung gagasan mengenai kaitan yang formal antara Islam dan negara, dan tidak lagi menganggap politik partisan—sebagai satu-satunya pendekatan politik. Sebaliknya, mereka menganggap bahwa tujuan utama mereka adalah membangun sebuah negara yang adil, partisipatif dan egaliter, yang harus diperjuangkan tidak hanya melalui partai-partai Islam, melainkan juga lewat birokrasi, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan partai yang berkuasa.[41]

Semua itu telah mengurangi kecurigaan negara terhadap Islam politik. Dan pada gilirannya, hal itu telah mendorong negara untuk menyediakan mekanisme struktural untuk memungkinkan kelompok Islam mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kita lihat akomodasi birokrasi dalam jajaran lembaga pemerintahan terhadap beberapa gerakan aktivis Islam poltik, seperti Pada awal 1970-an Sularso, Bintoro Tjokroamidjojo, Barli Halim, Bustanul Arifin, Madjid Ibrahim, Zainul Yasni, Sya'adillah Mursyid, Mar'ie Muhammad (yang pada tahun 1990-an diangkat menjadi menteri keuangan), Mintaredja, Sulastomo, Akbar Tanjung, Abdul Ghafur, Bustabul Arifin, Saleh Afif, Azwar Anas, Hasrul Harahap, Arifin Siregar, Syamsudin Sumintapura, Syafrudin Baharsyah. Pada awal 1990-an Bj. Habibie, Mar'ie Muhammad, Abdul Latief, dan Tarmizi Taher.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[41]Lihat juga Ridwan Saidi, "Cendikiawan Muslim dan Struktur Politik," *Kompas,* 8 Desember 1990.

Kedua, akomodasi yang jauh lebih mencolok lagi adalah akomodasi struktural direkrutnya para pemimpin dan aktivis Muslim dalam parlemen, menyusul pemilihan umum 1992. Padahal sebagian diantara mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berada di luar dan terasing dari pemerintahan. Perekrutan itu menyebabkan munculnya penilaian publik bahwa parlemen "semakin hijau," warna yang seringkali dipandang sebagi simbul Islam.[42]

Akomodasi struktural itu kian nampak dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia se-Indonesia (ICMI) dibawah kepemimpinan B.J Habibie-orang keprcayaan Soeharto dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (BPPT).[43] Organisasi ICMI sebagian besar merupakan jaringan patron-klien dari birokrat-birokrat Muslim, organisasi itu juga mencakup kelompok intelektual Muslim dan santri terpelajar yang berjumlah besar dan sedang tumbuh, yang berada diluar dan sering teralienasi dari pemerintah.[44] ICMI telah berhasil membawa pemikir dan aktivis Muslim selangkah lebih

---

[42]Lihat "Beringin Makin Hijau," *Tempo,* 3 Oktober 1992, hlm. 21-31. Lihat juga *Tempo,* 20 Juni 1992, hlm. 21-31.

[43]Awal mula pembentukan ICMI adalah hasil kreasi spontan lima mahasiswa—Erik Salman, Ali Mudakir, Mohammad Zaenuri, Awang Surya dan Muhammad Iqbal—Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Kelima mahasiswa itu bermaksud mengumpulkan para intelektual Islam disatu forum guna membicarakan masa depan umat dan bangsa. Untuk itu, pada awal 1990, mereka memiliki ide untuk mengorganisir konferensi nasional para intelektual Muslim yang akan mengundang para pemimpin dari semua organisasi besar Islam, pemerintah dan media. Pada gilirannya konferensi tersebut diharapkan akan mengantarkan pada pembentukan organisasi intelektual Islam yang permanen guna mengurangi faksionalisme dikalangan umat Islam. Selanjutanya kelima mahasiswa mengemukakan idenya kepada Rektor Unibraw, Malang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Malik Fajar. Pada awal Januari 1989, acara serupa juga pernah digelar di Kaliurang Yogyakarta di bawah pimpinan Imaduddin Abdurrahim dan Dawam Raharjo kemudian dibubarkan oleh Pangab Bennya Moerdani, seorang yang kebetulan Katolik. Liahat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di* Indonesia (Jakarta: ISAI dan *Ford Foundation*, 2001), hlm. 227-228. Lihat juga Bahtiar Effendy, *Islam,* hlm. 277. Syafi'i Anwar, *Kebebasan Cendikiawan: Refleksi Kaum Muda* (Yogyakarta:Yayasan Benteng Budaya,1996), hlm. 112, Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 225, *Berita Buana*, 4 dan 5 Desember 1990. *Tempo,* 8 Desember 1990.

[44]Lihat R. William Liddle, *Islam,* hlm. 82-83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maju.[45] Sampai bulan Agustus 1992, ICMI memiliki 11.000 anggota dan bertambah menjadi 40.000 tujuh bulan kemudian. Tokoh-tokoh dan anggota ICMI menduduki anggota parlemen hasil pemilihan umum 1992 dan fraksi-fraksi di MPR 1993-1998. Meskipun demikian lebih dari 300 orang Muslim yang tidak terlalu kental ke-ICMI-annya diangkat sebagai anggota MPR, dari keseluruhan jumlah 1.000 anggota MPR. Hefner melihat, setelah pengumuman kabinet 1993, jelas bahwa ICMI bukan fenomena yang harus diabaikan, tetapi kehadirannya menumbuhkan warna birokrasi yang lain dari sebelumnya.[46] Bagi Ricklefs, ICMI telah mampu mengubah konteks politik dan religius di Indonesia, sebagai lambang rekonsiliasi antara negara dan Islam yang tidak terbayangkan sebelumnya.[47]

Hingga pada Pemilu 1997, anggota legislatif dari unsur Islam santri semakin mewarnai parlemen. Sperti tampak pada anggota MPR Utusan Golongan yang ditunjuk langsung Presiden Soeharto, seperti; Zainuddin MZ (da'i), Rhoma Irama (artis/da'i), Lutfiyah Sungkar (artis/da'i), Idrus Marham (KNPI), Fadli Zon (CIDES), Taufiq Hidayat (Ketua HMI), Abdullah Azwar Anas (Sekretris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama/PP.IPNU).

Kebijakan lain yang sebagai bukti perubahan mendasar dari sikap pemerintah terhadap Islam adalah; (1) disahkannya Undang-Undang

---

[45]Pernyataan-pernyataan Sayidiman Suryohadiprojo mengenai ICMI, lihat Sayidiman Soerjohadiprojo, "Tekanan untuk Indonesia, Islam dan Habibie." *Forum Keadilan,* No. 24, Tahun VI, 9 Maret 1998, hlm. 81.

[46]Robert W. Hefner, *Civil,* hlm. 243.

[47]M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 632-633.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pendidikakn Nasional (UUPN) tahun 1989; (2) pengiriman 1.000 orang dai/muballigh Muslim kedaerah-daerah transmigran atas permintaan MUI yang disponsori Yayasan Amal Muslim Pancasila YAMP, sebuah yayasan milik Soeharto, awal tahun 1990; (3) diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 dan komplikasi hukum Islam tahun 1991; (4) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991; (5) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (Bazia) tahun 1991; dilaksanakannya festival Kebudayaan Islam Istiqlal 1991 dan 1995; (6) pembentukan Bank Muamalat Indonesia, BMI 1992; dan (7) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993. Semua keputusan pemerintah ini sejalan dengan kepentingan dan aspirasi umat Islam. Bahkan ucapan "*assalamu'alaikum*" secara tidak resmi telah menjadi ucapan "salam nasional. Hal ini dalam pengertian bahwa para pejabat tinggi negara, termasuk presiden, menteri-menteri kabinet, pejabat-pejabat senior, memulai pidato resmi dengan ucapan salam itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan perspektif ini dapat dikatan bahwa negara pada dasarnya hanya memperkuat saluran-saluran umat Islam dalam rangka mengartikulasikan dan merealisasikan agenda sosial-keagamaan, ekomoni, dan politik mereka. Namun demikian, mengingat corak hubungan antara Islam dan negara pada masa lalu, langkah akomodatif tersebut tidak diragukan lagi berperan sebagai indikasi-indikasi penting yang menunjukkan, betapapun simboliknya, makin pudarnya ketegangan politik antara Islam dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

> Paham kemajemukan masyarakat adalah bagian amat penting dari tatanan masyarakat maju. Dalam paham itulah dipertaruhkan, antara lain, sehatnya demokrasi dan keadilan. Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada. Tetapi, mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Jelas bangsa kita akan memperolah manfaat besar dalam usaha transformasi sosialnya menuju demokrasi dan keadilan jika pluralisme itu dapat ditanamkan dalam kesadaran kaum Muslim yang merupakan golongan terbesar warga negara. Pluralisme adalah prasyarat pertama dan utama Ukhuwah Islamiyyah.
>
> —Nurcholish Madjid[1]

A. Kesimpulan

Dalam perspektif yang lebih luas, paparan di bab sebelumnya tentang pasang surut hubungan Islam dan militer (kerjasama, konfrontasi dan harmonisasi) dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dalam (bab pendahuluan) mengapa terjadi pasang-surut hubungan itu yang berujung pada perubahan hubungan dan harmonisasi antara Islam dan militer pada masa 10 tahun terakhir kekuasaan Orde Baru? dan negara dalam hal ini Soeharto yang memegang peranan kunci hubungan antara keduanya semakin melunak terhadap Islam politik? dan sejauh manakah pengaruh kekuatan kelompok Islam politik; fundamentalis, reformis, dan akomodasionis dalam peranannya terhadap fenomena pasang-surut itu?

Mengingat pertentangan sikap dan permusuhan yang begitu keras ditunjukkan militer sejak awal kekuasaan orde baru, yang telah mengharu-

[1]Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Jakarta: Paramadina: 1995), hlm. 602-603.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

birukan keputusasaan para aktivis Islam politik, seperti yang sudah ditunjukkan dalam kajian ini, bahwa keberpihakan militer terhadap kebatinan (kejawen) yang justru ditentang oleh kalangan umat Islam dan tampilnya militer *abangan* dan non-muslim di jajaran elit militer dan aliansi mereka dengan kelompok nasionalis. Di lain pihak konflik kultural yang sudah berusia lama antara Islam terorganisir dan rezim Soeharto, yakni Soeharto dan para jenderal yang ada di sekitarnya berasal dari lingkungan Hindu Jawa yang membuatnya lebih sebagai Muslim Nominal (*abangan*) dan bukan sebagai Muslim yang taat (*santri*). Asumsi yang berkembang akhirnya adalah Soeharto dengan Orde Barunya telah mengikuti tesis-tesis Snouck Hurgronje dalam melayani kepentingan umat Islam. Islam sebagai sistem ritual dan kemasyarakatan, bukan sebagai entitas Islam politik. Artinya Soeharto selama ini telah memajukan ketaatan beragama personal dan menentang politisasi agama.

Dengan mengurai kembali peran Islam pada awal kebangkitan Orde Baru dan keterlibatan Islam dalam proses politik (1966-1975), peminggiran politik pada masa kejayaan Orde Baru (1976-1988), dan gagasan baru menuju kebangkitan Islam politik setelah lama terpinggirkan (1989-1998). Studi ini menunjukkan bahwa artikulasi-artikulasi Islam yang bercorak formalistik-legalistik-inklusif, besar perannya dalam membentuk hubungan yang saling mencurigai, tidak harmonis, bahkan sampai ke tingkat antagonistik antara aktivis gerakan Islam politik (dalam hal ini Muslim *santri*) dan militer (yang *abangan*). Pada tahun-tahun ini, aura ideologis Islam politik berada pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tingkat intensitas yang paling tinggi, antara lain menuntut disahkannya status hukum Piagam Jakarta 1968 dan tuntutan Islam sebagai ideologi negara.

Namun demikian, penting untuk dimengerti bahwa tuntutan diberlakukan Islam secara formal yang mendasari ruh gerakan Islam politik tentu memiliki akar sejarah yang panjang. Untuk sebagian besar, berbagai pemikiran dan aksi itu didorong oleh adanya perlakuan negatif dan ketidak serasian antara Islam pribumi dengan Barat, terutama sekali yang ditunjukkan kolonialisme Belanda. Proses panjang dan yang amat menentukan dari kontrol Belanda, memiliki dampak yang sangat merugikan kepentingan umat Islam. Sebagian besar komunitas Muslim di masa berikutnya, pengaruh itu terutama tampak nyata dalam hilangnya kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, mendapatkan pendidikan secara wajar dan dalam penyaluran aspirasi politik Muslim. Tradisi ini terus berlangsung dan mengakar dalam kehidupan, terutama menyangkut kepentingan politik Islam saat masa Orde Baru berkuasa. Beban psikologis, trauma dan kemarahan umat Islam akibat penyingkiran pada masa Orde Baru. Umat Islam merasa perlu dan wajib memerangi segala bentuk penindasan-penindasan atas dirinya melalui perjuangan politik Islam secara formal dan legal, yakni kelompok ***fundametalis*** dan melalui partai-partai Islam (sekalipun tidak sampai pada ide mendirikan negara Islam), yakni kelompok ***reformis.*** Dalam tahap ini umat Islam merasa asing dalam dunianya sendiri.

Tetapi tidak semua kaum Muslim Indonesia mendukung jenis Islam politik ini. Sejak tahun 1950-an, beberapa pemikir dan aktivis politik di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia menaruh perhatian sangat besar terhadap corak negara kesatuan Republik Indonesia. Menolak gagasan-gagasan tersebut dengan sepenuh hati untuk "menjinakkannya". Keberhasilan politik penjinakan menyebabkan tersingkirnya Islam dari proses-proses politik bangsa. Khususnya selama 22 tahun pertama kekuasaan pemerintahan Orde Baru, Islam politik bahkan menjadi sarana kecurigaan ideologis-politis dan target "politik penyingkiran" negara. Situasi ini membawa Islam politik dicurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara Pancasila.

Situasi yang menyedihkan inilah yang ingin diatasi oleh generasi baru pemikir dan aktivis Islam politik di Indonesia yakni kelompok ***akomodasionis-transformatif*** Islam politik, yang mulai tumbuh sejak 1970-an lewat tiga aliran berbeda, tetapi saling berkaitan dan saling melengkapi, yakni pembaruan teologis/keagamaan, reformasi politik/birokrasi, dan transformasi sosial. Tujuan utama yang ingin mereka capai adalah mentransformasikan sudut pandang Islam politik yang lebih awal, dari formalisme-legalisme-eksklusif ke arah substansialisme-integratif-inklusif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berkat upaya-upaya mereka itu, Islam politik yang berlangsung dewasa ini telah menemukan sebuah format baru. Dalam hal landasan teologinya, format baru Islam politik ini tidak membutuhkan kaitan legalistik atau formalistik antara Islam dan negara. Negara secara ideologis maupun politik, berjalan di atas sebuah sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Cukup bagi para aktivis politik Islam untuk menyatakan loyalitasnya dan dukungan mereka terhadap negara. Hal ini menjadikan

mereka dapat menerima Pancasila, yang dalam pernyataan mereka sendiri sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Sejak akhir 1980-an dan 1990-an, pendekatan yang lebih integratif ini telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang menggembirakan. Islam politik tampaknya telah menemukan jalan masuk untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam diskursus politik nasional Indonesia. Lebih dari itu, tampak berbagai indikasi bahwa militer mulai melihat Islam politik tidak lagi sebagai kekuatan yang mengancam, melainkan sebagai kekuatan yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. Masuknya beberapa jenderal Muslim, seperti Pangab Try Sutrisno (1989), Jenderal TNI Faisal Tanjung (1991), dan Jenderal TNI R. Hartono (1993), Mayjen TNI Kivlan Zen (1996-1998), Mayjen TNI Syamsul Ma'arif (1993-1998), Mayjen TNI Muchdi PR (1996-1998), Letjen TNI Suaidi Marasabessy (1997-1998), Mayjen TNI A. Rahman Gaffar (1996-1997), Mayjen TNI Zacky Makarim (1997), TNI Sjafrie Sjamsoeddin (1997). Letjen TNI Syarwan Hamid, Letjen TNI Hendropriyono adalah bukti yang mencerminkan kebijakan akomodasi Soeharto yang menaruh hati kepada kelompok Islam.

Tidak hanya itu, bukti yang memperlihatkan perkembangan baru ini adalah sikap militer dan negara yang mulai ramah terhadap Islam. Dengan menerapkan beberapa kebijakan tertentu yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik kaum Muslim.

Dari kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa, dasar yang memicu kekerasan dan pemberontakan dalam sejarah Indonesia antara Islam dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

negara, khususnya antara Islam dan militer hanyalah persoalan lama yaitu perseteruan ideologi antara Islam santri *vis-à-vis* Islam abangan dan non-Muslim. Sebuah pertarungan ideologi yang keduanya dalam satu persoalan yaitu antara menentang dan menerima disahkannya Piagam Jakarta atau Islam sebagai dasar ideologi negara. Dalam konteks ini, cukup dikatakan bahwa konsepsi Islam politik yang formalistik atau legalistik hanya mungkin muncul kembali jika rasa ketertindasan—secara sosial, ekonomi, dan politik—juga makin tumbuh. Seperti dalam pengalaman-pengalaman yang telah lalu, para pemikir dan aktivis akan mencari penyelamatan ke dalam, dalam corak yang holistik dan totalistik, untuk menentang negara yang makin tidak karuan.

Tentu hal ini sangat tergantung pada keterwakilan kaum Muslim secara proporsional dalam lembaga-lembaga politik negara. Mengingat aliran kelompok akomodasionis atas kesediaannya tidak "menuntut" idiologi Islam dengan jaminan posisi dalam kelembagaan *administratif* dan *politik-birokrasi* adalah tuntutan yang secara nyata terakomodasi oleh pemerintah. Bagi mereka, sejauh tidak memusuhi Islam, tuntutan dan kekuasaan seperti ini adalah sah. Hal ini mengharuskan dipertimbangkannya dan diakuinya nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain seperti yang telah dikemukakan diatas, dalam penutup ini dapat dikatakan bahwa; *Pertama,* pembaruan pemikiran yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim modernis yang lebih menekankan aspek kultural telah menghilangkan kecurigaan militer terhadap umat Islam yang diidentikkan sebagai kelompok pembangkang, radikal dan ekstrim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, umat Islam telah mencapai kecangggihan berpolitik untuk menyesuaikan diri dengan irama politik pemerintah. Umat Islam telah berhasil membaca kesempatan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk bermain di arena pusat kekuasaan.

Ketiga, berkurangnya lawan politik Islam di kalangan perwira (terutama dari kelompok abangan dan non-Muslim), pada saat yang sama hal ini jelas mengurangi kecurigaan terhadap umat Islam. Dengan demikian Islam bisa memainkan peranannya secara lebih luas.

Dalam studi ini penulis ingin menegaskan bahwa perseteruan antara Islam politik versus militer secara diametral dalam sejarah politik di Indonesia dari Orde lama sampai 22 tahun pertama kekuasaan Orde Baru adalah persoalan yang sesungguhnya sangat klasik yaitu tentang ideologi sebagai landasan dasar hidup bersama dalam sebuah negara yang selalu mengalami jalan buntu. Penafsiran dan pendefinisian yang berbeda mengenai agama dan negara pada gilirannya diperuncing oleh perseteruan antarberbagai kelompok-kelompok kepentingan dan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Munculnya sikap moderasi antara kedua belah pihak baik Islam maupun militer, telah menghantarkan kesepakatan-kesepakatan sebagai solusi dan jalan tengah dalam menempuh cita-cita bersama, yakni persamaan dan keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran

1. Penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik bagi pemenuhan kepentingan agama, bangsa dan negara, perlu kiranya diwujudkan

militarizing the military yakni pengendalian sipil secara obyektif. Untuk mewujudkan pengendalian sipil secara obyektif, yaitu dengan cara memperbesar profesionalisme militer, meminimalkan kekuasaannya, namun sama sekali tidak melenyapkan kekuasaan kaum militer. Anjuran tetap menyediakan kekuasaan tetapi dalam batas tertentu adalah hal yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Cara inilah yang paling mungkin untuk menghasilkan hubungan Islam-militer secara sehat, arif dan bijaksana.

2. Perlu adanya kesadaran dikalangan umat Islam tentang pentingnya hidup secara terbuka dan menghargai tentang pluralisme yang tercermin dalam kandungan Pancasila. Bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman inilah yang mesti ditunjukkan oleh umat Islam dengan semangat ke-Islaman dalam bingkai dasar-dasar dan ruh semangat Islam secara subtantif-integratif dan inklusif tanpa harus menutup diri rapat-rapat terhadap orang yang secara keyakinan, kebiasaan, adat dan budaya berbeda.
3. Pentingnya pemahaman Islam secara *kaffah* dan *kamil.* Persamaan dan keadilan tanpa harus menyudutkan dan menghakimi orang lain diluar diri kita adalah prinsip sesungguhnya dari hakikat kebenaran Islam. Kecendrungan-kecendrungan dengan pencarian pembenaran atas penafsiran Islam yang holistik tanpa mau menerima dan menimbang dengan yang ada diluar diri kita adalah pemikiran yang sempit dan sangat ekslusif. Sejarah masa lalu dengan gagalnya perjuangan politik umat Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada generasi awal dengan idiom Islam formalistik-legalistik dan ekslusif, mesti harus menjadi pijakan sebagai pelajaran berharga untuk menempuh strategi baru seperti yang dilakukan oleh generasi baru aktivis Islam politik.

4. Bagi militer profesionalisme adalah prasyarat mutlak yang harus dipegang teguh bagi pembentukan alat pertahanan-keamanan negara yang tangguh dan elegan. Keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil-politik dan segala bentuk tugas diluar pertahanan dan keamanan adalah tindakan yang menyalahi Sapta Marga dan sumpah prajurit. Sebagai alat pertahanan-keamanan negara militer harus secara aktif dan penuh tanggung jawab dilakukan dengan semangat Pancasila.
5. Militer yang lahir dari rakyat dan oleh rakyat dari semangat juang revolusi fisik yang pada tahapan selanjutnya menjadikan kelahiran tentara suatu kelembagaan yang unik, muncul dari anak kandung pertiwi. Kelahirannya selalu dicita-citakan dan diimpikan. Melihat keunikan dan kekhasan atas kelahiran militer itulah, seyogyanya militer kembali mengabdi hanya untuk rakyat. Menghargai supremasi sipil atas supremasi militer tanpa paksaan dan tekanan dari manapun adalah suatu keharusan yang perlu diwujudkan pada anak zaman yang telah melahirkan dan membesarkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, "Sipil-Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Teksonami Pengantar," dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1985.

_____, *Islam dan Masyarakat: Pantuln Sejarah Nasional,* Jakarta: LP3ES, 1996.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana ILmu, 1999.

Adam, Asvi Warman, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Tride, 2004.

Adams, Cindy, *Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams,* New York: The Bob-Merrill Company, Inc. 1965.

Alfian, T. Ibrahim, *Metode Penelitian Sejarah,* (Makalah pada seminar Kesejarahan, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Yogyakarta, 22 April 1994.

Ali, Fachry dan Effendy, Bahtiar, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 118.

Anderson, Benedict R. O'Gorman, Benedict R. O'Gorman dkk, The Editors "Current Data on the Indonesian Militar Elite, July 1, 1989-January 1, 1992," *Indonesia,* Nomor 53, April 1992.

_____, *Imagined Communities-Komunitas-komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Anshari, Endang Saifuddin, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Anwar, Dewi Fortuna, "Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik", dalam Syarobin Arba MF., (ed.), *Demitologi Politik Indonesia,* Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1998.

Anwar, M. Syafii'i, *Kebebasan Cendikiawan: Refleksi Kaum Muda,* Yogyakarta:Yayasan Bonteng Budaya, 1996.

_____, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Azka, M. Najib, *Hegemoni Tentara*, Yogyakarta: LKiS, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Azra, Azyumardi, *Contemporary Islamic Renewal in Indonesia,* makalah dalam Konferensi Internasional tentang Islam dan Perubahan di Kuala Lumpur 7-9 Juni 1996.

_____, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Az-Zaghul, Imad Abdurrahim, *Psikologi Militer,* Jakarta: Khalifa, 2003.

Basyar, M. Hamdan, "Komando Jihad: "Monster" Bagi Muslim Indonesia (1976-1981)," dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Jakarta: PPW-LIPI, 2000.

Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under the Japanese Occupation, 1942-1945*, Den Haag: W. van Hoeva, 1984.

Berkhofer, Jr., Robert F., *A. Behavioral Approach to Historical Analysis,* New York: Free Press, 1971.

Bhakti, Ikrar Nusa (ed.), *Dinamika Internal tentang Peran dan Fungsi TNI*, Jakarta: P2P-LIPI, 2001.

_____, *Tentara Mendamba Militer: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia,* Bandung: Mizan dan PPW-LIPI, 1999.

Bolland, B.J., *Pergemulan Islam di Indonesia 1945 1970,* diterjemahkan dari, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.

Britton, Peter, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesi,* Jakarta: LP3ES, September, 1996.

Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacan Baru,* Yogyakarta: LKIS, 1994.

Cahyono, Heru, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980, dari Pemilu Sampai Malari,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Cholisin, *"Militer dan Gerakan Demokrasi: Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Inonesia,* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

Crouch, Harold, "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia," dalam Kohli A. (ed.), *The State and Development in the third Worl*, Princeton: Princeton University Press, 1986.

_____, *Militer dan Politik di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dhakidae, Daniel, "Orde Baru dan Peluang Demokrasi," dalam Th. Sumartana dkk (Tim Editor), *ABRI dan Kekerasan,* Yogyakarta: Interfidei, 1999.

_____, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Diane F. Orentlicher, *Human Rights in Indonesia and East Timor: An Asia Watch Report*, New York: The Asia Watch Committee, 1998.

Djiwandono, J. Soedjati, "Hegemoni Militerisme atas Kesadaran Sipil", dalam Anas S. Machfuds dan Jaleswari Pramodhawardani (ed), *"Militar Withaut Militarism: Suara dari Daerah",* Jakarta: LIPI, 2001.

_____, *"Setengah Abad Negara Pancasila: Tinjauan Kritis Ke Arah Pembaruan*, Jakarta: CSIS, 1995.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, John L., Islam and Politics, Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1984.

Fattah, Abdoel, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LkiS, 2005.

Fatwa, AM., *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Federspiel, M. Howard, "The Military and Islam in Sukarno's Indonesia". *Pacific Affairs,* Vol. 46, No. 3, 1973.

Feillard, Andree, *Nu vis-a-vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna,* Yogyakarta: LKiS, 1999.

Feith, Herbert dan Castles, Lance (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.

_____, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

_____, *The Indonesia Elections Of 1955,* Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1951.

Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1984.Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method,* New York: Fordham University Press, 1984, hlm, 33. Lihat, Louis Gottschalk, *Understanding History,* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* diterjemahkan dari judul aslinya, *Religion of Java* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

_____, *Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, Jakarta: Grafitipers, 1986.

Gottschalk, Louis, *Understanding History,* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Haramain, A. Malik, *Gus Dur Militer dan Politik,* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Hardito, Bagus A., "Faktor Militer dalam Transisi Demokrasi di Indonesia", disunting oleh Rizal Sukma dan J. Kristiadi, dalam *hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia,* Jakarta: CSIS, 1999.

Hasjmy, A., *Semangat Merdeka.* Jakarta Bulan Bintang: 1985.

Hefner, Robert W., *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia,* Jakarta: ISAI dan The Asia Foundation, 2000.

_____, *ICMI dan Perjuangan menuju kelas menengah Indonesia,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Hugiono dan P.K. Perwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Huntington P., Samuel, "Mereformasi Hubungan Sipil-Militer", disunting oleh Larry Diamond dan Mare F. Platner, dalam "*Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokeasi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Husken, Frans dan Jonge, Huub de (ed.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998,* Yogyakarta: LKIS, 2003.

Ihsan, A. Bakir *Perubahan Hubungan Islam dan Militer di Indonesia 1990-1998,* tesis S2, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2000.

Ihya'uddin, Imam, "Hipokrisi, Budaya Politik Orde Baru" dalam Jurnal Ilmu Sejarah dan Kebudayaan MADDANA, Departemen Pers dan Jurnalistik Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, edisi 6, Tahun VI, 2004, 93-95.

Indroyono, Gatot (ed.), *Islam di Mata Para Jenderal,* Bandung: Mizan, 1997.

Jay, Robert, *Religion and Politics in Rural Center Java,* New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1963.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Religion and Politics in Rural Jawa,* Bab I, "Evolution of the Schism."

Jenkins, David, *Soeharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1965-1983,* Cornell Modern Indonesia Project, 1984.

Kadi, Surip, *TNI-AD: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.

Karim, Muhammad Rusli, *Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965-1975),* Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

_____, *Negara dan Peminggiran Islam Politik,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam metodologi Sejarah,* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kasdi, Aminuddin, *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965,* Yogyakarta: Jendela, 2001.

Kuntowijoyo, "Strategi Baru Politik Umat Uslam, dalam Tim KHAMI Jaya (penyunting), *Indonesia di Simpang Jalan,* Bandung: Mizan, 1998.

_____, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi,* Bandung: Mizan, 1998.

_____, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Latif, Yudi dan Ibrahim, Idi Subandy, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru,* Bandung: Mizan, 1996.

Liddle, R. William, *"Menjawab Tantangan Masa Reformasi",* Makalah yang untuk Konferensi Indonesia's Road to Recovery II: Redefining Nationalism to Rebuild the Nation, Berkeley, CA, 27 Mei, dimuat dalam *Kompas,* 8 Juni 2000, hlm. 4-5.

_____, *Islam Politik, dan Modernisasi,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

_____, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik,* Jakarta: LP3ES, 1992.

_____,*Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru,* Jakarta: Grafitipers, 1992.

Liotohe, Wimanjaya K., *10 Dosa Besar Soeharto*, Jakarta: tanpa tahun dan penerbit.

Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Denokrasi Terpimpin (1959-1965,* Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

_____, "Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia," dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (ed.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia,* Jakarta: LAPPENAS, 1983.

Macky J.A. dan Andrew MacIntyre, "Politics", dalam Hill, H. (ed.). *Indonesia's New Order the Dynamic of Socio Economics Transformation*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

Madjid, Nurcholish, "Sekali Lagi tentang Sekularisasi", dalam H.M. Rasyidi, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi,* Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

_____, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.

_____, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan,* Jakarta: Paramadina: 1995.

McCloud, *Southeast Asia Tradition and Modernity in the contemporary World,* Boulder: Westview Press, 1985.

McVey, R. T., "The beamtenstaat in Indonesia," dalam Piscatori, J.P. (ed.), *Islam in the Political Proses*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Mortimer, Rex, *Class, Social Cleavage and Indonesia Communism,* Indonesia, No. 8. Oktober 1968.

Muhaimin, Yahya, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia,* Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gdjah Mada, 1973).

Nasution, A.H., *Pembangunan Moral: Inti Pembangunan Nasional,* Surabaya: Bina Ilmu1995.

Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia: Studi Sosio-Legal Alat Konstitusi,* Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 1995.

Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran,* Bandung: Mizan, 1998.

Nishihara, Masashi, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971,* Ithaca: Monograph Series, Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1972.

Noer, Dalier, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Runua, Nung, Dinamika Politik Indonesia: Dari Pemilu 1992 sampai Kabinet Pembangunan VI, Jakarta: PT Bina Pariwara, 1993.

Pauker, Guy J., *Indonesia in 1966: The Year of Transition,* California: The RAND Corporation, 1967.

Perlmutter, Amos, *Militer dan Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Raharjo, M. Dawam, *Intelektual dan Perilaku Politk Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim,* Bandung: Mizan, 1993.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatuf,* Bandung: Mizan, 1991.

_____, *Konstektualisasi Doktrin Islam dan Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1994.

Raidi, Umaidi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional,* Jakarta: Integrita Press, 1984.

Rais, M. Amien (ed.), *Islam Indonesis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Richard Tanter (ed), *Politik Kelas Menengah Indonesia,* Jakarta: LP3ES, 1996.

Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200-2004,* di terj. Oleh Satrio Wahono, dkk., *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Rousseau, Jean Jacques, *The Social Contract,* diterjemahkan oleh Sumarjo, *Kontrak Sisial,* Jakarta: Erlangga, 1986.

Said, Salim, "Kepemimpinan Politik TNI/ABRI dalam Perspektif Sejarah", Akademi Militer Magelang dalam Djoko Subroto (penyunting), *Visi ABRI Menatap Masa Depan* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1997.

_____, *Genesisi of Power, General Sudirman and the Indonesia Military in Politics* 1945-49, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

_____, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

_____, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000,* Jakarta: Aksara Karunia, 2002.

Samson, Allan, "Islam and Politics in Indonesia." Disertasi doktor, University of California.

_____, "Religion Belief and Political Action in Indonesia Islamic Modernism," R. William Liddle (ed.), *Politica Participation in Modern Indonesia* (New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University, 1973).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, "Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam," K. D. Jackson and Lucian W. Pye (ed.), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978).

Sartonokartodirjo, *Protest Movemen in Rural Java,* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.

Sarwono dan Alvin Y. So., *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 200), hlm. 7-25.

Shaw, Martin, Post-Militery Society: Militersm, Demilitarization and War at the End of the Twentieth Country, diterjemahkan oleh Imama Baehaqi, Bebas dari Militer: Analisis Sosiologis atas Kecendrungn Masyarakat Modern, YogtakartaK Pustaka Pelajar, 2001.

Sihbudi, Riza, "Tragedi Tanjung Priok," dalam Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, Jakarta: PPW-LIPI, 2000.

Simatupang, TB., "Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kesejarahan dan Perspektif Masa Depan," dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Sitompul, Agus Salim, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta,* Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Soebijono, dkk, *Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, Cet. VIII).

Soeharto, *Amanat Kenegaraan: Kumpulan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 1967-1971,* Vol. I dan II, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Vol. I dan II, Jakarta: Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi, 1963.

_____, *Surat-Surat Islam dari Endeh,* Bandung: Persatuan Islam, 1936.

Sparinga, Daniel, "TNI: Sebuah Refleksi Kritis atas Sejarah", dalam dalam Anas S. Machfuds dan Jaleswari Pramodhawardani (ed), *"Militar Withaut Militarism: Suara dari Daerah",* Jakarta: LIPI, 2001.

Sulistyo, Hermawan, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966),* Jakarta: Kepustakan Gramedia Populer bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan *The Ford Foundation*, 2000).

Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI,* terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suryadinata, Leo, "Islam and Soeharto's Foreign poilc, Indonesia the Middle East, and Bosnia", *Asian Survey* vol 9, 1988. hlm. 268-281.

Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer, Studi tentang Budaya Politik,* Jakarta: LP3ES, 1995, Cet. II.

Suryohadiprojo, Sayidiman, *Pancasila, Islam, dan ABRI: Buah Renungan Seorang Prajurit,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Susanto S.J., Budi, (ed.), *Politik Postkolonialitas di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino 2003), hlm. 23.

Susanto, Dudi dan Supriatma, A. Made Tony (ed.), *ABRI: Siasat Kebudayaan 1945-1995*, Yogyakarta:, 1995.

Syamsudin, Din, *Jendral TNI Faisal Tanjung, ABRI-Islam Mitra Sejati,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Thalib, M. dan Fajar, Haris (ed.), *Pembaharusan Faham Islam di Indonesia: Dialog Bung Karno-A. Hassan,* Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1985.

Ward, Kenneth E., *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia,* Ithaca: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell Universituy, 1970.

Woodward, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebantinani*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer,* makalah yang disajikan dalam seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer Jurusan Ilmu Politik, Fisip Universitas Indonesia, Jakarta, 24-25 Mei 1999, Kampus UI Depok.

Yulianto, Arif, *Hubungan Sipil-militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusuran Demokrasi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Zuhri, Syaifudi (ed.), *PPP, NU, dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam,* Jakarta: Integrita Press, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal, Majalah dan Surat Kabar

Asian Survey, No. 12 Vol. VII, Desember 1968, "Islam in Indonesia Politics,: Allan Samson.

Berita Buana, 4 dan 5 Desember 1990.

Editor, No. 21, Tahun VI, 13 Februari 1993.

Forum Keadilan, No. 23, Tahun III, 2 Maret 1995. "Aku Bukan yang Satu-Satunya Islami di ABRI," Oleh Jendral TNI Faisal Tanjung

Forum Keadilan, No. 6, Tahun VI, 30 Juni 1997, "Dampak Politik Hasil Pemilu 1997," Oleh Syamsuddin Haris.

Forum Keadilan, No. 24, Tahun VI, 9 Maret 1998, "Tekanan untuk Indonesia, Islam dan Habibie," Oleh Sayidiman Soerjohadiprojo.

Gatra, 18 Februari 1995, "Setelah Sang Lokomotif Bergerak."

Gatra, 18 Februari 1995, "Tanjung & Hartono", Oleh Salim Said.

Jurnal Ilmu Sejarah dan Kebudayaan MADDANA, Departemen Pers dan Jurnalistik Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, edisi 6, Tahun VI, 2004, 93-95. "Hipokrisi, Budaya Politik Orde Baru," Oleh Imam Ihya'uddin.

Kompas, 8 Desember 1990, "Cendikiawan Muslim dan Struktur Politik," Oleh Ridwan Saidi.

Kompas, Rabu, 14 Juli 1993.

Panji Masyarakat, No. 393, Tahun 1983, "Gagalkah Para Pemimpin Islam?," Oleh Abdurrahman Wahid.

Panji Masyarakat, 21 Mei 1987, "Pergeseran Pemilih PPP dalam pemilu 1987 dan Masa Depan Perpolitikan Islam," Oleh Arbi Sanit.

Prisma No. 49, 1995. "PPP dan Politik dibawah Pemerintahan Orde Baru," Oleh Syamsudin Haris.

Prisma, No. 12, 1980, "Islam dan Militerisme dalam Lintasan Sejarah," Oleh Abdurrahman Wahid.

Prisma, No. 6, 1987, "Tentara Nasional Indonesia dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Pada Masa Datang," Oleh Salim Said.

Prisma No. 49, 1995, "PPP dan Politik dibawah Pemerintahan Orde Baru," Oleh Syamsudin Haris.

Republika, 15-16 November 1996, "Tiga Tragedi Pergerakan Islam: Struktur, Kultur, dan Pergerakan Sosial," Oleh Kuntowijoyo.

Prisma, No. 7 Agustus 1978, hlm. 44.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tempo, 20 Juni 1992, hlm. 21-31.

Tempo, 21 Februari 1987, "Pondok Berpaling,"

Tempo, 21 September 1991 "Golkar dan Pemilih Islam," hlm. 21.

Tempo, 21 September 1991, "Pasang Surut Hubungan Islam-Beringin,"

Tempo, 3 Oktober 1992, "Beringin Makin Hijau," hlm. 21-31.

Tempo, 8 Desember 1990, "Mengapa Cendekiawan Muslim," hlm. 25-37.

Tempo, 8 Desember 1990, "Setelah Bom Sarjana Muslim," hlm. 34-37.

Tempo, 8 Desember 1990.

The Journal of Asian Studies, Vol. 55, No 3, 1996. "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation," R. William Liddle.

Tiras, NO. 4 Tahun I, 23 Februari 1995, "Dua Jenderal Santri di Pucuk Piramida ABRI."

Ulumul Qur'an, Vol. II, No. 7, 1990, "Menuju Pendekatan Baru Islam," Oleh Mohammed Arkoun.

Ulumul Qur'an, Vol. III, No. 1, 1992, "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya," Oleh Martin van Bruinessen.

Ulumul Qur'an, Vol. III, No. 1, 1992, "Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia," Oleh Bambang Pranowo.

Ulumul Qur'an, Vol. III, No. 3, 1992, "Islam, Negara dan Formasi Sosial dalam Orde Baru," Oleh M. Syafii'i Anwar.

Ulumul Qur'an, Vol.V, No. 2, 1994, "Politik Aliran, Masihkah Relevan?" Oleh Adnan Buyung Nasution.

Ulumul Qur'an, Vol. VI, No. 4, 1995, "ICMI Langkah Strategis Menuju Pemberdayaan Umat Berkualitas?," Oleh Agus Wahib.

Ulumul Qur'an, Vol. VI, No. 2, 1995, "Umat Islam dan Politik Representasi," Oleh Ulil Absar Abdalla.

Ummat, No. 18 Tahun 1, 4 Maret 1996, "Transformasi Nilai Islam dalam Kepemimpinan Nasional," Oleh A.M. Fatwa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ulumul Qur'an Vol. III, No. 3 1992, "Islam, Negara dan Formasi Sosial dan Orde Baru," Budy Munawar Rahman, (ed.).

Dokumen

Buku Peraturan Perundang-Undangan Pertahanan dan Keamanan RI (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dephankam, 1996)

Depertemen Penerangan, *Kabinet-Kabinet RI 1945-1968*, Jakarta: Departemen Penerangan, 1968.

Doktrin Perjuangan TNI-ABRI, Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1988.

Himpinan-Himpunan Ketetapan MPRS, cetakan II, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1969.

Himpunan Penjelasan dan Perundang-Undangan Bidang Hankamneg dari Tahun 1961-1971, Buku III, (Jakarta: Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Dephankam, 1989)

Himpunan Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI (Jakarta: Biro Sekretariat Jendral Dephankam, 1996).

Kamus

Hornoby, AS., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford University Press, 1974.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggri, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1982).

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahas Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka).

Wawancara

Abdoel Fattah, Jum'at, 24 Maret 2006 di Jakarta.

Anhar Gonggong, Rabo 19 Maret 2006 di Jakarta.

Salim Said, Senin, 27 Maret 2006 di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA